

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2022



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2022

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jakarta, Agustus 2023

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2022

Penyusun & Penyunting:

Subbagian Data dan Informasi

Bagian Program dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Desain sampul & layout:

Hardi Kurnia Putra, ST.

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Gedung Manggala Wanabakti

Blok I Lantai 7, Cq. Bagian Program dan Evaluasi

Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telp/Fax: (021) 5730289/ (021) 5734632

Email: datainformasi.planologi@gmail.com

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 ini merupakan penerbitan lanjutan dari Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun sebelumnya yang disusun berdasarkan hasil kompilasi data dari Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) sampai dengan 31 Desember 2022. Adapun acuan dalam penyusunan buku Statistik ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK /SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan sekaligus menyempurnakan data dan informasi sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa dalam Buku Statistik ini masih banyak kekurangan, namun harapan kami semoga Buku Statistik ini dapat memberikan manfaat terutama bagi yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL


**Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN	
TABEL I.1 REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2022 (Ribu Ha).....	1
TABEL I.2 ANGKA DEFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2021 – 2022 (Ha)	12
TABEL I.3 POTENSI TEGAKAN HUTAN DI INDONESIA	24
II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	
TABEL II.1 PERKEMBANGAN PENYUSUNAN/REVISI/REVIEW RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI S.D. DESEMBER 2022.....	27
TABEL II.2 PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP	32
III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN	
TABEL III.1 LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN S.D. DESEMBER 2022	37
TABEL III.2 PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN S.D. DESEMBER 2022.....	39
TABEL III.3 PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS 2022.....	40
TABEL III.4 PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN S.D. DESEMBER 2022 ...	41
TABEL III.5 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA S.D. DESEMBER 2022	42
TABEL III.6 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HT S.D. DESEMBER 2022	43
TABEL III.7 PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA)	44
IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN	
TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI	45
TABEL IV.2 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)	66
TABEL IV.3 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON KEHUTANAN LAINNYA (TAHAP SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN).....	67
TABEL IV.4 PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN	68
V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)	
TABEL V.1 PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)	69
TABEL V.2 PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL	72
TABEL V.3 PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI.....	76
TABEL V.4 DAFTAR KPH BERLEMBAGA DAN UNIT-UNIT YANG DINAUNGI.....	80
TABEL V.5 PENETAPAN FASILITASI KPH	88

VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

TABEL VI.1	PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (TAMBANG) S.D. DESEMBER 2022.....	95
TABEL VI.2	PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG) S.D. DESEMBER 2022.....	96
TABEL VI.3	PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBANG) S.D. DESEMBER 2022.....	97
TABEL VI.4	PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S.D. DESEMBER 2022	98
TABEL VI.5	PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s.d. Tahap Berita Acara Serah Terima).....	99
TABEL VI.6	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH).....	100

VII. KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT DAN DOKUMEN LINGKUNGAN

TABEL VII.1	DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DAN IZIN LINGKUNGAN (UKL-UPL) TAHUN 2013-2022	101
TABEL VII.2	DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN (AMDAL) TAHUN 2013-2022	102
TABEL VII.3	PERKEMBANGAN PENETAPAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP	103
TABEL VII.4	PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN.....	103
TABEL VII.5	DAFTAR JUMLAH KOMISI PENILAI AMDAL DI INDONESIA	103

VIII. KLHS DAN EKOREGION

TABEL VIII.1	JUMLAH SATUAN DAN LUAS EKOREGION PULAU DAN KEPULAUAN	105
TABEL VIII.2	LUAS WILAYAH EKOREGION LAUT	108
TABEL VIII.3	STATUS VALIDASI KAJIAN INGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)	109
TABEL VIII.4	STATUS VALIDASI KAJIAN INGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN (RRTR)	111
TABEL VIII.5	STATUS VALIDASI KAJIAN INGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PERIODE TAHUN 2017-2022	114
TABEL VIII.6	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)	115
TABEL VIII.7	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) PERIODE TAHUN 2017-2022	116
TABEL VIII.8	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) FOOD ESTATE (FE).....	118
TABEL VIII.9	KEGIATAN REVIEW DAN BIMBINGAN TEKNIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	119
TABEL VIII.10	PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL	120
TABEL VIII.11	PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	121
TABEL VIII.12	PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	124

IX. INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030

TABEL IX.1	LUAS AREA PELAKSANAAN PROGRAM AKSI MITIGASI MENURUT PEMANGKU KAWASAN PADA IPL 7, 8 DAN 9 (2021-2024) DALAM HEKTAR	137
------------	---	-----

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

TABEL X.1	REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH.....	139
TABEL X.2	SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH.....	141
TABEL X.3	PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH.....	143
TABEL X.4	PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.....	145
TABEL X.5	PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	147
TABEL X.6	REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	159
TABEL X.7	PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	161



STATISTIK
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2022

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

DIREKTORAT INVENTARISASI PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

TABEL 1.1 REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2021 (Ribu Ha)

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						APL	JUMLAH	TOTAL			
		HUTAN TETAP			HPK	Jumlah	%						
		HK	HL	HPT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1 ACEH													
A. Hutan	770,2	1.645,2	112,9	364,2	2.892,5	2,1	2.894,5	241,4	3.135,9	55,5			
- Hutan Primer	645,9	1.288,8	55,0	149,3	2.139,0	0,0	2.139,0	32,9	2.171,9	38,4			
- Hutan Sekunder	118,7	346,3	48,8	175,2	689,1	1,4	690,5	159,0	849,5	15,0			
- Hutan Tanaman *	5,5	10,1	9,1	39,7	64,4	0,7	65,1	49,5	114,6	2,0			
B. Non Hutan	86,6	146,7	29,8	187,5	450,6	13,3	463,9	2.053,5	2.517,4	44,5			
Total	856,7	1.791,9	142,7	551,7	3.343,0	15,4	3.358,4	2.294,9	5.653,3	100,0			
2 SUMUT													
A. Hutan	372,2	714,5	319,2	313,6	1.719,5	8,9	1.728,4	156,8	1.885,1	26,7			
- Hutan Primer	284,0	243,7	33,8	2,6	564,1	0,9	565,1	1,8	566,8	8,0			
- Hutan Sekunder	88,1	446,8	283,1	189,2	1.007,2	7,1	1.014,3	142,4	1.156,7	16,4			
- Hutan Tanaman *	0,2	24,0	2,3	121,7	148,2	0,9	149,1	12,6	161,6	2,3			
B. Non Hutan	47,0	474,6	307,6	361,3	1.190,4	82,6	1.273,0	3.913,5	5.186,5	73,3			
Total	419,2	1.189,1	626,8	674,8	2.910,0	91,4	3.001,4	4.070,2	7.071,7	100,0			
3 SUMBAR													
A. Hutan	668,0	572,7	148,3	260,0	1.649,0	69,0	1.718,0	173,0	1.891,0	45,5			
- Hutan Primer	374,6	198,1	4,5	8,9	586,1	2,6	588,7	14,0	602,7	14,5			
- Hutan Sekunder	293,4	374,0	134,2	229,0	1.030,6	61,6	1.092,2	147,6	1.239,8	29,8			
- Hutan Tanaman *	0,0	0,5	9,6	22,2	32,3	4,7	37,0	11,4	48,4	1,2			
B. Non Hutan	97,6	198,9	79,9	96,3	472,7	91,1	563,8	1.702,9	2.266,7	54,5			
Total	765,7	771,6	228,2	356,3	2.121,7	160,0	2.281,8	1.875,9	4.157,7	100,0			
4 RIAU													
A. Hutan	474,3	86,2	329,7	1.543,8	2.433,9	61,6	2.495,6	85,4	2.580,9	29,2			
- Hutan Primer	153,7	31,0	50,9	19,0	254,5	1,5	256,0	3,3	259,3	2,9			
- Hutan Sekunder	316,9	55,2	245,9	657,5	1.275,5	53,6	1.329,0	66,1	1.395,2	15,8			
- Hutan Tanaman *	3,7	0,0	33,0	867,3	903,9	6,6	910,5	15,9	926,4	10,5			
B. Non Hutan	151,5	142,0	676,5	780,9	1.750,9	1.081,3	2.832,1	3.427,2	6.259,4	70,8			
Total	625,8	223,2	1.006,2	2.324,6	4.184,8	1.142,9	5.327,7	3.512,6	8.840,3	100,0			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						APL	JUMLAH	TOTAL
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	JAMBI									
	A. Hutan	556,0	137,2	120,7	449,1	1.262,9	0,1	1.263,0	65,5	1.328,5
	- Hutan Primer	453,6	90,8	35,3	64,8	644,5	-	644,5	22,7	667,2
	- Hutan Sekunder	102,4	44,3	75,6	99,3	321,6	0,0	321,6	32,1	353,6
	- Hutan Tanaman *	-	2,1	9,8	285,0	296,9	0,1	296,9	10,7	307,7
	B. Non Hutan	154,4	43,4	143,7	503,5	845,0	11,0	856,0	2.670,8	3.526,8
	Total	710,4	180,5	264,4	952,6	2.107,9	11,1	2.119,0	2.736,2	4.855,3
6	SUMSEL									
	A. Hutan	388,2	239,7	71,5	745,5	1.444,8	-	1.444,8	61,9	1.506,8
	- Hutan Primer	293,7	88,1	10,6	6,7	399,1	-	399,1	1,9	401,0
	- Hutan Sekunder	93,7	151,0	48,2	66,4	359,3	-	359,3	42,7	402,0
	- Hutan Tanaman *	0,8	0,5	12,7	672,4	686,4	-	686,4	17,4	703,8
	B. Non Hutan	327,6	327,6	142,7	948,9	1.746,8	144,1	1.890,9	5.208,9	7.099,9
	Total	715,8	567,4	214,2	1.694,4	3.191,7	144,1	3.335,8	5.270,9	8.606,7
7	KEP. BANGKA BELITUNG									
	A. Hutan	9,4	76,4	-	77,6	163,3	0,0	163,4	41,7	205,0
	- Hutan Primer	2,1	18,4	-	3,7	24,1	0,0	24,1	2,6	26,7
	- Hutan Sekunder	7,3	58,0	-	73,9	139,3	0,0	139,3	39,0	178,3
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Non Hutan	26,8	108,9	-	356,8	492,4	0,7	493,1	967,2	1.460,2
	Total	36,1	185,2	-	434,4	655,7	0,7	656,4	1.008,8	1.665,2
8	BENGKULU									
	A. Hutan	392,1	167,5	58,4	12,7	630,6	0,0	630,7	23,6	654,2
	- Hutan Primer	340,7	116,9	15,4	2,9	476,0	-	476,0	0,4	476,4
	- Hutan Sekunder	51,2	50,6	42,9	9,8	154,5	0,0	154,5	23,1	177,7
	- Hutan Tanaman *	0,2	-	-	0,2	-	0,2	0,2	0,0	0,0
	B. Non Hutan	67,8	91,4	113,9	13,1	286,1	11,6	297,7	1.058,2	1.355,9
	Total	459,8	258,9	172,3	25,8	916,7	11,7	928,4	1.081,8	2.010,2

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						APL	JUMLAH	TOTAL
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 LAMPUNG										
A. Hutan	233,0	52,4	9,9	11,9	307,3	-	307,3	15,0	322,3	9,6
- Hutan Primer	127,6	2,9	0,9	-	131,4	-	131,4	0,6	131,9	3,9
- Hutan Sekunder	105,4	49,6	9,0	0,1	164,1	-	164,1	14,4	178,5	5,3
- Hutan Tanaman *	-	-	11,8	11,8	-	-	11,8	0,0	11,8	0,4
B. Non Hutan	178,3	270,4	19,2	157,3	625,2	-	625,2	2.413,7	3.038,9	90,4
Total	411,3	322,8	29,2	169,3	932,5	-	932,5	2.428,6	3.361,1	100,0
10 KEPRI										
A. Hutan	1,2	52,4	66,6	48,3	168,5	42,8	211,3	75,6	286,8	35,2
- Hutan Primer	-	7,5	3,0	4,0	14,4	2,6	17,0	1,1	18,1	2,2
- Hutan Sekunder	1,2	45,0	63,6	44,3	154,0	40,2	194,2	74,5	268,7	33,0
- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Non Hutan	3,5	43,0	50,1	26,3	122,9	38,5	161,4	365,5	526,9	64,8
Total	4,7	95,5	116,6	74,5	291,3	81,4	372,7	441,1	813,8	100,0
PULAU SUMATERA										
A. Hutan	3.864,5	3.744,3	1.237,0	3.826,6	12.672,4	184,5	12.856,9	939,6	13.796,5	29,3
- Hutan Primer	2.676,0	2.086,3	209,2	261,8	5.233,2	7,6	5.240,8	81,2	5.322,1	11,3
- Hutan Sekunder	1.178,3	1.620,8	951,3	1.544,8	5.295,1	163,9	5.459,1	740,9	6.200,0	13,2
- Hutan Tanaman *	10,3	37,2	76,5	2.020,1	2.144,1	12,9	2.157,0	117,5	2.274,5	4,8
B. Non Hutan	1.141,1	1.846,8	1.563,5	3.431,7	7.983,0	1.474,2	9.457,2	23.781,4	33.238,6	70,7
Total	5.005,6	5.591,1	2.800,5	7.258,3	20.655,5	1.658,7	22.314,2	24.721,0	47.035,2	100,0
11 BANTEN										
A. Hutan	71,4	7,0	37,2	15,7	131,3	-	131,3	26,5	157,8	16,7
- Hutan Primer	7,3	-	0,0	0,0	7,3	-	7,3	0,0	7,3	0,8
- Hutan Sekunder	57,1	3,9	9,0	1,1	71,1	-	71,1	4,0	75,0	8,0
- Hutan Tanaman *	7,0	3,1	28,2	14,6	52,9	-	52,9	22,5	75,4	8,0
B. Non Hutan	30,4	3,2	22,5	11,9	68,0	-	68,0	717,8	785,8	83,3
Total	101,8	10,2	59,7	27,6	199,3	-	199,3	744,3	943,6	100,0

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						APL	JUMLAH	TOTAL
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 DKI JAKARTA										
A. Hutan	0,4	0,0	-	0,1	0,5	-	0,5	0,6	1,1	1,7
- Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan Sekunder	0,4	0,0	-	0,1	0,5	-	0,5	0,6	1,1	1,7
- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Non Hutan	0,0	0,0	-	0,1	0,1	-	0,1	65,3	65,4	98,3
Total	0,4	0,0	-	0,1	0,6	-	0,6	65,9	66,5	100,0
13 JABAR										
A. Hutan	151,3	157,6	113,5	127,8	550,2	-	550,2	136,3	686,5	18,5
- Hutan Primer	9,1	1,1	0,0	1,3	11,5	-	11,5	0,0	11,6	0,3
- Hutan Sekunder	109,8	69,2	15,4	20,1	214,5	-	214,5	15,2	229,7	6,2
- Hutan Tanaman *	32,4	87,2	98,0	106,5	324,1	-	324,1	121,1	445,2	12,0
B. Non Hutan	22,7	74,9	68,0	86,1	251,8	-	251,8	2,780,9	3.032,7	81,5
Total	174,1	232,5	181,5	213,9	802,0	-	802,0	2.917,2	3.719,2	100,0
14 JATENG										
A. Hutan	10,4	75,9	165,3	312,0	563,6	-	563,6	95,2	658,8	19,1
- Hutan Primer	-	7,1	0,5	0,0	7,6	-	7,6	0,0	7,6	0,2
- Hutan Sekunder	4,9	35,5	37,5	8,5	86,4	-	86,4	19,4	105,8	3,1
- Hutan Tanaman *	5,5	33,3	127,3	303,5	469,6	-	469,6	75,8	545,4	15,8
B. Non Hutan	5,2	9,1	15,4	65,4	95,2	-	95,2	2.704,1	2.799,3	80,9
Total	15,6	85,0	180,7	377,5	658,8	-	658,8	2.799,3	3.458,1	100,0
15 DI YOGYAKARTA										
A. Hutan	2,6	1,9	0,0	10,9	15,4	-	15,4	3,5	18,9	5,9
- Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan Sekunder	1,3	-	-	-	1,3	-	1,3	0,1	1,4	0,4
- Hutan Tanaman *	1,3	-	-	-	-	-	14,1	3,4	17,6	5,5
B. Non Hutan	0,5	0,5	0,0	2,8	3,8	-	3,8	299,0	302,9	94,1
Total	3,1	2,3	0,0	13,8	19,2	-	19,2	302,6	321,8	100,0

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						APL	JUMLAH	TOTAL
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 JATIM										
A. Hutan	191,1	262,7	-	634,7	1.088,5	-	1.088,5	159,5	1.248,0	25,6
- Hutan Primer	26,7	12,7	-	4,6	44,1	-	44,1	1,6	45,7	0,9
- Hutan Sekunder	154,6	159,5	-	59,8	373,9	-	373,9	40,9	414,8	8,5
- Hutan Tanaman *	9,8	90,4	-	570,3	670,6	-	670,6	116,9	787,5	16,2
B. Non Hutan	44,4	75,2	-	173,9	293,5	-	293,5	3.328,9	3.622,4	74,4
Total	235,5	337,9	-	808,6	1.382,0	-	1.382,0	3.488,4	4.870,4	100,0
PULAU JAWA										
A. Hutan	427,2	505,1	315,9	1.101,2	2.349,5	-	2.349,5	421,7	2.771,2	20,7
- Hutan Primer	43,1	21,0	0,5	5,9	70,5	-	70,5	1,7	72,2	0,5
- Hutan Sekunder	328,0	268,2	61,9	89,5	747,6	-	747,6	80,2	827,9	6,2
- Hutan Tanaman *	56,0	216,0	253,5	1.005,8	1.531,3	-	1.531,3	339,8	1.871,1	14,0
B. Non Hutan	103,4	162,8	106,0	340,2	712,4	-	712,4	9.896,0	10.608,4	79,3
Total	530,6	668,0	421,9	1.441,4	3.061,9	-	3.061,9	10.317,7	13.379,6	100,0
17 KALBAR										
A. Hutan	1.154,9	1.786,0	1.388,1	794,1	5.122,9	52,3	5.175,2	462,6	5.637,8	38,7
- Hutan Primer	956,8	981,6	324,8	15,8	2.279,0	0,6	2.279,6	2,1	2.281,7	15,7
- Hutan Sekunder	198,1	804,3	1.054,2	697,6	2.754,2	51,7	2.805,9	457,1	3.263,0	22,4
- Hutan Tanaman *	-	-	9,0	80,7	89,7	-	89,7	3,4	93,1	0,6
B. Non Hutan	268,0	499,8	730,7	1.309,0	2.807,6	132,0	2.939,6	5.979,1	8.918,6	61,3
Total	1.422,9	2.285,8	2.118,8	2.103,1	7.930,5	184,3	8.114,8	6.441,6	14.556,5	100,0
18 KALSEL										
A. Hutan	134,8	358,6	78,8	268,2	840,5	9,3	849,8	76,2	926,0	25,1
- Hutan Primer	17,3	38,1	1,8	0,3	57,5	-	57,5	2,0	59,5	1,6
- Hutan Sekunder	83,8	319,7	74,0	200,1	677,6	8,5	686,1	52,0	738,1	20,0
- Hutan Tanaman *	33,7	0,8	3,1	67,8	105,4	0,8	106,2	22,2	128,4	3,5
B. Non Hutan	80,5	147,2	45,8	467,0	740,5	110,6	851,1	1.911,2	2.762,3	74,9
Total	215,3	505,8	124,6	735,2	1.581,0	119,9	1.700,9	1.987,4	3.688,3	100,0

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						APL	JUMLAH	TOTAL
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 KALTENG										
A. Hutan	1.055,0	949,0	2.801,5	1.884,3	6.689,7	444,3	7.134,0	208,2	7.342,2	48,4
- Hutan Primer	293,2	441,9	329,2	21,7	1.086,0	0,8	1.086,8	0,2	1.086,9	7,2
- Hutan Sekunder	761,8	507,0	2.467,9	1.720,5	5.457,2	437,8	5.895,0	185,1	6.080,1	40,1
- Hutan Tanaman *	-	0,0	4,5	142,1	146,6	5,6	152,2	23,0	175,2	1,2
B. Non Hutan	545,9	398,3	468,6	1.885,9	3.298,7	1.443,0	4.741,6	3.086,3	7.828,0	51,6
Total	1.600,9	1.347,2	3.270,1	3.770,1	9.988,4	1.887,3	11.875,6	3.294,6	15.170,2	100,0
20 KALTIM										
A. Hutan	190,8	1.770,7	2.765,4	2.028,9	6.755,8	137,3	6.893,1	864,9	7.758,0	60,9
- Hutan Primer	11,8	1.291,8	865,0	78,3	2.246,8	3,9	2.250,7	85,5	2.336,3	18,3
- Hutan Sekunder	178,5	477,8	1.884,6	1.417,6	3.958,6	89,7	4.048,2	748,4	4.796,7	37,7
- Hutan Tanaman *	0,5	1,0	15,8	533,0	550,4	43,8	594,1	30,9	625,1	4,9
B. Non Hutan	244,2	46,7	216,1	895,0	1.402,0	56,8	1.458,8	3.518,1	4.976,9	39,1
Total	435,0	1.817,4	2.981,5	2.923,9	8.157,8	194,1	8.351,9	4.383,0	12.734,9	100,0
21 KALTARA										
A. Hutan	1.264,2	999,2	2.021,1	853,1	5.137,6	46,2	5.183,8	594,3	5.778,2	84,2
- Hutan Primer	1.201,1	896,1	1.258,2	284,3	3.639,8	0,2	3.639,9	180,5	3.820,4	55,7
- Hutan Sekunder	63,1	103,0	760,4	492,3	1.418,7	45,9	1.464,6	408,4	1.873,1	27,3
- Hutan Tanaman *	-	-	2,5	76,6	79,1	0,2	79,3	5,4	84,7	1,2
B. Non Hutan	9,1	12,9	54,3	219,8	296,1	12,9	308,9	774,4	1.083,3	15,8
Total	1.273,3	1.012,0	2.075,5	1.072,9	5.433,7	59,1	5.492,8	1.368,7	6.861,5	100,0
PULAU KALIMANTAN										
A. Hutan	3.799,6	5.863,4	9.054,9	5.828,5	24.546,5	689,4	25.235,9	2.206,3	27.442,2	51,8
- Hutan Primer	2.480,1	3.649,6	2.779,0	400,4	9.309,1	5,4	9.314,5	270,3	9.584,8	18,1
- Hutan Sekunder	1.285,3	2.211,9	6.241,0	4.528,0	14.266,3	633,6	14.899,9	1.851,1	16.751,0	31,6
- Hutan Tanaman *	34,2	1,9	34,9	900,1	971,1	50,3	1.021,5	85,0	1.106,4	2,1
B. Non Hutan	1.147,7	1.104,8	1.515,5	4.776,7	8.544,8	1.755,3	10.300,1	15.269,0	25.569,1	48,2
Total	4.947,3	6.968,2	10.570,5	10.605,3	33.091,3	2.444,7	35.536,0	17.475,3	53.011,3	100,0

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						APL	JUMLAH	TOTAL			
		HUTAN TETAP			HP	Jumlah	HPK						
		HK	HL	HPT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
22	SULUT												
	A. Hutan	208,2	112,1	139,8	27,9	487,9	11,6	499,5	50,0	549,5			
	- Hutan Primer	128,3	62,2	31,3	10,3	232,1	-	232,1	6,8	238,9			
	- Hutan Sekunder	79,9	49,8	108,5	17,6	255,8	11,6	267,4	43,2	310,6			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Non Hutan	36,3	48,2	70,3	36,2	191,0	3,1	194,0	699,3	893,3			
	Total	244,5	160,2	210,1	64,0	678,9	14,7	693,5	749,3	1.442,9			
23	GORONTALO												
	A. Hutan	186,3	178,5	203,2	70,3	638,2	10,8	649,0	60,8	709,8			
	- Hutan Primer	129,1	77,3	64,5	6,1	277,0	0,5	277,5	1,9	279,5			
	- Hutan Sekunder	57,2	101,2	126,4	53,0	337,7	8,4	346,1	57,8	403,9			
	- Hutan Tanaman *	-	-	12,3	11,2	23,5	1,9	25,4	1,1	26,5			
	B. Non Hutan	9,7	24,3	48,4	19,0	101,4	12,4	113,9	373,7	487,5			
	Total	196,0	202,8	251,6	89,3	739,7	23,2	762,9	434,4	1.197,3			
24	SULTENG												
	A. Hutan	554,6	1.121,4	1.217,1	313,8	3.206,9	109,7	3.316,6	443,6	3.760,2			
	- Hutan Primer	322,6	809,9	711,3	160,0	2.003,8	47,5	2.051,3	128,7	2.180,0			
	- Hutan Sekunder	232,0	311,5	505,6	153,9	1.202,9	62,2	1.265,2	314,3	1.579,5			
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,6	0,7			
	B. Non Hutan	84,7	129,8	211,6	111,3	537,4	46,3	583,8	1.701,9	2.285,7			
	Total	639,3	1.251,2	1.428,6	425,2	3.744,3	156,0	3.900,4	2.145,5	6.045,9			
25	SULTRA												
	A. Hutan	220,9	950,6	358,9	204,9	1.735,2	30,0	1.765,2	117,7	1.883,0			
	- Hutan Primer	15,0	712,2	208,4	51,3	986,9	9,8	996,7	10,2	1.006,9			
	- Hutan Sekunder	205,9	238,4	150,5	152,9	747,7	20,2	767,9	107,3	875,2			
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0,6	0,0	0,6	0,2	0,8	0,0			
	B. Non Hutan	72,5	131,1	91,0	205,3	499,9	50,3	550,2	1.190,0	1.740,2			
	Total	293,4	1.081,7	449,9	410,2	2.235,2	80,3	2.315,4	1.307,8	3.623,2			
										100,0			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						APL	JUMLAH	TOTAL			
		HUTAN TETAP			HP	Jumlah	HPK						
		HK	HL	HPT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
32	MALUT												
	A. Hutan	205,8	490,3	568,4	368,1	1.632,6	288,4	1.921,0	112,2	2.033,2			
	- Hutan Primer	62,9	141,3	103,1	15,5	322,9	14,5	337,4	15,5	352,8			
	- Hutan Sekunder	142,9	348,8	461,4	322,4	1.275,5	272,2	1.547,7	96,7	1.644,5			
	- Hutan Tanaman *	-	0,2	3,9	30,1	34,3	1,6	35,9	0,0	35,9			
	B. Non Hutan	13,0	78,7	110,9	113,2	315,9	255,4	571,2	534,2	1.105,4			
	Total	218,8	569,1	679,3	481,3	1.948,5	543,8	2.492,2	646,4	3.138,7			
										100,0			
33	PULAU MALUKU												
	A. Hutan	583,1	1.012,4	1.328,0	800,0	3.723,5	1.113,1	4.836,6	274,6	5.111,1			
	- Hutan Primer	187,6	181,0	134,4	78,5	581,5	242,6	824,1	28,2	852,3			
	- Hutan Sekunder	395,5	831,1	1.189,8	691,3	3.107,7	868,9	3.976,6	246,4	4.222,9			
	- Hutan Tanaman *	-	0,2	3,9	30,1	34,3	1,6	35,9	0,0	35,9			
	B. Non Hutan	58,9	185,9	245,6	328,1	818,5	753,9	1.572,4	1.087,0	2.659,4			
	Total	642,0	1.198,3	1.573,7	1.128,0	4.542,0	1.867,0	6.408,9	1.361,6	7.770,5			
										100,0			
34	PAPUA												
	A. Hutan	5.314,6	6.889,4	5.262,2	4.213,6	21.679,8	2.322,2	24.002,0	1.239,3	25.241,3			
	- Hutan Primer	4.520,3	6.048,5	4.034	2.582,7	17.154,9	1.388,7	18.543,6	643,6	19.187,3			
	- Hutan Sekunder	794,3	840,8	1.256,6	1.622,6	4.514,3	932,3	5.446,6	595,3	6.041,9			
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	2,2	8,3	10,6	1,2	11,8	0,4	12,1			
	B. Non Hutan	1.410,2	788,2	700,0	676,6	3.575,1	1.256,9	4.832,1	885,0	5.717,0			
	Total	6.724,8	7.677,6	5.962,2	4.890,3	25.254,9	3.579,1	28.834,0	2.124,3	30.958,3			
										100,0			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN						TOTAL		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah	APL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PULAU PAPUA										
A. Hutan	7.001,3	8.439,8	7.051,0	6.343,4	28.835,4	3.605,9	32.441,3	1.887,0	34.328,3	84,2
- Hutan Primer	5.926,4	7.238,8	5.247,5	3.537,9	21.950,6	2.068,9	24.019,5	854,7	24.874,2	61,0
- Hutan Sekunder	1.074,8	1.201,0	1.801,3	2.796,8	6.873,9	1.535,8	8.409,6	1.032,0	9.441,6	23,2
- Hutan Tamanan *	-	0,1	2,2	8,7	10,9	1,2	12,1	0,4	12,5	0,0
B. Non Hutan	1.443,3	895,8	754,8	773,1	3.866,9	1.366,2	5.233,2	1.198,3	6.431,4	15,8
Total	8.444,6	9.335,5	7.805,8	7.116,5	32.702,4	4.972,1	37.674,4	3.085,3	40.759,7	100,0
INDONESIA										
A. Hutan	17.442,3	23.953,1	21.785,1	18.876,3	82.056,8	5.792,9	87.849,7	7.485,7	95.335,4	50,8
- Hutan Primer	12.257,9	15.764,6	9.677,5	4.598,0	42.297,9	2.391,3	44.689,2	1.581,3	46.270,6	24,7
- Hutan Sekunder	5.080,7	7.926,9	11.713,9	10.296,6	35.018,0	3.333,5	38.351,6	5.355,2	43.706,7	23,3
- Hutan Tamanan *	103,8	261,6	393,7	3.981,8	4.740,8	68,1	4.808,9	549,2	5.358,1	2,9
B. Non Hutan	4.339,1	5.310,2	5.006,6	10.317,2	24.973,2	5.542,6	30.515,8	61.828,0	92.343,7	49,2
Total	21.781,4	29.263,4	26.791,7	29.193,5	107.030,0	11.335,5	118.365,5	69.313,7	187.679,1	100,0

Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

* : Hutan tamanan berdasarkan penafsiran penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan tanaman baik Hutan Tamanan Industri/UPHHK-HT maupun Hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/pengaljauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Luas penutupan lahan ini berdasarkan data digital hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2021

Sumber: - Hasil Penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2021, Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

- Data digital Perkembangan Kawasan Hutan per Desember 2021, Direktorat Pengukuran dan Penetapanan Kawasan Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN

TABEL I.2 ANGKA DEFORESTASI NETTO DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2020 - 2021 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP			HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									11	
1 ACEH										
A. Hutan Primer	146,7	252,0	70,6	108,9	578,2	-	578,2	199,2	777,4	
- Hutan lahan kering primer	146,7	252,0	70,6	108,9	578,2	-	578,2	199,2	777,4	
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B. Hutan Sekunder	163,4	469,2	71,3	524,9	1.228,7	9,4	1.238,1	983,2	2.221,3	
- Hutan lahan kering sekunder	152,4	467,2	71,3	524,9	1.215,7	9,4	1.225,1	956,1	2.181,2	
- Hutan rawa sekunder	11,0	-	-	-	11,0	-	11,0	27,2	38,2	
- Hutan mangrove sekunder	-	2,0	-	-	2,0	-	2,0	-	2,0	
C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	310,1	721,2	141,9	633,8	1.806,9	9,4	1.816,3	1.182,5	2.998,8	
2 SUMATERA UTARA										
A. Hutan Primer	312,5	140,8	-	-	453,3	-	453,3	-	453,3	
- Hutan lahan kering primer	312,5	140,8	-	-	453,3	-	453,3	-	453,3	
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B. Hutan Sekunder	68,5	852,3	305,7	673,5	1.980,0	69,9	2.049,9	897,8	2.947,7	
- Hutan lahan kering sekunder	68,5	852,3	305,3	672,8	1.968,9	69,9	2.038,8	868,8	2.907,6	
- Hutan rawa sekunder	-	-	10,5	-	10,5	-	10,5	19,3	29,8	
- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	0,7	0,7	-	0,7	9,7	10,4	
C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(4,2)	(4,2)	-	(4,2)	(57,9)	(62,1)	
TOTAL	381,0	993,2	305,7	669,2	2.429,1	69,9	2.499,0	839,9	3.338,9	
3 RIAU										
A. Hutan Primer	-	127,9	277,7	-	405,6	65,0	470,7	174,2	644,8	
- Hutan lahan kering primer	-	127,9	289,6	-	397,5	52,5	450,0	174,2	624,1	
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Hutan mangrove primer	-	-	8,1	-	8,1	12,5	20,7	-	20,7	
B. Hutan Sekunder	503,2	207,1	2.553,0	2.036,9	5.300,2	255,6	5.555,8	855,6	6.411,3	
- Hutan lahan kering sekunder	490,5	162,0	288,7	38,3	979,5	129,3	1.108,8	57,2	1.166,0	
- Hutan rawa sekunder	12,7	5,3	2.037,1	1.982,2	4.037,3	82,7	4.120,1	719,0	4.839,0	
- Hutan mangrove sekunder	-	39,8	227,2	16,3	283,4	43,5	326,9	79,4	406,3	
C. Hutan Tanaman*	-	-	27,9	(282,6)	(254,7)	-	(254,7)	(4,4)	(259,1)	
TOTAL	503,2	335,0	2.858,6	1.754,3	5.451,1	320,6	5.771,7	1.025,3	6.797,1	

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

NO.	PROVINSI// DEFORESTASI PADA	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL	
		Tipe Hutan	HK	HL	HPT	HP	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 SUMATERA BARAT										
A. Hutan Primer	19,6	4,8	1,5	63,1	890	9,6	98,6	-	98,6	
-Hutan lahan kering primer	19,6	4,8	1,5	-	25,9	9,6	35,5	-	35,5	
-Hutan rawa primer	-	-	-	63,1	63,1	-	63,1	-	63,1	
-Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B. Hutan Sekunder	461,4	196,3	252,2	430,6	1.340,5	161,8	1.502,3	244,3	1.746,6	
-Hutan lahan kering sekunder	461,4	183,5	232,2	215,4	1.112,4	39,1	1.151,6	183,1	1.334,7	
-Hutan rawa sekunder	-	10,2	-	215,2	225,5	117,2	342,7	15,7	358,4	
-Hutan mangrove sekunder	-	2,6	-	-	2,6	5,5	8,0	45,5	53,5	
C. Hutan Tanaman*	-	-	(5,9)	(74,5)	(80,4)	(95,6)	(176,0)	(151,4)	(327,4)	
TOTAL	481,0	201,1	247,8	419,2	1.349,1	75,8	1.424,9	92,9	1.517,8	
5 JAMBI										
A. Hutan Primer	192,5	17,9	16,2	59,6	286,2	-	286,2	67,2	353,4	
-Hutan lahan kering primer	192,5	17,9	16,2	59,6	286,2	-	286,2	41,2	327,4	
-Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	26,1	26,1	
B. Hutan Sekunder	964,2	16.050,4	512,9	19.341,2	2,2	19.343,5	514,9	19.858,3		
-Hutan lahan kering sekunder	272,7	48,5	384,8	342,8	1.048,8	2,2	1.051,0	182,4	1.233,4	
-Hutan rawa sekunder	1.541,0	915,7	15.665,6	170,1	18.292,5	-	18.292,5	114,1	18.406,6	
-Hutan mangrove sekunder	-	-	(201,3)	13,7	(187,6)	-	(187,6)	218,4	218,4	
C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	23,0	(164,6)	
TOTAL	2.006,2	982,1	15.855,3	596,3	19.439,9	2,2	19.442,1	605,1	20.047,2	
6 SUMATERA SELATAN										
A. Hutan Primer	9,8	9,7	-	-	19,5	-	19,5	-	19,5	
-Hutan lahan kering primer	1,2	9,7	-	-	10,9	-	10,9	-	10,9	
-Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-Hutan mangrove primer	8,6	-	-	-	8,6	-	8,6	-	8,6	
B. Hutan Sekunder	69,5	1.733,9	611,3	667,1	3.081,8	-	3.081,8	210,9	3.292,7	
-Hutan lahan kering sekunder	61,5	245,7	611,3	8,2	926,6	-	926,6	59,7	986,3	
-Hutan rawa sekunder	8,0	373,2	-	639,0	1.040,1	-	1.040,1	123,1	1.163,2	
-Hutan mangrove sekunder	-	1.115,1	-	1.115,1	-	-	1.115,1	28,1	1.143,2	
C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(1.119,4)	(1.119,4)	-	(1.119,4)	(1,0)	(1.120,4)	
TOTAL	79,3	1.743,6	611,3	(452,3)	1.981,8	-	1.981,8	209,9	2.191,7	

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI// DEFORESTASI PADA	TIPE HUTAN	HUTAN TETAP			HPK	Jumlah	APL	TOTAL
			HK	HL	HPT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Hutan Sekunder	20,9	118,3	-	1.730,6	1.869,8	-	1.869,8	117,4	1.987,2
- Hutan lahan kering sekunder	20,9	56,7	-	289,7	367,2	-	367,2	43,8	411,0
- Hutan rawa sekunder	-	61,7	-	1.440,9	1.502,6	-	1.502,6	73,7	1.576,2
- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20,9	118,3	-	1.730,6	1.869,8	-	1.869,8	117,4	1.987,2
8 BENGKULU									
A. Hutan Primer	173,8	175,7	98,4	-	447,9	-	447,9	-	447,9
- Hutan lahan kering primer	173,8	175,7	98,4	-	447,9	-	447,9	-	447,9
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Hutan Sekunder	229,4	345,5	496,1	334,7	1.405,7	-	1.405,7	178,6	1.584,3
- Hutan lahan kering sekunder	229,4	345,5	496,1	334,7	1.405,7	-	1.405,7	178,6	1.584,3
- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	403,2	521,2	594,5	334,7	1.853,6	-	1.853,6	178,6	2.032,2
9 LAMPUNG									
A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Hutan Sekunder	4,0	213,7	4,5	-	222,3	-	222,3	52,8	275,1
- Hutan lahan kering sekunder	4,0	213,7	4,5	-	222,3	-	222,3	50,1	272,4
- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7
C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4,0	213,7	4,5	-	222,3	-	222,3	52,8	275,1

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

NO.	PROVINSI// DEFORESTASI PADA	TIPE HUTAN	HUTAN TETAP				HPK	Jumlah	APL	TOTAL
			HK	HL	HPT	HP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	KEPULAUAN RIAU									
A.	Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Hutan Sekunder	-	33,7	81,9	239,0	354,6	67,3	421,9	60,1	482,0
	-Hutan lahan kering sekunder	-	32,2	8,0	2,7	43,0	-	43,0	42,0	85,0
	-Hutan rawa sekunder	-	-	72,5	236,3	308,8	51,8	360,6	1,5	362,2
	-Hutan mangrove sekunder	-	1,5	1,3	-	2,8	15,5	18,3	16,6	34,9
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	33,7	81,9	239,0	354,6	67,3	421,9	60,1	482,0
11	BANTEN									
A.	Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Hutan Sekunder	9,1	(283,7)	-	(274,6)	-	(274,6)	(3,5)	(3,5)	(278,1)
	-Hutan lahan kering sekunder	9,1	-	-	9,1	-	9,1	-	-	9,1
	-Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove sekunder	-	(283,7)	-	(283,7)	-	(283,7)	(3,5)	(3,5)	(287,2)
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	9,1	(283,7)	-	(274,6)	-	(274,6)	(3,5)	(3,5)	(278,1)
12	DKI JAKARTA									
A.	Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

NO.	PROVINSI// DEFORESTASI PADA	TIPE HUTAN	HUTAN TETAP				HPK	Jumlah	APL	TOTAL
			HK	HL	HPT	HP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	JAWA BARAT									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	55,6	40,7	-	6,9	103,1	-	103,1	3,6	106,7
	- Hutan lahan kering sekunder	55,6	42,0	-	6,9	104,5	-	104,5	17,9	122,5
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	(1,4)	-	(1,4)	-	(1,4)	(14,4)	(14,4)	(15,8)
	C. Hutan Tanaman*	220,5	-	15,0	-	235,5	-	235,5	39,9	275,3
	TOTAL	276,1	40,7	15,0	6,9	338,6	-	338,6	43,4	382,0
14	JAWA TENGAH									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	119,2	-	119,2	-	119,2	-	119,2	(3,4)	115,8
	- Hutan lahan kering sekunder	119,2	-	119,2	-	119,2	-	119,2	-	119,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	(3,4)	(3,4)
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	76,1	76,1	-	76,1	15,2	91,3
	TOTAL	-	119,2	-	76,1	195,3	-	195,3	11,8	207,1
15	D.I. YOGYAKARTA									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

NO.	PROVINSI// DEFORESTASI PADA	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL	
		Tipe Hutan	HK	HL	HPT	HP	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	JAWA TIMUR									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	84,9	-	-	84,9	-	84,9	-	35,8	120,6
	- Hutan lahan kering sekunder	84,9	-	-	84,9	-	84,9	-	84,9	84,9
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	35,8	35,8
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	22,5	22,5
	TOTAL	84,9	-	-	84,9	-	84,9	-	58,3	143,2
17	KALIMANTAN BARAT									
	A. Hutan Primer	27,4	15,9	-	-	43,3	-	43,3	2,7	46,0
	- Hutan lahan kering primer	27,4	15,9	-	-	43,3	-	43,3	2,7	46,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	401,4	1.161,6	2.760,2	4.563,6	8.886,8	2.031,6	10.918,4	6.886,5	17.804,9
	- Hutan lahan kering sekunder	198,5	990,5	2.680,2	2.174,4	6.043,7	6,7	6.050,3	1.885,7	7.946,1
	- Hutan rawa sekunder	203,0	132,6	77,5	2.389,2	2.802,2	2.024,9	4.827,1	4.946,9	9.774,1
	- Hutan mangrove sekunder	-	38,4	2,5	-	40,9	-	40,9	43,9	84,8
	C. Hutan Tanaman*	-	(193,6)	(14.073,2)	(14.266,8)	(14.266,8)	(14.266,8)	(14.266,8)	(99,6)	(14.366,4)
	TOTAL	428,8	1.177,5	2.565,5	(9.509,6)	(5.336,7)	2.031,6	(3.305,1)	6.789,7	3.484,6
18	KALIMANTAN SELATAN									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	17,5	194,9	1.389,7	1.602,0	373,9	1.975,9	238,4	2.214,3
	- Hutan lahan kering sekunder	-	17,5	194,9	1.387,7	1.600,0	217,3	1.817,4	217,4	2.034,8
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	2,0	2,0	156,5	158,5	3,6	162,1
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	17,4	17,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	(402,0)	(402,0)	-	(402,0)	(402,0)	216,6	(185,5)
	TOTAL	-	17,5	194,9	987,7	1.200,0	373,9	1.573,9	454,9	2.028,8

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI//	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL	
		DEFORESTASI PADA	Tipe Hutan	HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 KALIMANTAN TENGAH										
A. Hutan Primer	-	5,8	-	-	-	5,8	-	5,8	-	5,8
- Hutan lahan kering primer	-	5,8	-	-	-	5,8	-	5,8	-	5,8
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Hutan Sekunder	374,2	925,5	1.831,0	10.935,9	14.066,5	2.177,6	16.244,1	5.781,6	22.025,7	
- Hutan lahan kering sekunder	-	81,8	1.831,0	7.860,1	9.772,8	1.116,8	10.889,6	1.324,7	12.214,3	
- Hutan rawa sekunder	374,2	843,7	-	3.075,8	4.293,7	1.060,8	5.354,5	4.428,9	9.783,4	
- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	28,0	28,0	
C. Hutan Tanaman*	-	-	(495,7)	(495,7)	(495,7)	(495,7)	-	-	-	(495,7)
TOTAL	374,2	931,2	1.831,0	10.440,2	13.576,6	2.177,6	15.754,2	5.781,6	21.535,8	
20 KALIMANTAN TIMUR										
A. Hutan Primer	-	37,4	15,8	-	53,1	-	53,1	-	47,6	100,7
- Hutan lahan kering primer	-	37,4	15,8	-	53,1	-	53,1	-	14,9	68,0
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	32,7
B. Hutan Sekunder	87,5	14,0	1.752,1	4.896,8	6.750,3	388,4	7.138,7	9.114,7	16.253,3	
- Hutan lahan kering sekunder	45,0	14,0	1.752,1	4.577,2	6.388,2	309,4	6.697,7	8.254,7	14.952,4	
- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	2,8	2,8	50,9	53,7	433,3	487,0
- Hutan mangrove sekunder	42,5	-	-	316,8	359,3	28,1	387,3	426,7	814,0	
C. Hutan Tanaman*	-	-	(1.235,0)	(1.569,5)	(2.744,5)	(2.744,5)	(2.744,5)	(118,4)	(2.862,9)	
TOTAL	87,5	51,4	532,8	3.387,3	4.059,0	388,4	4.447,3	9.043,8	13.491,1	
21 KALIMANTAN UTARA										
A. Hutan Primer	33,0	2,4	330,8	9,0	375,2	-	375,2	68,6	443,8	
- Hutan lahan kering primer	33,0	2,4	330,8	4,0	370,2	-	370,2	65,6	435,8	
- Hutan rawa primer	-	-	-	5,0	5,0	-	5,0	-	5,0	
- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	
B. Hutan Sekunder	13,5	68,0	1.301,2	1.638,4	3.021,1	126,9	3.148,0	3.659,5	6.807,5	
- Hutan lahan kering sekunder	13,5	68,0	1.301,2	1.363,3	2.746,1	121,6	2.867,6	1.572,6	4.440,2	
- Hutan rawa sekunder	-	-	-	186,1	186,1	0,3	186,3	1.673,2	1.859,5	
- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	89,0	89,0	5,1	94,1	413,7	507,7	
C. Hutan Tanaman*	-	-	179,3	179,3	-	179,3	-	179,3	179,3	181,0
TOTAL	46,5	70,4	1.632,0	1.826,7	3.575,6	126,9	3.702,5	3.729,8	7.432,3	

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

NO.	PROVINSI//	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL	
		DEFORESTASI PADA	TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	SULAWESI UTARA									
	A. Hutan Primer	-	3,9	-	-	-	3,9	-	3,9	3,9
	- Hutan lahan kering primer	-	3,9	-	-	-	3,9	-	3,9	3,9
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	12,1	23,8	17,7	1,6	55,2	-	55,2	49,2	104,4
	- Hutan lahan kering sekunder	12,1	23,8	17,7	1,6	55,2	-	55,2	42,8	98,0
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	12,1	27,7	17,7	1,6	59,1	-	59,1	49,2	103,3
22	GORONTALO									
	A. Hutan Primer	12,6	-	-	-	12,6	-	12,6	-	12,6
	- Hutan lahan kering primer	12,6	-	-	-	12,6	-	12,6	-	12,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	75,5	40,0	73,2	198,2	386,9	5,2	392,1	107,3	499,4
	- Hutan lahan kering sekunder	75,5	18,0	73,2	198,2	365,0	5,2	370,2	100,7	470,9
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	21,9	-	-	21,9	-	21,9	6,5	28,5
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	88,1	40,0	73,2	198,2	399,4	5,2	404,7	107,3	511,9
24	SULAWESI TENGAH									
	A. Hutan Primer	4,4	11,6	375,3	169,5	560,9	14,3	575,2	36,4	611,6
	- Hutan lahan kering primer	4,4	11,6	375,3	169,5	560,9	14,3	575,2	35,3	610,5
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2
	B. Hutan Sekunder	18,0	153,6	387,8	288,3	847,7	131,3	979,0	800,2	1.779,2
	- Hutan lahan kering sekunder	18,0	152,1	387,8	288,3	846,2	131,3	977,5	735,4	1.712,9
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,4
	- Hutan mangrove sekunder	-	1,5	-	-	1,5	-	1,5	59,3	60,9
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	22,4	165,2	763,1	457,8	1.408,6	145,6	1.554,2	836,6	2.390,8

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI//	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL	
		DEFORESTASI PADA	Tipe Hutan	HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	SULAWESI TENGGARA									
A.	Hutan Primer	96,8	783,8	323,6	328,9	1.533,0	0,9	1.533,9	116,7	1.650,6
	-Hutan lahan kering primer	96,8	783,8	323,6	328,9	1.533,0	0,9	1.533,9	50,4	1.584,3
	-Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	66,3	66,3
B.	Hutan Sekunder	28,0	301,6	946,1	565,4	1.841,1	25,4	1.866,5	670,9	2.537,4
	-Hutan lahan kering sekunder	28,0	169,0	946,1	565,4	1.708,4	25,4	1.733,8	502,4	2.236,2
	-Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove sekunder	-	132,6	-	-	132,6	-	132,6	168,5	301,2
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	124,8	1.085,4	1.289,6	894,3	3.374,1	26,3	3.400,4	787,6	4.188,0
26	SULAWESI BARAT									
A.	Hutan Primer	-	543,4	1,1	-	544,6	-	544,6	-	544,6
	-Hutan lahan kering primer	-	543,4	1,1	-	544,6	-	544,6	-	544,6
	-Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Hutan Sekunder	-	1.293,6	501,8	1.264,6	3.060,1	-	3.060,1	86,2	3.146,2
	-Hutan lahan kering sekunder	-	1.292,8	501,8	1.264,6	3.059,3	-	3.059,3	86,2	3.145,4
	-Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove sekunder	-	0,8	-	-	0,8	-	0,8	-	0,8
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	1.837,1	502,9	1.264,6	3.604,6	-	3.604,6	86,2	3.690,8
27	SULAWESI SELATAN									
A.	Hutan Primer	-	8,5	-	-	8,5	-	8,5	9,1	17,6
	-Hutan lahan kering primer	-	8,5	-	-	8,5	-	8,5	9,1	17,6
	-Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Hutan Sekunder	-	23,4	35,9	-	59,3	-	59,3	66,7	126,0
	-Hutan lahan kering sekunder	-	23,3	35,9	-	59,2	-	59,2	25,9	85,2
	-Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Hutan mangrove sekunder	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	40,7	40,8
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	32,0	35,9	-	67,9	-	67,9	75,7	143,6

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

NO.	PROVINSI//	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL	
		DEFORESTASI PADA	Tipe Hutan	HK	HL	HPT	HP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	BALI									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	0,1	27,0	184	-	45,6	-	45,6	-	45,6
	- Hutan lahan kering sekunder	0,1	27,0	184	-	45,6	-	45,6	-	45,6
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	0,1	27,0	184	-	45,6	-	45,6	-	45,6
29	NUSA TENGGARA BARAT									
	A. Hutan Primer	-	19,3	3,5	45,6	68,5	-	68,5	-	68,5
	- Hutan lahan kering primer	-	19,3	3,5	45,6	68,5	-	68,5	-	68,5
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	212,5	562,7	633,2	932,0	2.400,3	-	2.400,3	-	2.400,3
	- Hutan lahan kering sekunder	212,5	562,7	633,2	932,0	2.400,3	-	2.400,3	-	2.400,3
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(130,1)	(130,1)	-	(130,1)	-	(130,1)
	TOTAL	212,5	582,0	636,7	907,5	2.338,7	-	2.338,7	-	2.338,7
30	NUSA TENGGARA TIMUR									
	A. Hutan Primer	106,6	241,5	14,7	3,8	366,5	-	366,5	-	366,5
	- Hutan lahan kering primer	106,6	241,5	14,7	3,8	366,5	-	366,5	-	366,5
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	4,3	112,4	143,5	185,0	445,1	-	445,1	-	445,1
	- Hutan lahan kering sekunder	4,3	112,4	143,5	185,0	445,1	-	445,1	-	445,1
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	110,9	353,8	158,1	188,8	811,6	-	811,6	-	588,9
										1.400,5

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI//	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL	
		DEFORESTASI PADA	Tipe Hutan	HK	HL	HPT	HP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	MALUKU UTARA									
	A. Hutan Primer	-	4,8	-	15,6	-	20,4	12	21,6	-
	- Hutan lahan kering primer	-	4,8	-	15,6	-	20,4	12	21,6	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	10,8	114,7	98,8	409,0	633,4	248,2	881,6	60,7	942,3
	- Hutan lahan kering sekunder	10,8	114,7	98,8	409,0	633,4	248,2	881,6	60,7	942,3
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	10,8	119,5	114,3	409,0	653,8	249,4	903,2	60,7	963,9
32	MALUKU									
	A. Hutan Primer	-	-	21,9	2,1	24,0	2,9	26,9	-	26,9
	- Hutan lahan kering primer	-	-	21,9	2,1	24,0	2,9	26,9	-	26,9
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	1,4	(73,4)	628,6	400,3	956,9	224,8	1.181,7	84,9	1.266,6
	- Hutan lahan kering sekunder	1,4	(73,4)	628,6	400,3	956,9	215,4	1.172,3	82,8	1.255,1
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	9,4	9,4	-	9,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1,4	(73,4)	630,5	402,5	981,0	227,7	1.208,6	84,9	1.293,5
	PAPUA									
	A. Hutan Primer	271,2	132,9	-	375,8	779,9	47,8	827,7	-	827,7
	- Hutan lahan kering primer	264,2	132,9	-	375,8	772,9	47,8	820,7	-	820,7
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	7,0	-	-	-	7,0	-	7,0	-	7,0
	B. Hutan Sekunder	17,6	310,3	221,7	640,7	1.190,3	552,5	1.742,8	2.135,8	3.878,6
	- Hutan lahan kering sekunder	17,6	310,3	211,9	200,5	740,4	546,8	1.287,2	2.028,5	3.315,7
	- Hutan rawa sekunder	-	-	9,7	440,3	450,0	5,7	455,7	107,3	562,9
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	(1.155,2)	(1.155,2)	-	(1.155,2)	-	(1.155,2)	(1.155,2)
	TOTAL	288,8	443,2	221,7	(138,7)	815,0	600,3	1.415,3	2.135,8	3.551,1

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI// DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN						APL	TOTAL
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	PAPUA BARAT								11
	A. Hutan Primer	-	1,5	8,1	57,5	67,1	38,9	106,0	1,0
	- Hutan lahan kering primer	-	1,5	8,1	57,5	67,1	35,7	102,8	1,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	103,8
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	3,2	3,2	-
	B. Hutan Sekunder	17,0	31,1	36,0	482,9	567,0	267,6	834,6	1.425,6
	- Hutan lahan kering sekunder	17,0	9,2	36,0	88,0	150,1	171,7	321,8	1.319,2
	- Hutan rawa sekunder	-	21,9	-	395,0	416,9	96,0	512,8	106,4
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	619,3
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(322,3)	(322,3)	(15,7)	(338,0)	-
	TOTAL	17,0	32,5	44,1	218,2	311,8	290,8	602,7	1.426,6
									2.029,2
	INDONESIA								
	A. Hutan Primer	1.406,8	2.541,5	1.574,9	1.223,9	6.747,0	180,7	6.927,7	807,3
	- Hutan lahan kering primer	1.391,1	2.541,5	1.566,7	1.155,8	6.685,1	164,9	6.820,0	678,2
	- Hutan rawa primer	-	-	-	68,1	68,1	-	68,1	68,1
	- Hutan mangrove primer	15,7	-	8,1	-	23,8	15,8	39,6	129,1
	B. Hutan Sekunder	4.757,5	10.117,7	32.088,3	36.009,5	82.973,0	7.119,4	90.092,4	36.604,0
	- Hutan lahan kering sekunder	2.565,2	6.682,1	13.984,3	24.392,0	47.623,6	3.365,7	50.989,3	22.181,5
	- Hutan rawa sekunder	2.149,9	2.364,3	17.872,9	11.194,8	33.581,8	3.646,7	37.228,5	73.170,8
	- Hutan mangrove sekunder	42,5	1.071,3	231,0	422,8	1.767,6	107,0	1.874,6	12.800,9
	C. Hutan Tanaman*	220,5	-	(1.532,9)	(19.299,5)	(20.671,9)	(113,9)	(20.783,2)	50.029,4
	TOTAL	6.384,8	12.659,2	32.070,2	17.933,9	60.048,1	7.188,8	76.236,9	3.496,1
									(20.897,1)
									113.534,3

Ket. * : Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri/UPH/KHT maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Deforestasi pada Hutan Tanaman di dalam kawasan hutan KSA-KPA dan/atau HL, tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri/UPH/KHT

;umber - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2020 dan 2021, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan per Desember 2021, Direktorat Pengukuran dan Penataan Kawasan Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

TABEL I.3. POTENSI TEGAKAN HUTAN DI INDONESIA

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
1	Aceh	Hutan lahan kering primer	37	321,08	209,27
		Hutan lahan kering sekunder	36	151,52	76,24
		Hutan Rawa sekunder	2	173,34	106,77
2	Bali	Hutan lahan kering primer	11	283,20	175,90
		Hutan lahan kering sekunder	9	102,63	50,58
3	Banten	Hutan Lahan Kering Sekunder	12	252,41	177,14
4	Bengkulu	Hutan Lahan Kering Primer	26	271,13	167,54
		Hutan Lahan Kering Sekunder	20	220,14	129,48
5	Gorontalo	Hutan Lahan Kering Primer	21	320,69	217,57
		Hutan Lahan Kering Sekunder	25	227,42	138,81
6	Jambi	Hutan Lahan Kering Primer	18	319,86	196,22
		Hutan Lahan Kering Sekunder	37	185,75	93,35
		Hutan Rawa Primer	5	214,19	77,88
		Hutan Rawa sekunder	4	80,46	31,34
7	Jawa Barat	Hutan Lahan Kering Primer	4	332,71	212,18
		Hutan Lahan Kering Sekunder	27	172,82	95,49
8	Jawa Tengah	Hutan Lahan Kering Sekunder	5	154,24	82,87
9	Jawa Timur	Hutan Lahan Kering Primer	6	420,41	333,80
		Hutan Lahan Kering Sekunder	49	201,18	145,23
10	Kalimantan Barat	Hutan Lahan Kering Primer	95	294,42	190,00
		Hutan Lahan Kering Sekunder	127	184,82	105,85
		Hutan Rawa Sekunder	73	153,48	61,15
11	Kalimantan Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	7	301,27	176,07
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	155,04	80,94
12	Kalimantan Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	32	258,83	177,00
		Hutan Lahan Kering Sekunder	154	184,83	106,67
		Hutan Rawa Primer	5	199,34	91,36
		Hutan Rawa Sekunder	85	114,98	33,26
13	Kalimantan Timur	Hutan Lahan Kering Primer	30	236,70	149,27
		Hutan Lahan Kering Sekunder	214	159,02	88,81
		Hutan Rawa Sekunder	11	97,80	42,08
14	Kalimantan Utara	Hutan Lahan Kering Primer	46	201,40	127,97
		Hutan Lahan Kering Sekunder	55	174,89	110,16
		Hutan Rawa Sekunder	11	152,99	46,36

**I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
15	Kepulauan Bangka Belitung	Hutan Lahan Kering Sekunder	14	91,75	28,57
		Hutan Rawa Sekunder	4	90,60	35,12
16	Kepulauan Riau	Hutan Lahan Kering Sekunder		185,88	85,46
17	Lampung	Hutan Lahan Kering Primer	26	321,60	230,67
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	199,55	123,76
		Hutan Rawa Sekunder	7	166,69	78,07
18	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	13	256,23	137,11
		Hutan Lahan Kering Sekunder	81	182,60	128,16
19	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	229,00	137,11
		Hutan Lahan Kering Sekunder	26	198,62	128,16
20	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	61	261,87	159,32
		Hutan Lahan Kering Sekunder	41	135,89	64,98
21	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	35	292,21	200,72
		Hutan Lahan Kering Sekunder	73	100,37	47,79
22	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	96	192,57	108,25
		Hutan Lahan Kering Sekunder	79	162,33	84,04
		Hutan Rawa Primer	61	148,27	82,95
		Hutan Rawa Sekunder	35	93,87	42,61
23	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Primer	84	223,16	134,06
		Hutan Lahan Kering Sekunder	47	184,17	109,59
		Hutan Rawa Primer	12	177,65	115,40
24	Riau	Hutan Lahan Kering Primer	10	240,52	100,05
		Hutan Lahan Kering Sekunder	49	195,69	94,04
		Hutan Rawa Primer	8	265,58	141,01
		Hutan Rawa Sekunder	110	150,55	45,15
25	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	24	264,33	150,84
		Hutan Lahan Kering Sekunder	19	154,00	77,48
26	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	42	201,05	95,50
		Hutan Lahan Kering Sekunder	36	117,43	56,56
27	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	119	214,27	116,50
		Hutan Lahan Kering Sekunder	86	170,88	92,28
28	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	37	290,14	174,94
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	133,92	65,57
29	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	14	360,73	258,18
		Hutan Lahan Kering Sekunder	19	232,15	139,45

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

SUMBER DAYA HUTAN

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
30	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	16	299,03	172,44
		Hutan Lahan Kering Sekunder	46	164,17	78,48
		Hutan Rawa Sekunder	4	71,74	11,62
31	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	20	234,73	133,86
		Hutan Lahan Kering Sekunder	41	118,56	55,59
		Hutan Rawa Sekunder	21	156,29	77,92
32	Sumatera Utara	Hutan Lahan Kering Primer	26	333,73	194,98
		Hutan Lahan Kering Sekunder	58	206,09	105,07
		Hutan Rawa Sekunder	6	149,24	64,81

Keterangan:

1. Data yang digunakan adalah data plot PSP kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional Tahun 1990-2021
2. Nilai potensi tegakan adalah nilai potensi untuk seluruh jenis pohon

STATISTIK
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2022

PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

**DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

TABEL II.1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN/REVISI/REVIEW RKTP S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2022

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP				Keterangan
		Belum Menyusun	Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
1	Aceh		√/D							
2	Sumatera Utara				√					Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022, tanggal 4 April 2022
3	Sumatera Barat					√				Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012 sebagai amanah direvisi melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020
4	Jambi			√/F						
5	Riau			√/D						
6	Kepulauan Riau			√/D						
7	Bengkulu				√		√			Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013
8	Kepulauan Bangka Belitung					√	√			Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014, tanggal 23 Juli 2014
9	Sumatera Selatan			√/D						
10	Lampung		√/D							

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP			Keterangan
		Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
11	Banten		✓/D						
12	DKI Jakarta		✓/D						
13	Jawa Barat			✓		✓			Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014
14	Jawa Tengah			✓			✓		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012, 28 September 2012
15	D.I. Yogyakarta			✓		✓			Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, tanggal 9 Januari 2012
16	Jawa Timur			✓		✓			Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013
17	Bali			✓		✓			Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014
18	Nusa Tenggara Barat			✓		✓			Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, tanggal 2 November 2013
19	Nusa Tenggara Timur			✓		✓			Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013
20	Kalimantan Barat			✓		✓			Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP			Keterangan
		Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
21	Kalimantan Selatan				✓				Tahun 2016, tanggal 3 Oktober 2016
22	Kalimantan Tengah		✓/D		✓				Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015
23	Kalimantan Timur				✓				Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 5 Juli 2012 sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018 ✓
24	Kalimantan Utara				✓				Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015
25	Sulawesi Utara				✓		✓		Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014
26	Gorontalo				✓		✓		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun
27	Sulawesi Tengah				✓		✓		

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP			Keterangan
		Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
28	Sulawesi Selatan			✓	✓				Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018
29	Sulawesi Barat			✓	✓				Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014
30	Sulawesi Tenggara			✓	✓				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015
31	Maluku Utara			✓	✓				Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016
32	Maluku			✓					Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 40 Tahun 2022, tanggal 31 Oktober 2022
33	Papua		✓/D						
34	Papua Barat				✓				Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022
Jumlah		-	10	1	23	16*	1	1	2
Tahun		-	12	2	20	16	2	-	2
1. 2021									

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP			Keterangan
		Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
2.	Tahun 2022	-	10	1	23	16	1	1	2

Catatan :

*untuk Provinsi yang sudah disahkan melalui Pergub setelah Tahun 2021, Penyusunan RKTPnya sudah mengakomodir Dinamika Perkembangan Kehutanan dan perkembangan kebijakan2 serta sudah mengacu pada Peraturan Perundungan terbaru.
Perkembangan Penyusunan RKTP dan Review /Revisi RKTP sampai dengan Bulan Desember 2022 sudah mengalami penambahan bila dibandingkan dengan Perkembangan Penyusunan RKTP dan Review /Revisi RKTP sampai dengan 2021

Sumber: Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2022

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

TABEL II.2. PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KSAIKPA HL HPT HP HPK JUMLAH	18.462 64.654 4.517 91.903 - 179.536	3.331 67.488 5.496 55.402 - 131.717	3.568 18.224 5.743 1.137 2.603 31.275	2.613 60.590 634 66.685 - 130.542	2.630 35.010 960 41.656 - 80.256	2.630 35.010 960 41.656 - 80.256	3.028 7.854 10.113 5.456 - 26.461
2	SUMATERA UTARA	KSAIKPA HL HPT HP HPK JUMLAH	- 50.783 104.210 141.270 - 296.263	- 461.527 319.449 447.156 36.302 1.269.284	- 10.857 2.291 21.577 704 35.429	- 104.444 3.467 28.504 70.947 207.362	- 208.305 176.722 222.009 35.680 642.716	- 208.305 176.722 222.009 35.680 642.716	1.140 8.598 2.326 5.830 - 17.884
3	SUMATERA BARAT	KSAIKPA HL HPT HP HPK JUMLAH	4.852 86.339 23.606 97.062 4.350 216.189	7.560 97.563 25.709 50.204 30.350 211.386	882 3.650 6.098 1.045 1.869 13.544	- 87.456 21.541 33.621 4.595 147.213	- 50.887 21.293 36.230 16.806 126.286	- 50.887 21.293 36.230 16.806 126.286	3.412 6.098 25.3 143 9.906
4	RIAU	KSAIKPA HL HPT HP HPK JUMLAH	4.577 16.864 59.466 296.400 172.400 1.087.707	25.469 32.256 546.252 327.677 2.599.042 3.530.696	5.521 12.331 8.875 19.491 696 46.914	2.186 17.636 481.978 11.493 204.250 717.543	- - 173.039 84.446 1.445.889 1.703.374	- - 173.039 84.446 1.445.889 1.703.374	5.796 5 4.836 905 - 11.552
5	JAMBI	KSAIKPA HL HPT HP HPK JUMLAH	- - 63.411 8.834 - 1.087.707	- - 5.070 100.152 - 3.530.696	- - - 10.908 - 46.914	- - - 18.935 - 717.543	- - - 13.545 - 1.703.374	336 - 1.323 167 - 1.703.374	- - - - - 1.703.374

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN			PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	KAWASAN HUTAN (Ha)	PERUBAHAN PERINTUKAN	PENNUJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERINTUKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	SUMATERA SELATAN	KSA/KPA	607	22.145	6.207	607	21.903	7.624	Persejuihan Perubahan Kawasan Hutan resmi Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menlhut-II/2013 tanggal 19 Februari 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09567/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persejuihan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS; Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.150/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai lindaklanjut rekomenasifitndakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 254/ORI-SR/II/2018 tanggal 22 Februari 2018; 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menlhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindaklanjut rekomenasifitndakan korektif atas Surat Ombudsman RI, persejuihan KH-API (SM-API) seluas 9.329 ha)
7	BENGKULU	KSA/KPA	9.607	9.875	-	-	-	-	
		HL	48.173	2.709	-	-	-	-	
		HPT	2.723	35.969	-	-	-	-	
		HP	-	2.949	-	-	-	-	
		HPK	-	10.360	-	-	-	-	
		JUMLAH	60.503	61.861	-	-	-	-	
8	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	
9	KEP. BANGKA BELITUNG	KSA/KPA	772	420	-	190	-	-	
		HL	-	33.012	1.993	2.529	-	1.993	
		HPT	-	-	-	-	-	-	
		HP	8.589	100.158	1.225	8.159	19.131	1.225	
		HPK	-	-	-	-	-	-	
		JUMLAH	9.361	133.590	3.218	10.878	19.131	3.218	
10	KEP.RIAU	KSA/KPA	3.120	12.943	3	4014	1.571	-	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menlhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014; telah diberikan Keputusan Menteri LHK No SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Peribahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindaklanjut Persejuihan Sebagian DPCLS Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW.1057/06/DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	
12	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	
13	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	
14	DI. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	
15	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	
16	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN			PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENNUJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENNUJUKAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	NUSA TENGGARA TIMUR	KSA/KPA Darat KSA/KPA Air	3.613	7.352	5.328	617			5.328
		HL	-	1.963					Terdapat Usulan sesuai Surat Gubernur NTT, Nomor :
		HPT	-	74.606	5.064				1. Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013, tgl 11-10-2013
		HP	6.263	23.800	34				2. Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013, tgl 20-11-2013
		HPK	11.472	59.939	14.092	3.499	10.307		3. Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tgl 5-6-2014
		JUMLAH	21.348	45.535	-	8.052	27.057		4. Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015, tgl 15-4-2015
									Update per 31 Des 2015 adalah Review RTRW NTT dalam tahap finalisasi
									Telah diberikan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menlhk/Sptjen/PLA/o/5/2016; 11
									Mei 2016
20	KALIMANTAN BARAT	HL	198.725	200.648	77.186	66.048	-	-	29.156
		HPT	235.363	637.048	51.984	149.567	189.460		Persejuijan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan telah diterbitakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov.Kalbar
		HP	126.769	1.064.863	87.434	41.681	294.912		2.977
		HPK	111.339	211.200	5.768	77.007	69.765		20.253
		JUMLAH	672.096	2.133.759	222.372	334.303	554.137		52.386
21	KALIMANTAN TENGAH	KSA/KPA	148.512	38.856	15.169	48.412	-	-	13.601
		HL	180.947	5.426	50.472	33.116	-		9.968
		HPT	636.399	124.183	17.933	86.977	101.157		3.179
		HP	2.401.681	840.773	40.234	402.043	333.261		2.720
		HPK	533.117	1.913.076	820.907	119.118	734.238		204
		JUMLAH	3.900.666	2.922.314	944.715	689.666	1.168.666		29.672
22	KALIMANTAN SELATAN	KSA/KPA	4.991.764	697.84	-	4.209.57	1.398.60		Persejuijan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.16/MENLHK/SET JEN/PLA.0/1/2023 tanggal 13 Januari 2023
		HL	-	827.26	-	-	213.99		
		HPT	-	171.90	-	-	118.24		
		HP	-	30.998.18	-	5.978.15	23.822.90		
		HPK	-	631.24	-	-	516.34		
		JUMLAH	4.991.64	33.320.42	-	10.187.72	26.070.07		
23	KALIMANTAN UTARA	KSA/KPA	-	33.114	-				1. Usulan Gubernur Nomor: (1) 600/0242/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 27 Februari 2020;
		HL	-	34.555	-				(2) 600/1235/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 5 April 2021; (3) 600/1585/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021.
		HPT	-	251.399	-				2. Telah dilakukan kunjungan lapangan hasil kunjungan lapangan dan penyusunan draft kerita
		HP	-	374.490	-				3. Telah dilakukan pembahasan hasil kunjungan lapangan dan penyusunan draft kerita
		HPK	-	59.190	-				dan indikator
		JUMLAH	-	752.748	-				

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN			PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	KAWASAN HUTAN (Ha)	PERENJUKAN PERINTUKAN	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERINTUKAN	PENNUJUKAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	KALIMANTAN TIMUR	KSA/KPA	-	62.416,69	15.095,85				1. Usulan Gubernur Nomor 52/2/607/I/EK tanggal 3 November 2021 dan Nomor 650/I/025/DPU/PR tanggal 31 Januari 2023 2. Telah dilakukan ekspos usulan perubahan kawasan hutan oleh Gubernur Kalimantan Timur kepada Menteri LHK pada tanggal 28 Februari 2023 3. Telah dibentuk Tim Teknis, Tim GIS dan Sekretariat guna membantu Tim Terpadu melalui Keputusan Jenderal PKTL 4. SK pembentukan Tim Terpadu saat ini masih dalam proses pengajuan kepada Sekjen LHK guna mendapat persetujuan dari Menteri LHK
25	SULAWESI UTARA	KSA/KPA	793	72.421		465		182	Persejuijan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 434/Menlhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menlhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov.Sulut
26	SULAWESI TENGAH	KSA/KPA	-	71.581	57	1933		293	Persejuijan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.452/MENLHK/SETJEN/PLA/01/11/2020 tanggal 30 November 2020
27	SULAWESI SELATAN	KSA/KPA	36.825	49.854	53	11.805		6.254	-
		HPT	6.005	58.793	1.535	66	8.042	1535	53
		HP	-	7.652	-	23107		966	-
		HPK	-	54.328	103	17707		6.003	-
		JUMLAH	42.830	242.207	1.749	54.618		21.558	1.538
28	SULAWESI TENGGARA	KSA/KPA	22.595	13.266		24.662		1.645	-
		HL	76.036	98.388	886	49.291		45.726	170
		HPT	13.403	50.105	160	10.079		23.683	139
		HP		32.598	1.314	-		13.719	1.529
		HPK		9.478	-			6.564	-
		JUMLAH	112.034	203.836	2.360	84.032		91.337	1.838
29	GORONTALO	KSA/KPA	28.923	8.334	-	8.061		-	Persejuijan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menlhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011
		HL	187.128	30.236	-	52.660		-	SK.465/Menlhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.325/Menlhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Gorontalo
		HPT	23.706	29.427	-	15.773		13.059	-
		HP	61.714	154.376	-	34.078		52.287	-
		HPK	3.553	87.792	-	4.539		44.759	-
		JUMLAH	304.924	310.165	-	115.111		110.105	-
		KSA/KPA	17.031	-		15.024		167	Persejuijan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.324/Menlhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Gorontalo
		HL	8.353	5.550	37	28.603		5.095	-
		HPT	55.850	22.428	1.550	8.265		13.779	1.055
		HP	14.161	4.535	2.316	3.661		2.055	1.194
		HPK	-	3.319	2.048	-		1.509	1.538
		JUMLAH	95.395	35.892	5.951	55.553		22.605	3.787

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN			PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	KAWASAN HUTAN (Ha)	PENNUJUKAN PERINTUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERINTUKAN	PENNUJUKAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	SULAWESI BARAT	KSA/KPA	-	825	-	-	825	-	Persejuihan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.726/Menlh-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan telah diterbitakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.862/Menlh-II/2014 tanggal 29 September 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Sulbar
		HL	214.184	44.126	-	214.184	8.470	-	
		HPT	80.446	44.566	-	37.416	11.671	-	
		HP	-	48.286	-	-	28.618	-	
		HPK	-	31.085	-	-	23.972	-	
31	MALUKU	JUMLAH	294.630	168.860	-	251.600	73.556	-	Persejuihan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.877/Menlh-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09567/DPR RI/X/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persejuihan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS
		KSA/KPA	3.484	17.286	-	-	2	-	
		HL	30.670	75.645	6.125	-	3.985	2.326	
		HPT	204.600	117.452	987	4.785	11.482	987	
		HP	41.439	84.196	-	12.264	26.863	-	
32	MALUT	HPK	16.352	1.230.827	578	3.619	32.1813	-	Persejuihan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.490/Menlh-II/2012 tanggal 5-9-2012
		JUMLAH	296.545	1.525.376	-	20.688	364.115	3.313	
		KSA/KPA	28.650	1.636	444	-	-	-	
		HL	180.735	56.260	6.017	29.001	1.662	2.832	
		HPT	92.591	77.108	10.065	22.994	8.599	710	
33	PAPUA	HP	40.641	136.148	1.122	9.585	15.648	1.479	Persejuihan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menlh-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan telah diterbitakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menlh-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua
		HPK	42.156	679.564	7.071	30.642	247.452	-	
		JUMLAH	384.773	950.736	24.719	92.222	273.381	5.081	
		KSA/KPA	8.108	133.814	521	763	9.662	521	
		HL	405.429	269.758	10.661	395.176	44.532	7.742	
34	PAPUA BARAT	HPT	156.662	80.581	18.189	133.115	39.468	18.232	Persejuihan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.710/Menlh-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diterbitakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menlh-II/2014 tanggal 22 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua Barat
		HP	3.570.941	126.766	14.307	3.404.532	50.426	14.307	
		HPK	2.058.336	667.704	4.482	1.803.244	232.297	4.406	
		JUMLAH	6.199.496	1.278.623	48.160	5.736.830	376.385	45.258	
		KSA/KPA	238.324	35.714	4	5.835	-	-	
		HL	97.990	145.399	1.687	8.388	-	59	Persejuihan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.710/Menlh-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diterbitakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menlh-II/2014 tanggal 22 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua Barat
		HPT	92.203	102.674	2.150	23.532	44.817	2.633	
		HP	136.735	132.632	3.080	-	61.594	1.238	
		HPK	467.507	563.033	16.949	400.465	136.634	1.238	
		JUMLAH	1.032.759	979.452	23.870	438.220	243.045	3.934	

Sumber: Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pemantauan Wilayah Pengelolaan Hutan

Keterangan: pm = pro memory



STATISTIK
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2022

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN
PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

TABEL III.1. LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI AIR	KONSERVASI DARAT	JML KK AIR & DARAT	HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan	Luas Provinsi	Proporsi Luas KH (Daratan) (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	580/MENLHK/SETJEN/SET.I/12/2018	17/12/2018	0,00	1.058.364,40	1.058.364,40	1.781.677,92	145.178,34	549.794,88	15.374,69	3.550.390,23	3.550.390,23	5.795.600	61,3	
2	Sumatera Utara	579/Menlhk-II/2014	24/06/2014	0,00	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.759,00	704.452,00	75.684,00	3.055.795,00	3.055.795,00	7.298.123	41,9	
3	Sumatera Barat	35/MENLHK/SETJEN/PLA/2/	15/01/2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00	2.380.057,00	4.201.289	55,8	
4	Riau	903/MENLHK/SETJEN/PLA/2/12/2016	07/12/2016	0,00	630.753,00	630.753,00	233.910,00	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	5.406.992,00	5.406.992,00	8.702.366	62,1	
5	Jambi	863/Menlhk-II/2014	29/09/2014	0,00	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.555,00	2.098.555,00	5.005.816	41,9	
6	Sumatera Selatan	454/Menlhk/Sejien/PLA/26/2016 & 190/Menlhk/Sejien/PLA/04/2018	17 Juni / 2016 & 20 April 2018	49.104,00	741.681,00	790.788,00	578.279,00	2139.98,00	1.712.819,00	160.986,00	3.407.693,00	3.456.797,00	9.159.243	37,2	
7	Bengkulu	784/Menlhk-II/2012	27/12/2012	0,00	462.965,00	462.965,00	250.750,00	173.280,00	25.873,00	11.763,00	924.631,00	924.631,00	1.991.933	46,4	
8	Lampung	256/Kkpis-I/2000	23/08/2000	0,00	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	0,00	1.004.735,00	1.004.735,00	3.462.380	29,0	
9	Bangka Belitung	798/Menlhk-II/2012	27/12/2012	0,00	34.500,00	34.500,00	160.371,00	0,00	442.051,00	693,00	643.615,00	643.615,00	1.642.406	39,2	
10	Kepulauan Riau	76/Menlhk/II/2015 & 272/Menlhk/Sejien/PLA/06/2018	06/03/2015 & 6 Juni 2018	0,00	4.734,73	4.734,73	97.362,65	118.832,99	78.830,62	82.071,11	381.832,10	381.832,10	820.172	46,6	
11	DKI Jakarta	220/Kkpis-II/2000	02/08/2000	108.000,00	108.000,00	272,34	44,76	0,00	158,35	0,00	475,45	108.775,45	66.401	0,7	
12	Jawa Barat	195/Kkpis-II/2003	04/07/2003	0,00	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	0,00	816.603,00	816.603,00	3.537.776	23,1	
13	Jawa Tengah	359/Menlhk-II/2004	01/10/2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	0,00	647.133,00	757.250,00	3.280.069	19,7	
14	D.I Yogyakarta	171/Kkpis-II/2000	29/06/2000	0,00	910,34	910,34	2.057,90	0,00	13.851,28	0,00	16.819,52	16.819,52	313.315	5,4	
15	Jawa Timur	395/Menlhk-II/2011	21/07/2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	0,00	782.772,00	0,00	1.357.640,00	1.361.146,00	4.779.975	28,4	
16	Banten	419/Kkpis-II/1999	15/06/1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	0,00	201.787,00	253.254,00	966.292	20,9	
17	Bali	433/Kkpis-II/1998	15/06/1999	3.415,00	22.378,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	0,00	127.271,01	130.686,01	578.006	22,0	
18	N T B	598/Menlhk-II/2009 & 270/MENLHK/SETJEN/PLA/26/2017	2 Oktober 2009 & 5 Jun 2017	11.121,00	167.913,00	179.034,00	430.485,00	286.700,00	150.740,00	0,00	1.035.838,00	1.046.959,00	1.857.232	55,8	
19	N T T	357/Menlhk/Sejien/PLA/05/2016	11/05/2016	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	268.214,00	78.494,00	1.485.917,00	1.742.399,00	4.871.810	30,5	
20	Kalimantan Barat	73/Menlhk-II/2014; 399/MENLHK/PLA/2/10/2020; SK.1067/MENLHK/SETJEN/PLA/2/10/2022	02/09/2014; 16/10/2020; 7/10/2022	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.123.714,50	197.918,00	8.195.005,50	8.388.072,00	14.730.700	55,6	Percabutan Digital khusus provinsi Banten (ombudsman)
21	Kalimantan Tengah	529/Menlhk-II/2012	25/09/2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00	15.356.450	82,7	
22	Kalimantan Selatan	435/Menlhk-II/2009	23/07/2009	0,00	213.285,00	526.425,00	126.660,00	762.138,00	151.424,00	1.779.982,00	1.779.982,00	3.874.423	45,9		

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

No.	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI AIR	KONSERVASI DARAT	JML KK AIR & DARAT	HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan	Luas Provinsi	Proporsi Luas KH (paratan) (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014 & 278/MENLHK/SETJEN /PLA.26/2017 & 254/MENLHK/SETJEN /PLA.25/2018 136/MENLHK/SETJEN /PLA.22/2019; 478/MENLHK/SETJEN /PLA.21/2020	29 Agustus 2014 & 9 Jun 2017 & 30 Mei 2018, 13 Februari 2019; 30/12/2022 0	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.848.243,00	5.045.164,45	4.022.075,55	211.575,88	13.831.724,88	13.831.724,88	20.453.434	67,6	SK 478/MENLHK/SETJEN /PLA.21/2020 0 merevisi blad 1916 (ombudsman)
24	Sulawesi Utara	734/MenlHK-II/2014 & 869/MenlHK-II/2014;	02/09/2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	64.367,00	694.939,00	764.739,00	1.385.164	50,2	
25	Sulawesi Tengah	452/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022 0	29-09-2014; 30-11-2020	340.119,00	646.148,00	986.267,00	1.258.081,00	1.421.375,00	418.489,00	170.505,00	3.914.598,00	4.254.717,00	6.184.129	63,3	
26	Sulawesi Selatan	362/Menlhk/Setjenn/PLA.0/5/2019	28/05/2019	606.804,00	231.029,00	837.833,00	1.162.498,00	479.518,00	140.036,00	16.412,00	2.029.493,00	2.636.297,00	4.671.748	43,4	Hasil RTRWNP Sulsel 2019
27	Sulawesi Tenggara	465/MenlHK-II/2011	09/08/2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00	3.806.770	61,1	Perhitungan Digital
28	Gorontalo	325/MenlHK-II/2010	25/05/2010	0,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00	1.125.707	73,3		
29	Sulawesi Barat	862/MenlHK-II/2014	29/09/2014	0,00	215.90,00	452.030,00	350.700,00	71.859,00	22.557,00	1.092.376,00	1.092.376,00	1.092.376,00	1.678.718	65,1	
30	Maluku	854/MenlHK-II/2014	29/09/2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.886,00	3.910.409,00	3.919.617,00	4.691.403	83,4	
31	Maluku Utara	302/MenlHK-II/2013	01/05/2013	0,00	218.498,00	218.498,00	584.058,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00	3.198.250	78,6	
32	Papua Barat	783/MenlHK-II/2014	22/09/2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.558,00	1.631.588,00	1.777.480,00	2.188.160,00	8.784.787,00	9.713.137,00	9.967.163	88,1		
33	Papua	782/MenlHK-II/2012	27/12/2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00	30.387.498,00	31.903.805	92,1		
	Total			5.321.326,00	22.085.353,40	27.407.675,40	29.560.160,29	26.802.790,04	29.228.428,28	12.794.175,68	120.471.876,69	125.795.319,19	191.357.882,00	63,0	

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penegakanan KH, data s.d 31 Desember 2023

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

TABEL III.2. PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN S/D DESEMBER 2022

No.	Provinsi	S/D TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			S/D TAHUN 2022	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	HPK (Km)	BL (Km)	BF (Km)	HPK (Km)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Aceh	4.911,31	1.257,75	-	-	185,143	0	-	-	271	343	-	-	-	5.367,45	1.600,75	-				
2	Sumatera Utara	9.027,96	2.002,11	-	0	0	-	2.628	541	24	-	-	11.680,28	2.543,11	-						
3	Sumatera Barat	3.914,23	1.589,96	-	0	0	-	63	-	11	-	-	3.988,72	1.589,66	-						
4	Riau	9.474,92	1.520,54	-	0	116,164	0	-	303	208	3.189	1.266	-	13.082,60	2.994,81	-					
5	Jambi	3.733,34	804,02	-	0	0	292,32	-	85	25	-	-	-	4.110,66	829,02	-					
6	Sumatera Selatan	4.889,76	1.076,58	-	0	0	-	-	757	-	-	-	-	5.646,76	1.076,58	-					
7	Bengkulu	1.663,49	489,85	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1.663,49	489,85	-					
8	Lampung	3.294,02	25,01	-	0	0	-	-	9	-	-	-	-	3.303,02	25,01	-					
9	Kep. Bangka Belitung	705,16	77,42	-	0	0	307,36	-	98	-	-	-	-	1.110,52	77,42	-					
10	Kepulauan Riau	1.200,23	861,91	-	0	6.252,54	0	-	285	-	660	34	-	2.151,72	895,80	-					
11	DKI Jakarta	44,00	0,00	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	44,00	0,00	-					
12	Jawa Barat	20.212,85	17,27	-	0	0	-	-	116	12	-	-	-	20.328,85	29,27	-					
13	Jawa Tengah	19.064,95	2,30	-	0	0	1,38	-	7	1	-	-	-	19.073,03	3,30	-					
14	D.I. Yogyakarta	276,28	0,00	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	276,28	0,00	-					
15	Jawa Timur	19.394,80	43,56	-	0	0	-	-	83	28	-	-	-	19.477,80	71,56	-					
16	Banten	46,91	0,00	-	0	0	-	-	119	174	-	-	-	165,91	174,00	-					
17	Bali	1.610,00	208,97	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1.610,00	208,97	-					
18	Nusa Tenggara Barat	4.806,47	856,16	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	4.806,47	856,16	-					
19	Nusa Tenggara Timur	5.707,25	13,30	-	0	0	-	-	1.033	25	-	-	-	6.790,25	38,30	-					
20	Kalimantan Barat	10.562,80	8.888,39	-	32,42	0	-	-	941	275	847	122	-	12.387,93	9.265,49	-					
21	Kalimantan Tengah	5.024,20	3.755,67	-	470,5	0	-	-	1.892	1.564	1.516	895	-	8.903,03	6.214,31	-					
22	Kalimantan Selatan	11.731,88	3.455,67	-	181,13	0	31,91	2,52	-	2.086	935	17	14.031,20	4.393,01	17						
23	Kalimantan Timur	9.764,16	11.282,94	-	212,3	0	-	-	421	67	300	111	35	10.697,17	11.460,97	35					
24	Kalimantan Utara	2.869,43	7.773,10	-	6,58	0	-	-	196	184	-	-	-	1.074,66	252,47	-					
25	Sulawesi Utara	2.869,43	7.773,10	-	0	0	-	-	53	46	-	-	-	2.929,01	7.819,10	-					
26	Sulawesi Tengah	11.974,26	6.614,62	-	0	0	-	-	2.543	-	-	-	-	14.517,26	6.614,62	-					
27	Sulawesi Selatan	776,14	1.653,77	-	0	0	-	-	735	88	-	-	-	1.511,14	1.741,77	-					
28	Sulawesi Tenggara	6.007,45	4.228,80	-	0	0	-	-	330	-	135	-	-	6.472,82	4.228,80	-					
29	Gorontalo	6.153,60	1.018,40	-	144,06	0	-	-	-	-	-	-	-	6.297,66	1.018,40	-					
30	Sulawesi Barat	1.019,09	1.331,93	-	0	0	-	-	124	12	-	-	-	1.143,09	1.343,93	-					
31	Maluku	7.913,28	4.000,41	-	0	0	-	-	66	-	58	-	-	8.037,28	4.000,41	-					
32	Maluku Utara	523,33	2.163,58	-	0	0	-	-	184	-	156	-	-	863,11	2.163,58	-					
33	Papua Barat	1.740,55	3.223,66	-	0	0	-	-	547	263	-	-	-	2.287,55	3.486,66	-					
34	Papua	12.106,59	11.890,80	-	0	0	-	-	1.788	323	294	-	-	14.188,64	12.213,80	-					
JUMLAH		202.144,49	82.108,16	0,00	1.354,55	0,00	1.265,94	2,52	55.726	4.180	9.522	3.431	51	230.014	89.721	51					

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan
Keterangan:
(-) tidak ada data

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

TABEL III.3. PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS 2022

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018			S/D TAHUN 2019			S/D DESEMBER 2020			S/D Desember 2021			TAHUN 2022		
		BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	
1	2	3	4	5	6	6.133,85	95	6.133,85	95	6.133,85	96	6.140,88	10	11	12	
1	Aceh	95	6.133,85	95	6.133,85	95	6.133,85	95	6.133,85	96	6.140,88	1	1	7,03	7,03	
2	Sumatera Utara	120	14.427,41	133	15.432,35	135	19.916,51	136	19.916,51	136	19.920,76	1	1	4,25	-	
3	Sumatera Barat	179	6.478,15	181	6.526,90	181	6.526,90	181	6.526,90	181	6.526,90	-	-	-	-	
4	Riau	130	12.122,49	130	12.122,49	130	12.122,49	130	12.122,49	130	12.122,49	-	-	-	-	
5	Jambi	97	26.659,62	99	26.655,03	100	26.721,57	110	26.721,57	110	26.839,76	10	10	118,19	118,19	
6	Sumatera Selatan	200	7.806,86	209	8.387,76	209	8.387,76	210	8.387,76	210	8.461,88	210	210	74,12	74,12	
7	Bengkulu	120	2.467,04	121	2.472,83	121	2.472,83	121	2.472,83	121	2.472,83	-	-	-	-	
8	Lampung	80	4.166,59	80	4.166,59	80	4.166,59	81	4.166,59	81	5.277,86	81	81	1.111,27	1.111,27	
9	Kep. Bangka Belitung	62	725,36	62	725,36	91	874,26	116	874,26	116	80.088,55	116	116	25	79.214,29	
10	Kepulauan Riau	9	760,10	9	760,10	9	760,10	11	760,10	11	7.503,13	11	11	2	6.743,03	
11	DKI Jakarta	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jawa Barat	143	1.023,09	146	1.032,49	150	1.250,99	150	1.250,99	150	1.250,99	-	-	-	-	
13	Jawa Tengah	61	104,70	63	121,66	67	126,33	67	126,33	67	126,33	-	-	-	-	
14	D.I. Yogyakarta	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur	42	736,94	43	743,59	45	764,49	45	764,49	45	764,49	-	-	-	-	
16	Banten	-	-	-	-	1	4,24	1	4,24	1	4,24	-	-	-	-	
17	Bali	40	1.625,80	40	1.625,80	40	1.625,80	40	1.625,80	40	1.625,80	-	-	-	-	
18	Nusa Tenggara Barat	100	5.365,80	101	5.377,75	102	5.390,44	102	5.390,44	102	5.390,44	-	-	-	-	
19	Nusa Tenggara Timur	136	7.833,56	140	7.905,23	140	7.905,23	140	7.905,23	140	7.905,23	-	-	-	-	
20	Kalimantan Barat	297	16.010,96	307	16.201,31	309	16.581,65	310	16.603,85	310	16.603,85	1	1	22,20	22,20	
21	Kalimantan Tengah	95	7.917,06	111	8.668,05	115	9.714,59	118	9.732,58	118	9.732,58	3	3	17,99	17,99	
22	Kalimantan Selatan	89	4.878,16	96	5.073,71	103	5.290,11	112	5.467,35	112	5.467,35	9	9	177,24	177,24	
23	Kalimantan Timur	318	19.537,65	332	19.997,25	344	20.382,32	364	21.187,29	364	21.187,29	20	20	824,97	824,97	
24	Kalimantan Utara	6	357,35	17	964,94	17	964,94	22	964,94	22	1.219,56	22	22	5	254,62	
25	Sulawesi Utara	81	7.132,92	82	7.143,97	89	7.177,90	93	7.192,09	93	7.192,09	4	4	14,20	14,20	
26	Sulawesi Tengah	272	15.586,33	279	15.696,85	281	15.796,18	287	15.895,94	287	15.895,94	6	6	99,76	99,76	
27	Sulawesi Selatan	142	10.490,31	142	10.490,31	142	10.490,31	146	13.635,46	146	13.635,46	4	4	3.145,16	3.145,16	
28	Sulawesi Tenggara	130	11.643,73	130	11.643,73	130	11.643,73	130	11.643,73	130	11.643,73	-	-	-	-	
29	Gorontalo	59	1.720,18	59	1.720,18	62	1.853,66	62	1.853,66	62	1.853,66	-	-	-	-	
30	Sulawesi Barat	12	1.406,64	12	1.406,64	12	1.406,64	12	1.406,64	12	1.406,64	-	-	-	-	
31	Maluku	220	10.247,86	220	10.247,86	220	10.247,86	220	10.247,86	220	10.247,86	-	-	-	-	
32	Maluku Utara	108	2.537,08	111	2.634,18	111	2.634,18	111	2.634,18	111	2.634,18	-	-	-	-	
33	Papua Barat	192	16.262,25	192	16.262,25	192	16.262,25	192	16.262,25	192	16.262,25	-	-	-	-	
34	Papua	131	12.033,06	131	12.033,06	131	12.033,06	131	12.033,06	131	12.033,06	-	-	-	-	
	JUMLAH	3.778	236.198,88	3.873	240.374,06	3.954	247.609,73	4.047	339.438,03	4.047	339.438,03	93	93	91.828,30	91.828,30	

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d Desember 2022

Cat: (-) tidak ada data

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

TABEL III.4. PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN S/D DESEMBER 2022

No	Provinsi	S/D TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021				
		UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	14	13	12	11	10	
1	Aceh	15	919.633,15			4	6.564,90											13	1.577.929,23	32	2.504.127,28	
2	Bali	25	137.428,10														9	80.606,40	34	218.034,50		
3	Bangka Belitung	87	541.821,09																		87	541.821,09
4	Banten	21	202.427,38																		21	202.427,38
5	Bengkulu	53	705.347,88	1	-												1	9.304,34	55	714.652,22		
6	DI. Yogyakarta	9	8.860,94																		9	8.860,94
7	DKI Jakarta	4	107.856,20																		4	107.856,20
8	Gorontalo	32	805.288,76														2	6.720,18	34	812.008,94		
9	Jambi	47	1.731.661,52														14	580.941,18	61	2.312.602,69		
10	Jawa Barat	141	952.658,85														4	91,79	3	959,75	148	953.346,39
11	Jawa Tengah	137	787.177,10													3	238,62	1	0,90	141	787.416,62	
12	Jawa Timur	146	971.201,09															7	88.587,70	153	1.059.788,79	
13	Kalimantan Barat	155	6.094.887,62	8	46.066											2	8.752,44	10	284.440,22	22	1.223.087,31	
14	Kalimantan Selatan	42	1.503.777,88													2	5.788,79	5	13.134,53	3	38.153,06	
15	Kalimantan Tengah*	26	3.778.568,46	2	106.508											1	27.868,21	15	2.824.338,90	44	6.737.283,17	
16	Kalimantan Timur	86	7.958.458,09													1	11.773,14	6	576.829,24	12	419.505,29	
17	Kalimantan Utara	18	3.418.089,71													5	149.265,26	13	316.956,53	36	3.884.311,50	
18	Kep. Riau	27	104.105,77																		27	104.105,77
19	Lampung	29	603.237,44															4	282.045,31	33	885.282,75	
20	Maluku	115	2.662.823,09	3	5.969											2	943,61	6	61.002,11	126	2.730.737,84	
21	Maluku Utara	56	1.346.741,83													2	71.633,37	2	15.291,91		60	1.433.667,11
22	Nusa Tenggara Barat	62	1.187.380,98																		62	1.187.380,98
23	Nusa Tenggara Timur	135	1.028.055,58													7	17.075,73	4	3.778,44		146	1.048.909,75
24	Papua	92	#####													10	72.240,54	5	287.902,52	4	1.683.200,11	
25	Papua Barat	39	8.121.898,63																1	27.099,36	40	8.148.997,99
26	Riau	47	2.053.585,97		5	63.416,35										3	60.215,34	11	51.577,56	66	2.228.795,22	
27	Sulawesi Barat	19	1.061.994,40																2	14.859,10	21	1.076.853,50
28	Sulawesi Selatan	68	2.035.298,50																1	141,66	69	2.035.440,16
29	Sulawesi Tengah	62	2.563.697,35													1	7.289,60				63	2.570.986,95
30	Sulawesi Tenggara	46	3.263.657,61																		46	3.263.657,61
31	Sulawesi Utara	60	381.359,44															1	26.989,60	61	408.349,04	
32	Sumatera Barat	51	1.413.888,94															3	190.793,26	54	1.604.652,20	
33	Sumatera Selatan	51	2.982.021,41															17	367.754,62	68	3.349.776,03	
34	Sumatera Utara	41	1.725.266,43													7	33.441,96	13	133.054,64	61	1.891.763,03	
	JUMLAH	2.047	5.444.415,58	19	158.548	23	103.431,21	40	337.482,88	44	1.277.080,42	191	10.005.258,11	44	1.2342	99.659.211,48						

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan

Keterangan:

- Apabila tercapai ketidak sesuaian luas dan jumlah SK yang tercantum dalam matrik, maka perbaikan/koreksi mengacu pada fisik luas yang tercantum dalam SK.
- Perubahan data disebabkan terdapat perbaikan database penetapan kawasan hutan
- * SK tahun 2018, provinsi kalimantan tengah sebanyak 2 unit selus 209.079,75 dicabut (SK HPT Kapus dan SK TN Tanjung Puting, addendum dgn SK tahun 2022)

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

TABEL III.5. PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA S/D DESEMBER 2022

NO	PROVINSI	TAHUN 2018 (Km)	TAHUN 2019 (Km)	TAHUN 2020 (Km)	TAHUN 2021 (Km)	TAHUN 2022 (Km)	S/D Tahun 2022 (Km)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	-	-	-	-	-	2.474,12
2	Sumatera Utara	-	53,54	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	174,08	-	-	-	2.080,32
4	Riau	-	-	-	-	-	1.872,82
5	Jambi	-	-	-	-	-	7.648,64
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	3.161,87
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	2.554,95
8	Lampung	-	-	-	-	-	356,98
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	52,35
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	457,78
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	10.072,79
21	Kalimantan Timur	-	213,48	-	-	-	15.339,24
22	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	115,13
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	2.660,65
24	Kalimantan Tengah	-	1.087,00	157,21	-	-	16.040,59
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	1.613,78
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	3.852,04
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	1.188,61
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	920,05
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	7.275,38
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	246,47
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	11.618,10
34	Papua	-	-	-	-	-	248,61
	Jumlah	3,00	1.532,10	157,21	-	-	92.051,27

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2022

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

TABEL III.6. PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HT S/D DESEMBER 2022

NO	PROVINSI	Tahun 2018		Tahun 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		S/D DESEMBER 2022
		(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	
1	2	3	4	5	6	7	8	-	-	-	-	1.066,00
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.035,92
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.189,16
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.360,04
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.369,04
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.190,60
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,47
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	426,34	-	32,91	-	-	-	-	-	-	2.557,74
21	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.411,49
22	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	207,87	-	-	-	-	-	-	-	904,68
24	Kalimantan Tengah	-	-	609,99	-	89,25	-	-	-	-	-	1.684,51
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,71
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	1.244,20	-	122,16	-	-	-	-	-	21.320,37

Keterangan: (-) data tidak ada

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2022

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

TABEL III.7. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA)

No	Kriteria	Luas Peta Indikatif PPTPKH	Target 2015-2024	2019				2020				2021				2022				Persetujuan PB PPTKH Periode 1 (184 Kab) dan 2 (21 Kab) PB	Total 2015-2024 (5.677.891,91 Ha +11+12+13)	Persen Capaihan
				2015	2016	2017	2018	RTRW*	Add IUPHHK	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan Trans	RTRW Sulawesi Tengah	Perubahan Batas (APL)	SK Peloposan dan Batas KH Reguler	Perubahan Batas (APL)	Add IUPHK	Pengesahan Trans	Batas KH Reguler	Perubahan Batas (APL)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	25	27
1	Alokasi TORA dan 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	480.299	430.000	0	341.731	33.392	54.235	0	0	0								0	0	0	429.358	100%
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berulang tidak produktif	1.128.266	1.590.000	0	0	0	938.878	0	0					696			0			0	938.878	59%
3	Program bantuan untuk pencadangan pencelakan sawah baru	60.506	39.000	0	0	0	39.229	0	0	0							0			0	39.229	101%
	Jumlah non eksisting	1.668.981	2.059.000	0	341.731	33.392	1.032.342	0	0				696								1.407.485	68%
4	Eksisting (inver)	Perumitian Transmigrasi bersama fasos/tsumiaya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	490.659	490.000	0	41.367	9.342	213.870	0	0		2.772									268.894	55%
5	Permukiman fasos dan Basum	660.373	640.000	0	0																1.543	
6	Lahan garapan berupa sawah dan tanah rakyat	2.176.534	360.000	0	307.516	0			- 266.061	34.134	19.778	70.184	21.558	37.755								
7	Perluhan lahan kering yang menjadi sumber mata pencakaran utama masyarakat setempat	590.000	0	0																		
	Jumlah eksisting	3.327.566	2.080.000	0	348.883	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	27.722	21.558	37.755		35.077	66.266	16.895	31.679	196.821	1.133.723	71%
	TARGET IKU	4.986.547	4.139.000	0	10%	40%											184.400				94.756	
	REALISASI (APL) PERTAHUN		0	680.614	42.734	268.105											349.973	72.956			99.487,7	
	REALISASI (APL) AKUMULASI		0	680.614	733.348	1.001.453											1.351.426	1.424.382			1.618.955	
	PROGRES (APL/KH) AKUMULASI		0	680.614	733.348	1.979.560											2.329.533	2.402.689			2.497.574	
	Persemaian Progres		0%	17%	18%	48%											56%				60%	
																					68%	68%

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatausahaan KH, Data sid Desember 2022



STATISTIK
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2022

PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

1) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produkdi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	S/D TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	180.00	-	-	-	-	-	180.00
3	Sumatera Barat	29.486,00	-	-	-	-	-	29.486,00
4	Riau	133.238,00	-	-	-	-	-	133.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	10,26	10,26
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bangkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	15.269,75	-	-	-	-	-	15.269,75
21	Kalimantan Tengah	84.948,00	12.224,00	34.645,00	97.830,98	103.255,00	332.902,98	332.902,98
22	Kalimantan Timur	53.760,00	-	-	-	-	-	53.760,00
23	Kalimantan Selatan	38.630,00	-	11.656,00	-	3.885	-	54.151,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	17.555,00	-	-	-	-	-	17.555,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	1.905,00	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	2.860,00	-	-	-	-	-	2.860,00
33	Papua	324.681,00	-	-	-	-	-	324.681,00
34	Papua Barat	4.076,00	-	-	-	-	-	4.076,00
	JUMLAH	704.693,75	-	25.785,00	34.645,00	101.695,98	117.165,26	983.974,99

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapanan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kediatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

2) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) MENJADI Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	S/D TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	21.750,00	-	-	-	-	-	21.750,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	79,75	-	-	-	-	-	79,75
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	49.400,00	-	-	-	-	-	49.400,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	143
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	6.572,00	-	-	-	-	-	6.572,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		77.801,75	-	-	-	-	143,00	77.944,75

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
 - : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
3) Perkembangan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	SD TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	SD TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.688,65	60,94	-	-	-	-	5.749,59
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	28.238,00	-	-	-	-	-	28.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	27.625,50	-	-	-	-	-	27.625,50
7	Bengkulu	-	-	87,00	-	-	-	87,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	14.295,75	4.382,00	-	-	-	-	18.677,75
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	6,50	-	-	-	-	-	6,50
15	D.I. Yogyakarta	283,58	-	-	-	-	-	283,58
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	71.645,64	-	-	-	-	-	71.645,64
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	300.040,00	-	-	-	-	-	300.040,00
22	Kalimantan Timur	61.850,00	-	-	-	-	-	61.850,00
23	Kalimantan Selatan	7.563,60	-	1.239,00	-	-	-	8.802,60
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	27.274,63	-	-	-	-	-	27.274,63
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	15.381,90	-	263,00	-	-	-	15.644,90
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	15,00	-	-	-	-	-	15,00
34	Papua Barat	-	-	1.396,00	-	-	-	1.396,00
JUMLAH		559.908,75	4.442,94	2.985,00	214,12	31.200,15	31.200,15	598.750,96

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
 - : Nihil/Tidak ada kejadian

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
4) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-
7	Bangkulu	490,00	-	-	-	-	490,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	4.158,00	-	-	-	-	4.158,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	28.339,89	-	-	-	-	28.339,89
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	171,00	-	-	171,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	575,00	-	575,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		32.987,89	-	746,00	-	75,35	33.809,24

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapanan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kediatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

5) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonservasi (HPK)

NO	PROVINSI	SD TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		SD TAHUN 2022 (ha)
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	169,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,95
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00
23	Kalimantan Selatan	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		659,95		-		-		-		-		-		659,95

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapanan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
6) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	SID TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	3.738,00	-	-	-	-	-	3.738,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	285,55	-	-	-	-	285,55	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tengara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH								4.023,55
								4.023,55

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
7) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	S/D TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	9.477,00	-	-	-	-	-	9.477,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	341,55	-	-	-	-	341,55	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		9.818,55					9.818,55

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
8) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	SID TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	386,50	-	-	-	-	-	386,50
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	40,84	-	-	40,84
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	103,00	-	-	404,00	-	-	507,00
34	Papua Barat	271,00	-	-	-	-	-	468,00
	JUMLAH	760,50	-	-	444,84	197,00	-	1.402,34

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

9) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi H

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	SID TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	12.150,00	-	-	-	-	12.150,00	-
4	Riau	49.700,00	-	-	-	-	49.700,00	-
5	Kepulauan Riau	3.902,00	-	-	-	-	3.952,00	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	2.988,00	-	2.988,00	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	1.820,00	-	1.820,00	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	18.445,00	-	-	-	-	18.445,00	-
30	Sulawesi Barat	9.125,00	-	-	-	-	9.125,00	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.856,00	-	-	-	-	2.856,00	-
JUMLAH		97.993,00	-	-	3.038,00	-	101.036,00	-

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
 - : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

10) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	S/D TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	5.920,00	-	-	-	-	-	5.920,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	61.747,00	-	-	-	-	-	61.747,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	3.221,00	-	-	-	-	-	3.221,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	70.888,00	-	-	-	-	-	70.888,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2021

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

11) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	S/D TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	800,00	-	-	3.711,00	-	-	4.511,00
3	Sumatera Barat	9.840,00	-	-	-	-	-	9.840,00
4	Riau	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	9,20	-	-	9,20
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	29.924,85	-	-	-	-	-	29.924,85
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	76.793,00	-	-	-	-	-	76.793,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	41.358,70	-	-	41.358,70
23	Kalimantan Selatan	14.033,57	-	-	-	-	-	14.033,57
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	405,00	-	405,00
25	Corontallo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	64,00	-	-	-	-	-	64,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.915,00	-	-	-	-	-	3.915,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.436,00	-	-	-	-	-	2.436,00
JUMLAH		143.806,42	-	-	45.078,90	-	405,00	189.290,32

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
 - : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
12) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		S/D TAHUN 2022 (ha)
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	59.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.120,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		60.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.320,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
13) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	S/D TAHUN 2022
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	11.595,00	-	-	-	-	11.595,00	-
23	Kalimantan Selatan	66.000,00	-	-	-	-	66.000,00	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		77.595,00	-	-	-	-	77.595,00	-

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
(14) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	S/D TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	43.100,00	-	-	-	-	-	43.100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	3.242,00	-	-	-	-	-	3.242,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	25.560,00	-	-	-	-	-	25.560,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	24.804,80	-	-	-	-	-	24.804,80
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	617,00	-	-	-	-	-	617,00
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	352,62	-	-	-	-	-	352,62
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	600.250,00	-	-	-	-	-	600.250,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	11.759,00	-	-	-	-	-	11.759,00
28	Sulawesi Selatan	10.355,00	-	-	-	-	-	10.355,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.075,00	-	-	-	-	-	6.075,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		726.115,42	-	-	-	-	-	726.115,42

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
 - : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
 15) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	SID TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	3.528,00	-	-	3.528,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	14.780,00	-	-	-	-	14.780,00	-
5	Kepulauan Riau	12.950,00	-	-	-	-	12.950,00	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	133.075,00	-	-	-	-	133.075,00	-
22	Kalimantan Timur	31.685,00	-	-	-	-	31.685,00	-
23	Kalimantan Selatan	5.900,00	-	-	-	-	5.900,00	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		198.390,00	-	-	-	3.528,00	-	201.918,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
 - : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
16) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	S/D TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	213.221,00	-	-	-	-	-	213.221,00
3	Sumatera Barat	11.148,00	-	-	-	-	-	11.148,00
4	Riau	194.440,00	-	-	-	-	-	194.440,00
5	Kepulauan Riau	342.82	-	-	-	-	-	342.82
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.710,00	-	-	-	-	-	2.710,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	20.160,00	-	-	-	-	-	20.160,00
22	Kalimantan Timur	77.010,00	-	-	-	-	-	77.010,00
23	Kalimantan Selatan	31.790,00	-	-	-	-	-	31.790,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		550.821,82	-	-	-	-	-	550.821,82

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
 - : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
17) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produkasi yang Dapat Dikonversi (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	S/D TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	14.747,00	-	-	9.571,00	-	-	24.318,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	13.388,00	-	-	-	-	-	13.388,00
5	Kepulauan Riau	-	-	144,00	361,80	-	-	505,80
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	46,48	-	46,48
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	1.218,43	-	-	-	-	-	1.218,43
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	234,50	-	-	-	-	-	234,50
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.200,00	-	-	-	-	-	3.200,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	1.030,00	-	-	-	-	-	1.030,00
JUMLAH		33.817,93	-	-	144,00	9.979,28	-	43.941,21

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
18) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	SD TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		SD TAHUN 2022	
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	6.163,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.163,75
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	137.376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.376,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	20.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.700,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	41.025,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.025,56
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649,00
21	Kalimantan Tengah	649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.208,00
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,00
28	Sulawesi Selatan	145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	7.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.650,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		213.902,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.208,00
													220.110,31

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kediatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

19) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produkpsi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	SD TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	S/D TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	20.290,00	-	-	-	-	20.290,00	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	55,00	-	-	-	-	55,00	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.958,00	-	-	-	-	2.958,00	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	48.021,12	-	-	-	-	48.021,12	-
21	Kalimantan Tengah	53.125,00	-	-	-	-	53.125,00	-
22	Kalimantan Timur	59.285,00	-	-	-	-	59.285,00	-
23	Kalimantan Selatan	56.007,21	-	-	-	-	56.007,21	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	959,71	301,00	-	-	-	1.260,71	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	1.962,75	-	-	-	-	5.995,75	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.549,76	-	-	5.435,00	-	11.984,76	-
33	Papua	44.599,00	-	-	-	-	44.599,00	-
34	Papua Barat	1.137,00	-	-	37,00	-	1.174,00	-
	JUMLAH	294.949,55	301,00	-	5.472,00	4.033,00	304.755,55	-

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapanan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
20) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	SID TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	2.725,00	-	-	-	-	-	2.725,00
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	170,40	-	-	-	-	-	170,40
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	6.351,22	-	-	-	-	-	6.351,22
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	583,00	-	-	-	-	-	583,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	60,00	-	-	-	60,00
10	Lampung	-	102,00	-	-	-	-	102,00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	5.170,00	-	-	-	-	-	5.170,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	11,66
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	1.959,30	-	-	-	-	-	1.959,30
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3.155,00	-	-	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	8.750,00	-	-	-	-	-	8.750,00
22	Kalimantan Timur	2.460,00	-	-	-	-	-	2.460,00
23	Kalimantan Selatan	11.926,54	-	-	-	-	-	11.926,54
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	295,40	-	-	-	-	-	295,40
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	83.185,00	-	-	-	-	-	83.185,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		126.730,86	102,00	-	-	-	2.054,66	128.887,52

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :
 - : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI
21) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2017 (ha)	TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	SID TAHUN 2022 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	70.755,00	-	-	-	-	-	70.755,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	40.390,00	-	-	-	-	-	40.390,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	Dki Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Java Barat	32.685,70	-	-	-	-	-	32.685,70
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Java Tengah	11.075,56	-	-	-	-	-	11.075,56
15	D.I. Yogyakarta	1.000,66	-	-	-	-	-	1.000,66
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3.155,00	-	-	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	3.923,00	-	-	3.923,00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	6.514,95	-	-	-	-	6.514,95
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	10.659,00	-	-	-	-	-	10.659,00
28	Sulawesi Selatan	22.063,10	-	-	-	-	-	22.063,10
29	Sulawesi Tenggara	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Meluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Melukut Utara	153.575,00	-	-	-	-	-	153.575,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		349.359,02	6.514,95	3.923,00	3.923,00	-	-	359.796,97

Sumber : Direktorat Pengelolaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

**IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN
KAWASAN HUTAN**

TABEL IV.2. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)		
1	Aceh	2	12	39376,65	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	Sumatera Utara		12	28.054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39.376,65		
3	Sumatera Barat		11	18.334,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.054,00		
4	Riau		12	68.812,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18.334,60		
5	Jambi		14	78.412,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	68.812,98		
6	Sumatera Selatan		33	122.140,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	78.412,53		
7	Bengkulu		5	14.327,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	122.140,80		
8	Lampung		16	134.147,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.327,45		
9	Kep. Bangka Belitung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	134.147,20		
10	Kepulauan Riau		2	7.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	DKI Jakarta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.530,00		
12	Jawa Barat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jawa Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	D.I. Yogyakarta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Banten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Nusa Tenggara Barat		2	2.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	2.950,00		
19	Nusa Tenggara Timur		2	1.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.137,00		
20	Kalimantan Barat		17	28.804,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	28.804,72		
21	Kalimantan Tengah		34	71.387,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	72.582,72		
22	Kalimantan Selatan		9	31.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31.916,00		
23	Kalimantan Timur		7	36.600,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36.600,08		
24	Kalimantan Utara		2	3.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.291,00		
25	Sulawesi Utara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Sulawesi Tengah		18	21.558,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	21.558,15		
27	Sulawesi Selatan		6	4.015,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.015,35		
28	Sulawesi Tenggara		21	37.035,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	37.035,71		
29	Gorontalo		4	5.661,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.661,30		
30	Sulawesi Barat		3	3.730,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.730,78		
31	Meluku		3	5.664,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.664,58		
32	Meluku Utara		12	20.711,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	22.288,91		
33	Papua		17	92.532,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	92.532,46		
34	Papua Barat		8	16.397,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16.397,74		
JUMLAH		282	894.530,25	-	0,00	3	2.772,46	-	0,00	0,00	0,00	285	0,00	285	0,00	897.302,71			

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan 2022, Data s/d Desember 2022

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

TABEL IV.3. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON KEHUTANAN LAINNYA
(TAHAP SK PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Aceh	58	265.743,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	265.743,70
2	Sumatera Utara	28	143.194,23	1	386,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	143.580,95
3	Sumatera Barat	28	169.756,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	169.756,14
4	Riau	142	1.571.175,20	-	8	17.253,65	2	1.906,08	-	-	-	-	-	-	-	152	1.590.334,93
5	Jambi	43	349.236,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	349.236,98
6	Sumatera Selatan	48	365.801,97	1	65,18	2	1.570,97	-	-	-	-	-	-	-	-	51	367.438,12
7	Bengkulu	11	57.581,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	57.581,25
8	Lampung	7	59.059,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	59.059,45
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
10	Kepulauan Riau	9	65.027,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	65.027,87
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	3	846,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	846,86
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
20	Kalimantan Barat	26	278.699,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	278.699,27
21	Kalimantan Tengah	143	1.150.516,73	6	16.948,48	6	20.050,77	9	29.328,14	7	73.737,23	9	30.865,39	1	639,39	180	1.321.446,74
22	Kalimantan Selatan	20	222.891,02	2	2.716,88	-	-	-	-	-	1	3.080,95	1	639,39	24	229.328,24	
23	Kalimantan Timur	49	417.594,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.438,72	50	419.033,28
24	Kalimantan Utara	9	93453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	103.080,05
25	Sulawesi Utara	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00
26	Sulawesi Tengah	9	78.532,90	1	9.964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	88.496,90
27	Sulawesi Selatan	5	5.452,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.452,64
28	Sulawesi Tenggara	4	24.787,65	2	17.820,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	42.608,05
29	Gorontalo	6	62.829,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	62.829,68
30	Sulawesi Barat	10	103.776,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	103.776,71
31	Maluku	13	13.044,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13.044,07
32	Maluku Utara	11	59.949,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	59.949,14
33	Papua	43	1.053.014,47	1	28.817,42	2	21.162,53	-	-	-	-	-	-	-	-	46	1.102.994,42
34	Papua Barat	25	445.650,60	-	2	15.238,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	460.888,86
JUMLAH		751	7.060.515,62	14*	76.719,08	20	75.276,18	11	31.234,22	10	86.445,70	11	32.943,50	817	7.363.134,30		

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keeterangan : - : Nihil/Tidak ada kegiatan

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN

KAWASAN HUTAN

TABEL IV.4. PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

NO	PROPINSI	SID TAHUN 2019						TAHUN 2020						SID TAHUN 2020						TAHUN 2021						TAHUN 2022*					
		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar			
		Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)	Unit Luas (ha)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	12	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Sumatera Utara	3	14.328,30	3	13.532,31	-	-	-	-	3	14.328,30	3	13.532,31	-	-	-	-	-	-	-	3	14.328,30	3	13.532,31	-	-	-	-			
3	Sumatera Barat	1	13.414,00	1	13.414,00	-	-	-	-	1	13.414,00	1	13.414,00	-	-	-	-	-	-	-	1	13.414,00	1	13.414,00	-	-	-	-			
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Jambi	1	4.200,00	1	1.800,00	-	-	-	-	1	4.200,00	1	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	1	4.200,00	1	1.800,00	-	-	-	-			
6	Sumatera Selatan	1	1.426,00	1	1.005,66	-	-	-	-	1	1.426,00	1	1.005,66	-	-	-	-	-	-	-	1	1.426,00	1	1.005,66	-	-	-	-			
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Lampung	3	2.837,34	2	1.338,00	-	-	-	-	3	2.837,34	2	1.338,00	-	-	-	-	-	-	-	3	2.837,34	2	1.338,00	-	-	-	-			
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Kepulauan Riau	1	850,50	1	119,60	-	-	-	-	1	850,50	1	119,60	-	-	-	-	-	-	-	1	850,50	1	119,60	-	-	-	-			
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Jawa Barat	14	5.388,48	14	1.200,74	-	-	-	-	14	5.388,48	14	1.200,74	-	-	-	-	-	-	-	14	5.388,48	14	1.200,74	-	-	-	-			
13	Jawa Tengah	9	544,02	8	288,99	-	-	-	-	9	544,02	8	288,99	1	851	1	906	-	-	-	10	552,53	9	298,05	-	-	-	-			
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Jawa Timur	34	1.963,47	33	1.283,34	-	-	-	-	34	1.963,47	33	1.283,34	-	-	-	-	-	-	-	34	1.963,47	33	1.283,34	-	-	-	-			
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Bali	16	187,14	16	138,14	-	-	-	-	16	187,14	16	138,14	-	-	-	-	-	-	-	16	187,14	16	138,14	-	-	-	-			
18	N T B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	N T T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Kalimantan Tengah	1	8.670,00	1	8.585,65	2	29.162,00	2	25.384,78	3	37.832,00	3	33.970,43	6	73.835,00	6	71.974,29	-	-	9	111.667,00	9	105.944,72	-	-	-	-				
22	Kalimantan Selatan	3	19.396,00	3	18.287,30	-	-	-	-	3	19.396,00	3	18.287,30	-	-	-	-	-	-	3	19.396,00	3	18.287,30	-	-	-	-				
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.914,00	2	9.627,52	-	-	-	-				
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Sulawesi Tenggara	1	1.905,00	1	1.814,40	-	-	-	-	1	1.905,00	1	1.814,40	-	-	-	-	-	-	1	1.905,00	1	1.814,40	-	-	-	-				
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	88	75.110,25	85	62.808,13	2	29.162,00	2	25.384,78	90	104.272,25	87	88.192,91	8	83.757,51	9	81.610,87	0,00	0,00	98	188.029,76	96	169.803,78	-	-	-	-				

Sumber : Direktorat Pengelolaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Desember 2022

Keterangan:

TM : Tanah Masuk / Compensated area for forest

TK : Tanah Keluar / Converted forest area for non forest

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

* : Selama tahun 2022 tidak ada proses TM/KH baru pasca perluas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelegaran Kehutanan



STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2022

PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

**DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DAN KPHL

TABEL V.1. PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN																
					SD/2013	2016	2017	2018													
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	Aceh	1. Rancang Bangun	S.1737/VII-WP3H/2013	31 Desember 2013	6	2.544.205															
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan	SK.292/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022	6 April 2022	6	2.521.333															15.2.487.546
		4. Penetapan																			
2.	Sumatera Utara	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.150/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2023	21 Februari 2023	33	3.202.990															
3.	Sumatera Barat	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2021	6 Agustus 2021	11	1.681.204															
4.	Riau	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.632/VII-WP3H/2010	15 September 2010	38	3.634.974															12.1.521.195
5.	Kepulauan Riau	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019	18 Juli 2019																	3.591.066
6.	Jambi	1. Rancang Bangun	S.257/VII-WP3H/2010	6 Mei 2010	6	259.617															
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.522/96/Seset	21 September 2022	18	1.503.320															6.370.398
7.	Bengkulu	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.77/Menlh-VII/2010	10 Februari 2010	17	1.458.934															
8.	Bangka Belitung	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.440/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021	5 Agustus 2021	7	462.734															7.467.997
9.	Sumatera Selatan	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.797/Menlh-VII/2009	7 Desember 2009	13	641.801															
10.	Lampung	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.248/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2022	21 Maret 2022	24	2.558.407															
11.	Di. Yogyakarta	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.68/Menlh-III/2010	28 Januari 2010	16	518.913															
12.	Bali	1. Rancang Bangun																			
		2. Arahan Pencadangan																			
		3. Usulan Penetapan																			
		4. Penetapan	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018	12 Februari 2018	4	105.766															4.105.400

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN			
					S/D 2013	2016	2017	2018
Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit
13.	Nusa Tenggara Barat	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.337/Menlhk-VII/2009	15 Juni 2009	23	908.834		
					23	903.816		
					889.210			
14.	Nusa Tenggara Timur	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.664/MENLHK/SETJENPLA.0/11/2017	28 November 2017	17	1.240.787		
					17	1.240.787		
					1.240.787			
					22	1.247.962		
15.	Kalimantan Barat	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.968/MENLHK/SETJENPLA.0/9/2022	06 September 2022	38	6.966.136		
					33	6.966.136		
					6.973.613			
					34	6.549.542		
16.	Kalimantan Tengah	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	S.207/VII-WP3/H/2011	11 Februari 2011	31	8.535.128		
					34	8.510.524		
17.	Kalimantan Timur	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	S.208/VII-WP3/H/2011	09 Januari 2012	66	17.021.048		
					33	12.486.355		
					36	12.606.634		
18.	Kalimantan Selatan	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.674/Menlhk-II/2011	01 Desember 2011	34	12.567.139		
					10	1.390.224		
					10	1.315.485		
					10	1.403.761		
19.	Gorontalo	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.363/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2021	1 Juli 2021	10		1.487.085	
20.	Sulawesi Utara	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.65/Menlhk-II/2010	28 Januari 2010	7			
					7	583.290		
					7	581.500		
21.	Sulawesi Tengah	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.395/MENLHK/SETJENPLA.0/7/2021	19 Juli 2021	9	429.988		
					9	-		
					7	974.232		
					7			
22.	Sulawesi Selatan	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.399/MENLHK/SETJENPLA.0/7/2021	19 Juli 2021	24	3.549.606		
					21	3.218.226		
					21	3.199.086		
					6	429.988		
23.	Sulawesi Tenggara	1. Rancang Bangun 2. Arahian Pencadanganan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.371/MENLHK/SETJENPLA.0/9/2020	17 September 2020	22	1.835.163		
					10	2.068.189		
					10	1.814.490		
					16	1.819.100		
					25	1.984.353		
					25	2.012.902		

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN			
					S/D 2013	2016	2017	2018
Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit
24.	Sulawesi Barat	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.799/Menlhut-II/2009	7 Desember 2009	11	862.491		
					11	861.745		
					13	1.099.827		
25	Maluku	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.103/MENLHK/SETJEN/PLA/0/2/2023	6 Februari 2023	18	2.246.425		
					22	2.207.864		
26.	Maluku Utara	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.900/MENLHK/SETJEN/PLA/0/10/2021	8 Oktober 2021	16	1.730.281		
					16	1.768.424		
27	Papua	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.28/MENLHK/SETJEN/OTL.1/1/2020	10 Januari 2020	56	18.180.146		
					56	18.239.288		
					56	18.180.201		
28	Papua Barat	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK.113/MENLHK/SETJEN/PLA/2/2/2022	4 Februari 2022	21	5.388.407		
					21	5.404.745		
					21	5.404.745		
					14	7.140.930		

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. Desember 2022

Ket:

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Java Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki wilayah KPH
Wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Utara masih tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

TABEL V.2. PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN			PENETAPAN			Luas (ha)	Luas Total (ha)
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonservasi	Tahura		
1	2	3	4	SK.992/Menhut-II/2013	27/12/2013	406.273	276.118	9	10	11	12
1	Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Langsa	KPHI Unit III Aceh	SK.332/Menhut-II/2010	25/05/2010	12.681	14.704	131.781	-	-	159.166
2	Sumatera Utara	Mandailing Natal	KPHI Mandailing Natal	SK.993/Menhut-II/2013	27/12/2013	65.038	-	51.189	-	-	116.227
3	Sumatera Utara	Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara	KPHI Unit XXII	SK.866/Menhut-II/2013	05/12/2013	75.762	5.191	6.294	-	-	87.247
4	Sumatera Utara	Toba Samosir	KPHI Tobasamosir	SK.695/Menhut-II/2013	21/11/2013	-	17.721	15.829	-	-	33.550
5	Sumatera Barat	Dharmasraya	KPHI Dharmasraya	SK.696/Menhut-II/2013	21/11/2013	9.091	4.563	46.24	-	-	59.928
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	KPHI Pesisir Selatan	SK.867/Menhut-II/2013	05/12/2013	69.504	16.759	245	-	-	86.508
7	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Lampung Selatan, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Tanah Datar	KPHI Bukit Barisan	SK.44/Menhut-II/2012	02/02/2012	94.883	5.286	17.383	-	-	117.552
8	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	KPHI Lima Puluh Kota (Unit II)	SK.331/Menhut-II/2010	25/05/2010	83.952	40.785	25.755	-	-	150.492
9	Sumatera Barat	Sijunjung	KPHI Sijunjung	SK.42/Menhut-II/2012	02/02/2012	114.061	3.481	12.804	-	-	130.346
10	Sumatera Barat	Solok	KPHI Solok (unit VI)	SK.961/Menhut-II/2013	27/12/2013	69.147	5.660	-	-	-	74.807
11	Sumatera Selatan	Banyuasin	KPHI Banyuasin	SK.689/Menhut-VII/2012	29/11/2012	20.082	134.597	97.588	-	-	252.267
12	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHI Meranti	SK.698/Menhut-VII/2012	29/11/2012	-	89.511	32.074	-	-	121.585
13	Sumatera Selatan	Musi Rawas	KPHI Rawas	SK.827/Menhut-II/2013	19/11/2013	-	256.594	-	-	-	256.594
14	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Lahat	KPHI Unit XIV Benakat Revisi	SK.790/Menhut-II/2009	07/12/2009	-	76.776	-	-	-	76.776
15	Sumatera Selatan	Mus Rawas	KPHI Laktian Unit VII	SK.789/Menhut-II/2009	07/12/2009	-	265.963	-	-	-	265.963
16	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHI Lahan	SK.442/Menhut-II/2012	09/08/2012	9.605	-	8.002	-	-	17.607
17	Kepulauan Riau	Karimun	KPHI Karimun	SK.765/Menhut-II/2012	26/12/2012	-	-	140.562	-	6.172	146.734
18	Riau	Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru	KPHI Minas Taliura	SK.640/Menhut-II/2011	07/11/2011	24.028	-	119.755	-	-	143.783
19	Riau	Kampar	KPHI Kampar Kiri (Unit XVIII)	SK.343/Menhut-II/2011	28/06/2011	412	-	69.335	-	-	69.747
20	Riau	Kepulauan Meranti	KPHI Tebing Tinggi (Unit XXIV)	SK.509/Menhut-II/2010	21/09/2010	-	491.768	2.660	18.848	-	513.276
21	Riau	Pelaihwan, Siak	KPHI Tasik Besar Serkab	SK.962/Menhut-II/2013	27/12/2013	4.769	30.169	-	-	-	34.938
22	Kep. Bangka Belitung	Bangka	KPHI Sigambir-Kotawaringin	SK.329/Menhut-II/2010	25/05/2010	5.185	34.228	-	-	-	39.413
23	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	KPHI Sungai Sembulan	SK.763/Menhut-II/2012	26/12/2012	8.803	50.819	-	-	-	59.622
24	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	KPHI Rambat Menduyung	SK.764/Menhut-II/2012	26/12/2012	12.615	45.620	-	-	-	58.235
25	Kep. Bangka Belitung	Betung Timur	KPHI Gunung Duren	SK.995/Menhut-II/2013	27/12/2013	165	9.546	42.640	-	-	52.351
26	Bengkulu	Bengkulu Utara	KPHI Bengkulu Utara	SK.330/Menhut-II/2010	25/05/2010	-	11.937	66.337	-	-	78.274
27	Bengkulu	Muko-Muko	KPHI Muko-Muko	SK.941/Menhut-II/2013	27/12/2013	16.059	-	-	-	-	16.059
28	Bengkulu	Rejang Lebong	KPHI Bukit Batai Rejang	SK.940/Menhut-II/2013	27/12/2013	-	34.290	-	-	-	34.290
29	Jambi	Kerinci	KPHI Kerinci	SK.431/Menhut-II/2012	02/02/2012	36.088	9.944	30.105	-	-	76.137
30	Jambi	Merangin	KPHI Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai	SK.714/Menhut-II/2011	19/12/2011	54.793	43.807	22.502	-	-	121.102
31	Jambi	Serdanggun	KPHI Limau unit VII	SK.787/Menhut-II/2009	07/12/2009	15.965	-	-	-	-	15.965
32	Jambi	Tanjung Jabung Barat	KPHI Sungai Beram Hitam	SK.438/Menhut-II/2012	09/08/2012	9.944	1.260	-	-	-	11.204
33	Lampung	Pesawaran	KPHI Pesawaran							-	-

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN			PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dilokalisasi	Tahura	Luas Total (ha)
34	Lampung	Way Kanan	KPHP Bukit Punggur	SK.439/Menhub-II/2012	09/08/2012	19.131	21.985	-	-	41.126
35	Lampung	Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus	KPHL Batu Tegi	SK. 650/Menhub-II/2010	22/11/2010	58.162	-	-	-	58.162
36	Lampung	Lampung Selatan	KPHL Rajabasa (Unit XIV)	SK.367/Menhub-II/2011	07/07/2011	5.160	-	-	-	5.160
37	Lampung	Lampung Selatan, Lampung Timur	KPHF Gedong Wanii (Unit XVI)	SK.427/Menhub-II/2011	27/07/2011	-	30.243	-	-	30.243
38	Lampung	Lampung Tengah	KPHF Register 47 Way Terusan	SK.794/Menhub-II/2009	07/12/2009	-	12.500	-	-	12.500
39	Lampung	Mesuji	KPHF Sungai Buaya	SK.936/Menhub-II/2013	27/12/2013	-	44.249	-	-	44.249
40	Lampung	Tanggamus	KPHL Kotaagung Utara (Unit X)	SK.379/Menhub-II/2011	18/07/2011	56.020	-	-	-	56.020
41	Lampung	Tulang Bawang, Way Kanan	KPHF Muara Dua	SK.236/Menhub-II/2011	10/06/2012	-	49.134	-	-	49.134
42	DI Yogyakarta	Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo	KPHF Yogyakarta	SK.721/Menhub-II/2011	20/12/2011	2.313	13.412	-	-	15.725
43	Bali	Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung	KPHL Bali Tengah (Unit II)	SK. 620/Menhub-II/2011	01/11/2011	14.651	-	-	-	14.651
44	Bali	Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung	KPHL Bali Timur (Unit III)	SK. 621/Menhub-II/2011	01/11/2011	21.891	1.087	-	-	22.978
45	Bali	Jembrana, Buleleng, Tabanan	KPHL Bali Barat	SK.784/Menhub-II/2009	07/12/2009	59.848	1.392	1.610	-	63.350
46	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu	KPHF Tambora Utara	SK.970/Menhub-II/2013	27/12/2013	-	14.789	12.151	-	26.920
47	Nusa Tenggara Barat	Bima dan Kota Bima	KPHF Maria Unit XXXII	SK.752/Menhub-II/2012	26/12/2012	8.515	4.554	14.563	-	27.632
48	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHL Ampang	SK.751/Menhub-II/2012	26/12/2012	24.168	8.261	6.252	-	38.681
49	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat, Lombok Utara	KPHL Rinjani Barat	SK.785/Menhub-II/2009	07/12/2009	28.911	5.075	6.977	-	40.963
50	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	KPHL Tastura	SK.963/Menhub-II/2013	27/12/2013	11.153	5.000	-	-	16.153
51	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	KPHL Rinjani Timur	SK.225/Menhub-II/2012	04/05/2012	31.987	5.602	-	-	37.589
52	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHF Batulanteh (Unit X)	SK.342/Menhub-II/2011	28/06/2011	14.303	14.842	3.631	-	32.776
53	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	KPHF Sejorong	SK.971/Menhub-II/2013	27/12/2013	15.762	5.274	19.952	-	40.988
54	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	KPHF Rote Ndao	SK. 333/Menhub-II/2010	25/05/2010	15.509	25.221	-	-	40.730
55	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	KPHL Flores Timur	SK.972/Menhub-II/2013	27/12/2013	39.856	1.793	13.759	-	55.408
56	Nusa Tenggara Timur	Alor	KPHL Alor Pantar	SK.767/Menhub-II/2012	26/12/2012	59.419	22.938	21.977	-	104.334
57	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Utara, Timour Tengah Selatan	KPHF Mulus Timau (Unit XX)	SK.41/Menhub-II/2012	02/02/2012	97.005	-	18.375	-	115.380
58	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	KPHF Manggarai Barat	SK.973/Menhub-II/2013	27/12/2013	27.113	18.613	14.571	-	60.297
59	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	KPHF Kapuas Hulu (Unit XVIII) dan Unit XIX	SK.380/Menhub-II/2011	18/07/2011	224.522	83.241	150.262	-	458.025
60	Kalimantan Barat	Ketapang	KPHF Kendawangan	SK.680/Menhub-II/2012	23/11/2012	16.268	162.383	-	-	178.651
61	Kalimantan Barat	Sintang	KPHF Sungai Merakai	SK. 791/Menhub-II/2009	07/12/2009	10.420	46.473	-	-	56.893
62	Kalimantan Timur	Berau	KPHF Berau Barat	SK. 649/Menhub-II/2010	24/11/2010	247.025	118.261	410.253	-	775.539
63	Kalimantan Utara	Bullungan	KPHF Kayan	SK.223/Menhub-II/2012	04/05/2012	168.198	9.776	309.868	-	487.842
64	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara dan Kotabaru Balikpapan	KPHF Meratus	SK.768/Menhub-II/2012	26/12/2012	-	274.159	113.329	-	387.488
65	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	KPHL Tarakan	SK. 783/Menhub-II/2009	07/12/2009	2.400	-	2.223	-	4.623
66	Kalimantan Utara	Malinau	KPHF Malinau	SK.224/Menhub-II/2012	04/05/2012	220.723	110.518	384.271	-	715.512
67	Kalimantan Timur	Paser	KPHF Kendijo	SK.966/Menhub-II/2013	27/12/2013	44.152	61.051	34.032	-	139.235
68	Kalimantan Selatan	Barjai	KPHF Barjai	SK.793/Menhub-II/2009	07/12/2009	42.090	72.513	25.354	-	139.957
69	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	KPHL Hulu Sungai Selatan	SK.750/Menhub-II/2012	26/12/2012	21.221	11.530	52	-	32.803
70	Kalimantan Selatan	Kota baru	KPHF Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III)	SK.226/Menhub-II/2012	04/05/2012	12.863	99.395	-	-	112.258

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN			PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikoversi	Tahura	Luas Total (ha)
71	Kalimantan Selatan	Tabalong	KPHP Tabalong	SK.997/Men hut-II/2013	27/12/2013	48.776	44.759	23.822	-	- 117.357
72	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	KPHP Tanah Laut	SK.440/Men hut-II/2012	09/08/2012	15.862	71.490	5.289	-	- 92.641
73	Kalimantan Tengah	Berito Selatan	KPHL Gerbang Barito	SK.964/Men hut-II/2013	27/12/2013	90.361	43.345	20.961	-	- 154.667
74	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	KPHP Gunung Mas	SK.974/Men hut-II/2013	27/12/2013	57.337	50.107	187.291	-	- 294.735
75	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	KPHP Kota Waringin Barat	SK.749/Men hut-II/2012	19/12/2011	9.672	257.160	49.303	-	- 316.135
76	Kalimantan Tengah	Lamandau	KPHP Lamandau	SK.717/Men hut-II/2012	26/12/2012	25.432	19.916	180.951	-	- 226.289
77	Kalimantan Tengah	Kapuas	KPHL Kapuas	SK.247/Men hut-II/2011	02/05/2011	105.372	-	-	-	- 105.372
78	Kalimantan Tengah	Murung Raya	KPHP Murung Raya	SK.955/Men hut-II/2013	27/12/2013	103.578	205.729	598.948	-	- 908.255
79	Kalimantan Tengah	Seruyan	KPHP Seruyan (Unit XXI)	SK.716/Men hut-II/2011	19/12/2011	38.970	6.112	328.827	-	- 373.909
80	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Minahassa Selatan	KPHP Poigar	SK.788/Men hut-II/2009	07/12/2009	5.265	19.739	16.594	-	- 41.598
81	Gorontalo	Boalemo	KPHP Bolaemo (Unit V)	SK.402/Men hut-II/2011	21/07/2011	29.383	12.403	55.140	-	- 96.926
82	Gorontalo	Gorontalo	KPHP Gorontalo Utara	SK.976/Men hut-II/2013	27/12/2013	13.126	17.781	40.775	-	- 71.682
83	Gorontalo	Gorontalo Utara	KPHP Gorontalo Utara	SK.768/Men hut-II/2012	26/12/2012	18.632	15.759	71.417	-	- 105.808
84	Gorontalo	Pohuwato	KPHL Unit III Pohuwato	SK.334/Men hut-II/2010	25/05/2010	59.301	13.605	43.369	-	- 116.275
85	Sulawesi Tengah	Banggai, Tojo Una-Una Morowali	KPHP Tolili Batunube	SK.967/Men hut-II/2013	27/12/2013	126.447	55.389	94.800	-	- 276.636
86	Sulawesi Tengah	Donggala, Parigi, Moutong	KPHP Dampelas Timombo	SK.792/Men hut-II/2009	07/12/2009	21.017	10.244	69.651	-	- 100.912
87	Sulawesi Tengah	Banggai	KPHP Balantak	SK.754/Men hut-II/2012	26/12/2012	30.418	28.049	58.936	-	- 117.403
88	Sulawesi Tengah	Buol	KPHP Pogogul	SK.756/Men hut-II/2012	26/12/2012	44.257	54.008	101.268	-	- 199.533
89	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Sigi Donggala dan Kota Palu	KPHP Dolago Tanggungung	SK.755/Men hut-II/2012	26/12/2012	67.794	19.008	57.548	-	- 144.350
90	Sulawesi Tengah	Poso	KPHP Sintuwu Maros/Rano Patani	SK.639/Men hut-II/2011	07/11/2011	46.341	28.740	62.349	-	- 137.430
91	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	KPHP Unit XVII Tojo Una-Una	SK.968/Men hut-II/2013	27/12/2013	39.921	10.827	61.744	-	- 112.492
92	Sulawesi Barat	Manuju, Mamasa	KPHL Ganda Dewata	SK.441/Men hut-II/2012	09/08/2012	157.598	-	-	-	- 157.598
93	Sulawesi Barat	Majene	KPHL Malunda	SK.753/Men hut-II/2012	26/12/2012	45.109	-	6.962	-	- 52.071
94	Sulawesi Barat	Mamasa	KPHL Mamasa Tengah (Unit VII)	SK.340/Men hut-II/2011	27/06/2011	33.218	-	4.744	-	- 37.962
95	Sulawesi Barat	Mamasa	KPHP Mamasa Barat (Unit VII)	SK.341/Men hut-II/2011	27/06/2011	17.352	-	36.203	-	- 53.555
96	Sulawesi Barat	Manuju Utara	KPHL Unit II Lariang	SK.60/Men hut-II/2011	28/02/2011	34.512	2.394	21.010	-	- 57.916
97	Sulawesi Barat	Manuju, Mamuju Tengah	KPHP Budong-Budong	SK.938/Men hut-II/2013	27/12/2013	5.463	36.461	86.172	-	- 128.096
98	Sulawesi Barat	Polewai Mandar	KPHL Mapili	SK.651/Men hut-II/2010	22/11/2010	53.485	-	23.711	-	- 77.196
99	Sulawesi Tenggara	Bombana	KPHP Tira Orima bombana	SK.426/Men hut-II/2011	27/07/2011	23.669	74.514	17.963	-	- 116.126
100	Sulawesi Tenggara	Biton	KPHP Unit III Lakompa	SK.795/Men hut-II/2009	07/12/2009	12.432	11.880	6.288	-	- 30.600
101	Sulawesi Tenggara	Biton Utara	KPHL Peropa Ea Gantara	SK.975/Men hut-II/2013	27/12/2013	15.157	-	2.571	-	- 17.728
102	Sulawesi Tenggara	Konawe	KPHL Konawe	SK.762/Men hut-II/2012	26/12/2012	96.941	8.018	35.668	-	- 140.627
103	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan, Kota Kendari	KPHP Unit XXIV Gularaya	SK.61/Men hut-II/2011	28/02/2011	41.405	89.343	3.671	-	- 134.419
104	Sulawesi Selatan	Bone, Sijai, Bulukumba, Bantulang, Gowa, Takalar,	KPHP Jeneberang (Unit IX)	SK.715/Men hut-II/2011	19/12/2011	60.451	45.471	54.932	-	- 160.854
105	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	KPHL Larona Malii (Unit I)	SK.722/Men hut-II/2011	20/12/2011	156.593	6.391	79.008	-	- 241.992
106	Sulawesi Selatan	Wajo	KPHP Awota	SK.979/Men hut-II/2013	27/12/2013	5.539	13.532	-	-	- 19.071
107	Maluku Utara	Halmaheira Selatan	KPHP Bacan	SK.969/Men hut-II/2013	27/12/2013	62.836	7.760	70.212	-	- 140.808
108	Maluku Utara	Halmaheira Tengah, Kota Tidore Kepulauan	KPHP Gunung Sinopae	SK.337/Men hut-II/2010	25/05/2010	21.056	9.604	13.917	-	- 44.577

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN			PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonservasi	Tahura	Luas Total (ha)
109	Maluku	Buru	KPHP Wae Apu	SK 770/Menlal-II/2012	26/12/2012	73.478	62.921	96.033	-	- 232.432
110	Maluku	Maluku Tengah	KPHP Wae Sapalewa	SK. 336/Menlal-II/2010	25/05/2010	4.545	34.609	27.903	-	- 67.057
111	Maluku	Buru, Buru Selatan	KPHP Wae Tina	SK.977/Menlal-II/2013	27/12/2013	51.599	86.338	65.847	-	- 204.384
112	Maluku	Seram Bagian Timur	KPHP Wae Bubi	SK.978/Menlal-II/2013	27/12/2013	12.666	11.039	42.739	-	- 66.464
113	Papua Barat	Sorong Sejataan	KPHP Sorong Sejataan	SK.771/Menlal-II/2012	26/12/2012	121.361	73.189	88.710	-	- 283.260
114	Papua Barat	Kota Sorong (temu)	KPHL Kota Sorong (temu)	SK.999/Menlal-II/2013	27/12/2013	6.602	-	6.173	-	- 12.775
115	Papua Barat	Sorong	KPHP Sorong	SK.701/Menlal-II/2010	20/12/2010	11.789	111.444	100.136	-	- 223.369
116	Papua	Biak Numfor	KPHL Biak Numfor	SK. 648/Menlal-II/2010	22/11/2010	120.340	30.527	55.149	-	- 206.016
117	Papua	Keerom	KPHP Keerom Revisi	SK.828/Menlal-II/2013	19/11/2013	49.196	30.330	93.930	-	- 173.456
118	Papua	Sarmi dan Jayapura	KPHP Mamberamo Revisi	SK.829/Menlal-II/2013	19/11/2013	50.492	46.105	159.217	-	- 255.814
119	Papua	Wamena	KPHP Waropen	SK.760/Menlal-II/2012	26/12/2012	83.372	97.691	5.899	-	- 186.962
120	Papua	Kepulauan Yapen	KPHP Yapen	SK. 786/Menlal-II/2009	07/12/2009	15.100	90.767	-	-	- 105.867

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2022

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

TABEL V.3. PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
1	2	3	4	5	6
1	TN BALI BARAT	Bali	SK.780/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	19.002,00
2	TN UJUNG KULON	Banten	SK.775/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	122.956,00
3	TN BERBAK	Jambi	SK.774/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	62.700,00
4	TN GUNUNG HALIMUN SALAK	Jawa Barat	SK.776/Menhut-II/2000	07 Desember 2009	113.357,00
5	TN ALAS PURWO	Jawa Timur	SK.801/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	43.420,00
6	TN MERU BETIRI	Jawa Timur	SK.779/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	58.000,00
7	TN TANJUNG PUTING	Kalimantan Tengah	SK.777/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	415.040,00
8	TN KUTAI	Kalimantan Timur	SK.778/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	198.629,00
9	TN GUNUNG RINJANI	Nusa Tenggara Barat	SK.781/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	41.330,00
10	TN BUNAKEN	Sulawesi Utara	SK.782/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	89.065,00
11	TN BOGANINAN/WARTABONE	Sulawesi Utara dan Gorontalo	SK.716/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	287.115,00
12	TN BUKIT DUA BELAS	Jambi	SK.720/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	60.500,00
13	TN GUNUNG MERAPI	Jawa Tengah	SK.713/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	6.410,00
14	TN BALURAN	Jawa Timur	SK.718/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	25.000,00
15	TN DANAU SENTARUM	Kalimantan Barat	SK.715/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	132.000,00
16	TN GUNUNG PALUNG	Kalimantan Barat	SK.721/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	90.000,00
17	TN WAY KAMBAS	Lampung	SK.712/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	130.000,00
18	TN LAIWANGI WANGGAMETI	Nusa Tenggara Timur	SK.714/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	47.014,00
19	TN MANUPEU TANAH DARU	Nusa Tenggara Timur	SK.719/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	87.984,00
20	TN BANTIMURUNG BULUSARING	Sulawesi Selatan	SK.717/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	43.750,00
21	TN GUNUNG MERBABU	Jawa Tengah	SK.751/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5.725,00
22	TN KARIMUN JAWA	Jawa Tengah	SK.749/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	111.625,00
23	TN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	Kalimantan Barat	SK.750/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	181.000,00
24	TN KAYAN MENTARANG	Kalimantan Utara	SK.752/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	1.360.500,00
25	TN MANUSELA	Maluku	SK.756/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	189.000,00
26	TN AKETAJAWA LOLOBATA	Maluku Utara	SK.757/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	167.300,00
27	TN KELIMUTU	Nusa Tenggara Timur	SK.754/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5.356,50
28	TN KOMODO	Nusa Tenggara Timur	SK.753/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	173.000,00
29	TN RAWA AOPA VATUMOHAI	Sulawesi Tenggara	SK.755/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	105.194,00
30	TN SEMBILANG	Sumatera Selatan	SK.748/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	202.886,31
31	TN GUNUNG CIREMAI	Jawa Barat	SK.790/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	15.500,00
32	TN SEBANGAU	Kalimantan Tengah	SK.791/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	568.700,00
33	TN LORENTZ	Papua	SK.792/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	2.354.644,00
34	TN WASUR	Papua	SK.793/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	413.810,00
35	TN BUKIT TIGAPULUH	Riau	SK.789/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	144.223,00
36	TN TESSO NILO	Riau	SK.788/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	38.576,00
37	TN SIBERUT	Sumatera Barat	SK.787/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	190.500,00

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
38	TN BATANG GADIS	Sumatera Utara	SK.786/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	72.150,00
39	RAWA SINGKIL	Aceh	SK.980/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	102.500
40	NANTU	Gorontalo	SK.980/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	31.215
41	GUNTUR - PAPANDAYAN	Jawa Barat	SK.984/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	15.318
42	GUNUNG MEINTANG	Kalimantan Barat	SK.987/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	25.127
43	TAMBORA	Nusa Tenggara Barat	SK.985/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	78.116
44	RUTENG	Nusa Tenggara Timur	SK.986/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	32.248
45	JAYAWIJAYA	Papua	SK.991/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	800.000
46	KERUMUTAN	Riau	SK.981/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	120.000
47	TOMUTI	Sulawesi Selatan	SK.989/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	185.000
48	ARAU HILIR	Sumatera Barat	SK.982/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	105.375
49	DANGKU BENTAYAN	Sumatera Selatan	SK.983/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	89.574
50	BEDUGUL SANGEH	Bali	SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	3.635
51	KINTAMANI	Bali	SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2.649
52	BUKIT KABA	Bengkulu	SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	15.133
53	CILACAP	Jawa Tengah	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	982
54	PATI BARAT	Jawa Tengah	SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	1.426
55	KUALA LUPAK	Kalimantan Selatan	SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	4.008
56	LAMANDAU	Kalimantan Tengah	SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	61.425
57	PARAWEN	Kalimantan Tengah	SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	5.855
58	ARFAK	Papua Barat	SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	68.325
59	BOLIMALIT MAGHLIT	Papua Barat	SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	9.194
60	GUNUNG MEJA SIDÉI KAIRONI	Papua Barat	SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	968
61	SORONG KLAMONO	Papua Barat	SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2.990
62	WAIGEO	Papua Barat	SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	264.073
63	BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	Riau	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	142.156
64	GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU	Riau	SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	99.958
65	BAKRIANG	Sulawesi Tengah	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	17.479
66	GUNUNG TINOMBALA	Sulawesi Tengah	SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	38.608
67	GUNUNG DAKO	Sulawesi Tengah	SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	21.659
68	MOROWALI	Sulawesi Tengah	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	216.308
69	PAMONA	Sulawesi Tengah	SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	35.125
70	PANGI BINANGGA	Sulawesi Tengah	SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	70.997
71	BARMUNIN	Sumatera Utara	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	02 September 2016	36.261
72	LINGGA ISAQ	Aceh	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	86.634
73	PULAU WEH	Aceh	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6.481
74	ENGANO	Bengkulu	SK.723/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	9.281
75	JAKARTA	Jakarta	SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	242
76	DURIAN LUNCUK	Jambi	SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	111
77	HUTAN BAKAU PANTAI TIMUR	Jambi	SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4.872

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
78	BURANGGRANG TANGKRUBAN PERAHU	Jawa Barat	SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	4.1772
79	SIMFANG TILU	Jawa Barat	SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	23.356
80	DATARAN TINGGI YANG	Jawa Timur	SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	12.865
81	KAWAH IJEN	Jawa Timur	SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	2.575
82	GUNUNG NYIUT	Kalimantan Barat	SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	9.759
83	MUARA KENDAWANGAN	Kalimantan Barat	SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	147.614
84	HARLU	Kalimantan Timur	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	3.681
85	MUARA KAMAN SEDULANG	Kalimantan Timur	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	66.445
86	KEPULAUAN KRAKATAU	Lampung	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	13.365
87	GUNUNG SAHUWAI	Maluku	SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	32.476
88	TALIABU	Maluku	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	13.114
89	GUNUNG TUNAK	Nusa Tenggara Barat	SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	2.225
90	MOYO	Nusa Tenggara Barat	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	30.945
91	GUNUNG MUTIS	Nusa Tenggara Timur	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	12.315
92	CYCLOOPS YOUTEFA	Papua	SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	33.289
93	LAMBUSANGO	Sulawesi Tenggara	SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	28.395
94	PEROPA	Sulawesi Tenggara	SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	44.012
95	TANGKOKO	Sulawesi Utara	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	8.545
96	PADANG SUGIHAN	Sumatera Selatan	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	88.148
97	SICKE CIKE	Sumatera Utara	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	6.144
98	YOGYAKARTA	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.09/2016	20 September 2016	632
99	SANGIANG	Nusa Tenggara Barat	SK.421/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	11.546
100	SEMONGKAT	Nusa Tenggara Barat	SK.418/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	1.783
101	SURANADI	Nusa Tenggara Barat	SK.420/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	448
102	TALIWANG	Nusa Tenggara Barat	SK.419/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	6008.2
103	ALE AISIO	Nusa Tenggara Timur	SK.429/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	9.825.00
104	CAMPLONG	Nusa Tenggara Timur	SK.428/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	1.015
105	KATERI	Nusa Tenggara Timur	SK.427/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	7.905.32
106	NDETA KILIKIMA	Nusa Tenggara Timur	SK.423/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	1.847
107	RIUNG	Nusa Tenggara Timur	SK.426/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	11.829
108	TELUK KUPANG	Nusa Tenggara Timur	SK.431/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	67.628
109	TELUK MAUMERE	Nusa Tenggara Timur	SK.425/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	9.013.00
110	TUTI ADAGAE	Nusa Tenggara Timur	SK.422/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	7.700
111	WAE WUUL	Nusa Tenggara Timur	SK.424/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	1484.84
112	WATU ATA	Nusa Tenggara Timur	SK.430/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	4898.8
113	NABIRE-TANJUNG WIAY	Papua	SK.432/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	7.462
114	DOLOK SURUNGAN	Sumatera Utara	SK.414/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	22241
115	DOLOK TINGGI RAJA	Sumatera Utara	SK.413/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	408.00
116	HOLIDAY RESORT	Sumatera Utara	SK.415/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	2.100
117	KARANG GADING DAN LANGKAT TIMUR LAUT	Sumatera Utara	SK.410/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	13.474
118	SIBOLANGIT	Sumatera Utara	SK.411/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	596
119	SUABA HUTAGINJANG	Sumatera Utara	SK.417/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	46.00

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
120	SIRIYOK	Sumatera Utara	SK.412/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	15.330,00
121	TAMAN BURU PULAU PINI	Sumatera Utara	SK.416/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	8.325,00
122	JHANTOI	Aceh	SK.123/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	19.487,00
123	PULAU BANYAK	Aceh	SK.124/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	205.770,24
124	PANTAI PANJANG	Bengkulu	SK.127/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	1.559,00
125	SEBLAT	Bengkulu	SK.126/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	8.138,75
126	SABILOKARE	Jawa Tengah	SK.130/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	292,00
127	BAUNG-ABANG-TRETES	Jawa Timur	SK.134/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	266,00
128	NUSA BARUNG-WATANGAN-CURAH MANIS	Jawa Timur	SK.131/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	7.655,34
129	PICIS-SIGOGOR-NGLIRIP-MANGGIS-BESOWO	Jawa Timur	SK.135/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	245,00
130	PULAU SAOBI	Jawa Timur	SK.133/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	436,83
131	PULAU SEMPU	Jawa Timur	SK.132/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	977,00
132	KELAM KOMPLEK	Kalimantan Barat	SK.137/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	1.334,00
133	KEPULAUAN KARIMATA	Kalimantan Barat	SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	190.745,00
134	MANDOR-PASI	Kalimantan Barat	SK.138/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	6.064,00
135	TANAH LAUT-GUNUNG KENTAWAN	Kalimantan Selatan	SK.140/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	8.404,17
136	TANJUNG KELUANG	Kalimantan Tengah	SK.139/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	2.478,17
137	KO MARA	Sulawesi Selatan	SK.144/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	10.196,00
138	MARIO	Sulawesi Selatan	SK.143/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	5.334,00
139	BUTTON UTARA	Sulawesi Tenggara	SK.142/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	91.025,00
140	MANGGOLO	Sulawesi Tenggara	SK.141/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	4.567,31
141	LIMA PULUH KOTO	Sumatera Barat	SK.125/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	10.829,00
142	GUMAI PASEMAH	Sumatera Selatan	SK.128/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	46.122,60
143	GUNUNG RAYA	Sumatera Selatan	SK.129/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	05 Maret 2018	44.986,11
144	PEWOBIA	Jawa Tengah	SK.301/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2018	05 Juli 2018	382,00
145	BAWEAN - NOKO NUSA	Jawa Timur	SK.299/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2018	05 Juli 2018	4.561,00
146	PELANGGAN	Nusa Tenggara Barat	SK.302/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2018	05 Juli 2018	2.600,00
147	TN ZAMRUD	Riau	SK.204/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2019	06 Maret 2019	31.480,00
148	TAHURA BUNDER	Yogyakarta	SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019	21 Mei 2019	771,32
149	TAHURA PUCUT MEURAH INTAN	Aceh	SK.293/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022	06 April 2022	6.200,00
TOTAL					12.774.532,40

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2022

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

TABEL V.4. DAFTAR KPH BERLEMBAGA DAN UNIT-UNIT YANG DINAUNGI

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Aceh	1	KPH WILAYAH I	UNIT I	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018
	2	KPH WILAYAH II	UNIT II	
	3	KPH WILAYAH III	UNIT III	
	4	KPH WILAYAH IV	UNIT IV	
	5	KPH WILAYAH V	UNIT V	
	6	KPH WILAYAH VI	UNIT VI	
Bengkulu	1	KPHL Bengkulu Selatan	UNIT V	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
	2	KPHL Bukit Balai Rejang	UNIT VII	
	3	KPHL Bukit Daun	UNIT III	
	4	KPHL Kaur	UNIT VI	
	5	KPHL Seluma	UNIT IV	
	6	KPHP Bengkulu Utara	UNIT II	
	7	KPHP Muko Muko	UNIT I	
Jambi	1	KPHP BATANGHARI	UNIT XI UNIT XII	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 33 Tahun 2017
	2	KPHP Bungo	UNIT II UNIT III	
	3	KPHP HILIR SAROLANGUN	UNIT VIII	
	4	KPHP Kerinci	UNIT I	
	5	KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	UNIT VII	
	6	KPHP Merangin	UNIT IV UNIT V UNIT VI	
	7	KPHP MUARO JAMBI	UNIT XIII	
	8	KPHP TANJUNG JABUNG BARAT	UNIT XV UNIT XVI UNIT XVII	
	9	KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR	UNIT XIV	
	10	KPHP Tebo Barat	UNIT IX	
	11	KPHP Tebo Timur	UNIT X	
Kepulauan Bangka Belitung	1	KPHL Belantu Mendanau	UNIT X	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021
	2	KPHP Bubus Panca	UNIT III	
	3	KPHP Gunung Duren	UNIT XIII	
	4	KPHP Jebu Bembang Antan	UNIT II	
	5	KPHP Muntai Palas	UNIT VIII	
	6	KPHP Rambat Menduyung	UNIT I	
	7	KPHP Sigambi Kotawaringin	UNIT IV	
	8	KPHP Sungai Sembulan	UNIT V	
Kepulauan Riau	1	KPHL Unit II Batam	UNIT II	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2017
	2	KPHP Unit I Karimun	UNIT I	
	3	KPHP Unit III Lingga	UNIT III	
	4	KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang	UNIT IV	
	5	KPHP Unit V Natuna	UNIT V	
	6	KPHP Unit VI Anambas	UNIT VI	
Lampung	1	KPH Gunung Raja Basa - Way Pisang - Batu Serampok	UNIT XIII UNIT XIV	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
	2	KPH Batu Tegi	UNIT IX	
	3	KPH Gunung Balak	UNIT XV	
	4	KPH Kota Agung Utara	UNIT X	
	5	KPH Liwa	UNIT II	
	6	KPH Pematang Neba	UNIT XI	
	7	KPH Pesawaran	UNIT XII	
	8	KPH Way Waya - Tangkit Tebak	UNIT VII UNIT VIII	
	9	KPH Bukit Punggur	UNIT III	
	10	KPH Gedong Wani	UNIT XVI	
	11	KPH Muara Dua	UNIT IV	
	12	KPH Pesisir Barat	UNIT I	
	13	KPH Sungai Buaya	UNIT V	
	14	KPH Way Terusan	UNIT VI	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Riau	1	KPHP Minas Tahura	UNIT IX	Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2017
	2	KPH Bagan Siapi Api	UNIT I	Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017
			UNIT II	
			UNIT III	
			UNIT XII	
	3	KPH Bengkalis Pulau	UNIT IV	
			UNIT V	
			UNIT VI	
	4	KPH Hutan Mandah	UNIT XXVI	
			UNIT XXVII	
	5	KPH Indragiri	UNIT XXIX	
			UNIT XXVIII	
			UNIT XXX	
Sumatera Barat	6	KPH Kampar Kiri	UNIT XVIII	
	7	KPH Mandau	UNIT VII	
			UNIT VIII	
			UNIT X	
	8	KPH Rokan	UNIT XI	
			UNIT XIII	
			UNIT XIV	
	9	KPH Singingi	UNIT XXXI	
			UNIT XXXII	
	10	KPH Sorek	UNIT XIX	
			UNIT XX	
			UNIT XXI	
Sumatera Selatan	11	KPH Suligi-Batu Gajah	UNIT XV	
			UNIT XVI	
			UNIT XVII	
	12	KPH Tasik Besar Serkap	UNIT XXII	
	13	KPH Tebing Tinggi	UNIT XXIII	
			UNIT XXIV	
			UNIT XXV	
	1	KPH Agam Raya	UNIT III	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
	2	KPH Bukit Barisan	UNIT IV	
	3	KPH Dharmasraya	UNIT VIII	
	4	KPH Hulu Batanghari	UNIT VII	
	5	KPH Lima Puluh Kota	UNIT II	
	6	KPH Mentawai	UNIT X	
			UNIT XI	
	7	KPH Pasaman Raya	UNIT I	
	8	KPH Sijunjung	UNIT V	
	9	KPH Solok	UNIT VI	
	10	KPHP Pesisir Selatan	UNIT IX	
	1	KPH Wilayah I Meranti	UNIT IV	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
	2	KPH Wilayah II Lalan - Mendis	UNIT II	
			UNIT III	
	3	KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin	UNIT I	
	4	KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Riding	UNIT XXIII	
			UNIT XXIV	
	5	KPH Wilayah IX Suban Jeriji	UNIT XIV	
	6	KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji	UNIT XXI	
			UNIT XXII	
	7	KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura	UNIT XV	
			UNIT XX	
	8	KPH Wilayah VII Mekakau - Saka	UNIT XIX	
			UNIT XVI	
			UNIT XVII	
			UNIT XVIII	
	9	KPH Wilayah VIII Semendo	UNIT XIII	
	10	KPH Wilayah X Dempo	UNIT XII	
	11	KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah	UNIT IX	
			UNIT X	
			UNIT XI	
	12	KPH Wilayah XII Benakat	UNIT VII	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	13	KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong	UNIT VI	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016
			UNIT VIII	
Sumatera Utara	14	KPH Wilayah XIV Rawas	UNIT V	
	1	KPH Wilayah I Stabat	UNIT I	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016
			UNIT V	
	2	KPH Wilayah II Pematang Siantar	UNIT IX	
			UNIT VI	
			UNIT X	
			UNIT XII	
	3	KPH Wilayah III Kisaran	UNIT III	
			UNIT XIII	
	4	KPH Wilayah IV Balige	UNIT XIV	
			UNIT XXI	
	5	KPH Wilayah IX Panyabungan	XXIX	
	6	KPH Wilayah V Aek Kanopan	UNIT VII	
			UNIT XXII	
			UNIT XXIII	
	7	KPH Wilayah VI Sipirok	UNIT XXVI	
	8	KPH Wilayah VII Gunung Tua	UNIT XI	
			UNIT XXXI	
	9	KPH Wilayah VIII Kotanopan	UNIT XXX	
	10	KPH Wilayah X Padang Sidempuan	UNIT XXVIII	
	11	KPH Wilayah XI Pandan	UNIT XXIV	
			UNIT XXV	
			UNIT XXVII	
	12	KPH Wilayah XII Tarutung	UNIT XVI	
			UNIT XX	
	13	KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul	UNIT XIX	
			UNIT XVII	
			UNIT XVIII	
	14	KPH Wilayah XIV Sidikalang	UNIT VIII	
			UNIT XV	
	15	KPH Wilayah XV Kabanjahe	UNIT II	
			UNIT IV	
	16	KPH Wilayah XVI Gunung Sitoli	UNIT XXXII	
			UNIT XXXIII	
Yogyakarta	1	BKPH Yogyakarta	-	Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 Tahun 2015
Kalimantan Barat	1	KPH Bengkayang	UNIT II	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2020
	2	KPH Kapuas Hulu Selatan	UNIT XXI	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2020
	3	KPH Kapuas Hulu Timur	UNIT XX	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2020
	4	KPH Kapuas Hulu Utara	Unit XVIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 37 Tahun 2020
			Unit XIX	
	5	KPH Kayong	UNIT XXV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2020
	6	KPH Ketapang Selatan	UNIT XXIX	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2020
			UNIT XXX	
			UNIT XXXI	
			UNIT XXXII	
	7	KPH Ketapang Utara	UNIT XXVI	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2020
			UNIT XXVII	
			UNIT XXVIII	
	8	KPH Kubu Raya	UNIT XXXIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 40 Tahun 2020
	9	KPH Landak	UNIT VI	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2020
			UNIT VII	
	10	KPH Melawi	UNIT XIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2020
			UNIT XXII	
			UNIT XXIII	
			UNIT XXIV	
	11	KPH Mempawah	UNIT VIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2020
	12	KPH Sambas	UNIT I	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2020
	13	KPH Sanggau Barat	UNIT III	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2020
			UNIT V	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	14	KPH Sanggau Timur	UNIT IV UNIT XI	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 Tahun 2020
	15	KPH Sekadau	UNIT XII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2020
	16	KPH Sintang Timur	UNIT XIV UNIT XV UNIT XVI UNIT XVII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2020
	17	KPH Sintang Utara	UNIT IX UNIT X Unit XXXIV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2020
Kalimantan Selatan	1	KPH Balangan	UNIT VIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0102 Tahun 2018
	2	KPH Cantung	UNIT II	
	3	KPH Sengayam	UNIT IV	
	4	KPH Hulu Sungai	UNIT IX	
	5	KPH Kayu Tangi	UNIT I	
	6	KPH Kusan	UNIT VI	
	7	KPH Pulau Laut Sebuku	UNIT III	
	8	KPH Tabalong	UNIT V UNIT X	
	9	KPH Tanah Laut	UNIT VII	
Kalimantan Tengah	1	KPHL Gerbang Barito	UNIT IX	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
	2	KPHL Kapuas - Kahayan	UNIT IV UNIT XXXII UNIT XXXIII	
	3	KPHP Barito Hilir	UNIT VII UNIT XIV	
	4	KPHP Barito Hulu	UNIT V	
	5	KPHP Barito Tengah	UNIT VI UNIT VIII	
	6	KPHP Kahayan Hilir	UNIT XXXI	
	7	KPHP Kahayan Hulu	UNIT XV UNIT XVI	
	8	KPHP Kahayan Tengah	UNIT III UNIT XIII UNIT XVIII	
	9	KPHP Kapuas Hulu	UNIT X UNIT XII	
	10	KPHP Kapuas Tengah	UNIT XI	
	11	KPHP Katingan Hilir	UNIT XXX	
	12	KPHP Katingan Hulu	UNIT XVII	
	13	KPHP Kotawaringin Barat	UNIT XXII UNIT XXVI	
	14	KPHP Mentaya Hulu - Seruan Tengah	UNIT XIX UNIT XX	
	15	KPHP Mentaya Tengah - Seruan Hilir	UNIT XXIX UNIT XXVII UNIT XXVIII	
	16	KPHP Murung Raya	UNIT I UNIT II	
	17	KPHP Seruan Hulu	UNIT XXI	
	18	KPHP Sukamara - Lamandau	UNIT XXIII UNIT XXIV UNIT XXV	
Kalimantan Timur	1	KPHP Manubar	UNIT XVII	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019
	2	KPHP Bengalon	UNIT XVIII	
	3	KPHP Berau Barat	UNIT XII	
	4	KPHP Berau Utara	UNIT XIV	
	5	KPHP Berau Tengah	UNIT XV	
	6	KPHP Berau Pantai	UNIT XVI	
	7	KPHL Balikpapan	UNIT XXX	
	8	KPHP Bongan	UNIT XXXII	
	9	KPHP Delta Mahakam	UNIT XXIX	
	10	KPHP Sub Das Belayan	UNIT XXVI	
	11	KPHL Batu Rook	UNIT XXII	
	12	KPHP Batu Ayau	UNIT XXIII	
	13	KPHP Mook Manor Bulatn	UNIT XXV	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	14	KPHP Damai	UNIT XXIV	
	15	KPHP Meratus	UNIT XXXI	
	16	KPHP Telake	UNIT XXXIII	
	17	KPHP Kendilo	UNIT XXXIV	
	18	KPHP Kelinjau	UNIT XIX	
	19	KPHP Santan	UNIT XXVII	
Kalimantan Utara	1	KPH Bulungan	UNIT IX UNIT XIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2018
	2	KPH Malinau	UNIT II UNIT X UNIT XI UNIT XX UNIT XXI	
	3	KPH Nunukan	UNIT I UNIT III UNIT IV	
	4	KPH Tana Tidung	UNIT V UNIT VII	
	5	KPH Tarakan	UNIT VI UNIT VIII	
Gorontalo	1	KPH Wil. I dan Wil. II Gorontalo Barat	UNIT I UNIT II	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2017
	2	KPH Wil. III Pahuwato	UNIT III	
	3	KPH Wil. IV Gorontalo Utara	UNIT IV	
	4	KPH Wil. V Boalemo	UNIT V	
	5	KPH Wil. VI Gorontalo	UNIT VI	
	6	KPH Wil. VII Bone Bolango dan Gorontalo Kota	UNIT VII	
Maluku	1	KPH Ambon	UNIT XIII UNIT XIV	Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017
	2	KPH Buru	UNIT II	
	3	KPH Buru Selatan	UNIT I UNIT III	
	4	KPH Kepulauan Aru	UNIT XXI UNIT XXII	
	5	KPH Kota Tual	UNIT XV	
	6	KPH Maluku Barat Daya	UNIT XIX UNIT XX	
	7	KPH Maluku Tengah	UNIT IX UNIT VI UNIT VII UNIT VIII	
	8	KPH Maluku Tenggara	UNIT XVI	
	9	KPH Maluku Tenggara Barat	UNIT XVII UNIT XVIII	
	10	KPH Seram Bagian Barat	UNIT IV UNIT V	
	11	KPH Seram Bagian Timur	UNIT X UNIT XI UNIT XII	
Maluku Utara	1	KPH Halmahera Barat	UNIT III	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017
	2	KPH Halmahera Selatan	UNIT XII UNIT XIII UNIT XIV	
	3	KPH Halmahera Tengah	UNIT VI UNIT VII	
	4	KPH Halmahera Timur	UNIT IV UNIT V UNIT VIII	
	5	KPH Halmahera Utara	UNIT II	
	6	KPH Kepulauan Sula	UNIT XV	
	7	KPH Pulau Morotai	UNIT I	
	8	KPH Pulau Taliabu	UNIT XVI	
	9	KPH Ternate-Tidore	UNIT XI	
	10	KPH Tidore Kepulauan	UNIT IX UNIT X	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Sulawesi Barat	1	KPH Bonehau Kalumpang	UNIT XII UNIT XIII	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016
	2	KPH Budong-Budong	UNIT V	
	3	KPH Karama	UNIT VI	
	4	KPH Karossa	UNIT IV	
	5	KPH Lariang	UNIT II	
	6	KPH Malunda	UNIT X	
	7	KPH Mamasa Barat	UNIT VII	
	8	KPH Mamasa Tengah	UNIT VIII	
	9	KPH Mamasa Timur	UNIT IX	
	10	KPH Mapilli	UNIT XI	
	11	KPH Pasangkayu	UNIT I	
	12	KPH Sarudu	UNIT III	
Sulawesi Selatan	1	KPH AJATAPPARENG	UNIT II	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021
	2	KPH BILA	UNIT III	
	3	KPH BULUSARAUNG	UNIT I	
	4	KPH CENRANA	UNIT XIII	
	5	KPH JENEBERANG I	UNIT XIV	
	6	KPH JENEBERANG II	UNIT XV	
	7	KPH KALAENA	UNIT X	
	8	KPH LARONA MALILI	UNIT XI	
	9	KPH LATIMOJONG	UNIT VIII	
	10	KPH MATA ALLO	UNIT V	
	11	KPH RONGKONG	UNIT IX	
	12	KPH SADDANG I	UNIT VI	
	13	KPH SADDANG II	UNIT VII	
	14	KPH SAWITTO	UNIT IV	
	15	KPH SELAYAR	UNIT XVI	
	16	KPH WALANAE	UNIT XII	
Sulawesi Tengah	1	KPH Balantak	UNIT XVIII UNIT XX	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018
	2	KPH Banawa Lalundu	UNIT VII	
	3	KPH Dampelas Tinombo	UNIT III UNIT IV	
	4	KPH Dolago Tanggunung	UNIT V Unit VI Unit IX	
	5	KPH Gunung Dako	UNIT II	
	6	KPH Kulawi	UNIT VIII	
	7	KPH Pogogul	UNIT I	
	8	KPH Pulau Peling	UNIT XXI	
	9	KPH Sintuwu Maroso	UNIT X UNIT XI UNIT XII	
	10	KPH Sivia Patuju	UNIT XVI UNIT XVII	
	11	KPH Toili Baturube	UNIT XIX	
	12	KPH Tepe Asa Moroso	UNIT XIV	
	13	KPH Tepo Asa Aroa	UNIT XIII UNIT XV	
Sulawesi Tenggara	1	KPH UNIT I KAPONTORI	UNIT I	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2017
	2	KPH UNIT II LASALIMU	UNIT II	
	3	KPH UNIT III LAKOMPA	UNIT III	
	4	KPH UNIT IV KATONDOKI	UNIT IV	
	5	KPH UNIT IX PULAU KABAENA	UNIT IX	
	6	KPH UNIT V WAKONTI	UNIT V	
	7	KPH UNIT VI PULAU MUNA	UNIT VI	
	8	KPH UNIT VII PEROPA EA	UNIT VII	
	9	KPH UNIT VIII GANTARA	UNIT VIII	
	10	KPH UNIT X TINA ORIMA	UNIT X	
	11	KPH UNIT XI MEKONGGA SELATAN	UNIT XI	
	12	KPH UNIT XII LADONGI	UNIT XII	
	13	KPH UNIT XIII MEKONGGA UTARA	UNIT XIII	
	14	KPH UNIT XIV UEESI	UNIT XIV	
	15	KPH UNIT XIX LAIWOI UTARA	UNIT XIX	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
	2	3	4	5
	16	KPH UNIT XV ALAAHA	UNIT XV	
	17	KPH Unit XVI Patampanua Selatan	UNIT XVI	
	18	KPH UNIT XVII PATAMPANUA UTARA	UNIT XVII	
	19	KPH UNIT XVIII LAIWOI BARAT	UNIT XVIII	
	20	KPH UNIT XX LAIWOI TENGAH	UNIT XX	
	21	KPH UNIT XXI LAIWOI TENGGARA	UNIT XXI	
	22	KPH UNIT XXII LAIWOI	UNIT XXII	
	23	KPH UNIT XXIII PULAU WAWONII	UNIT XXIII	
	24	KPH UNIT XXIV GULARAYA	UNIT XXIV	
	25	KPH UNIT XXV WAKATOBI	UNIT XXV	
Sulawesi Utara	1	KPH Model Unit IV Poigar	Unit IV	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2017
	2	KPH Unit I Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara	UNIT I	
	3	KPH UNIT II BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	UNIT II	
	4	KPH UNIT III KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD, DAN KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	UNIT III	
	5	KPH UNIT V MINAHASA, MINAHASA TENGGARA, MINAHASA SELATAN DAN TOMOHON	UNIT V	
	6	KPH UNIT VI MANADO, MINAHASA UTARA DAN BITUNG	Unit VI	
Bali	1	KPH BALI BARAT	UNIT I	Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019
	2	KPH BALI SELATAN	UNIT IV	
	3	KPH BALI TIMUR	UNIT III	
	4	KPH BALI UTARA	UNIT II	
Nusa Tenggara Barat	1	Balai KPH Ampang Plampang	UNIT XIII UNIT XIV	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2019
	2	Balai KPH Ampang Riwo	UNIT XV	
	3	Balai KPH Batulan teh	UNIT IX	
	4	Balai KPH Brang Beh	UNIT XI	
	5	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	UNIT VII UNIT VIII	
	6	Balai KPH Madapangga, Rompu, Waworoda	UNIT XX UNIT XXI	
	7	Balai KPH Maria Donggomassa	UNIT XXII UNIT XXIII	
	8	Balai KPH Orong Telu	UNIT X	
	9	Balai KPH Pelangan Tastura	UNIT II UNIT III	
	10	Balai KPH Rinjani Barat	UNIT I	
	11	Balai KPH Rinjani Timur	UNIT IV	
	12	Balai KPH Ropang	UNIT XII	
	13	Balai KPH Sejorong Mataiyang	UNIT V UNIT VI	
	14	Balai KPH Tambora	UNIT XVII UNIT XVIII	
	15	Balai KPH Tofopajo Soromandi	UNIT XIX UNIT XVI	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Nusa Tenggara Timur	1	KPH Wilayah Kabupaten Alor	UNIT X	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016
	2	KPH WILAYAH KABUPATEN BELU	XXII	
	3	KPH Wilayah Kabupaten Ende	UNIT VI	
	4	KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur	UNIT VIII	
	5	KPH Wilayah Kabupaten Kupang	UNIT XVII	
	6	KPH Wilayah Kabupaten Lembata	UNIT IX	
	7	KPH Wilayah Kabupaten Malaka	UNIT XIX	
	8	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai	UNIT II	
	9	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	UNIT I	
	10	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	UNIT III	
	11	KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo	UNIT V	
	12	KPH Wilayah Kabupaten Ngada	UNIT IV	
	13	KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao	UNIT XVI	
	14	KPH Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	UNIT XV	
	15	KPH Wilayah Kabupaten Sikka	VII	
	16	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat	UNIT XII	
	17	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	UNIT XI	
	18	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	UNIT XIII	
	19	KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	XX	
	20	KPH Wilayah Kota Kupang	UNIT XVIII	
	21	KPH Wilayah Timor Tengah Utara	UNIT XXI	
	22	UPT - KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur	UNIT XIV	
Papua	1	KPHP Unit XXIII Sarmi	UNIT XXIII	Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2017
	2	KPHP UNIT LIII Boven Digoel	UNIT LIII	
	3	KPHL Unit XX Biak Numfor	UNIT XX	
	4	KPHP Unit XVII Waropen	Unit XVII	
	5	KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen	UNIT XIX	
	6	KPHP Unit XXIX Keerom	Unit XXIX	
	7	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI - MEMBERAMO	Unit XXI	
	8	KPHL Unit II Nabire	UNIT II	
	9	KPHL Unit VI Mimika	UNIT VI	
	10	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	UNIT XXVIII	
	11	KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang	UNIT XXXV	
	12	KPHL Unit XLII Jayawijaya	UNIT XLII	
	13	KPHL Unit XLII Lani Jaya	UNIT LVII	
	14	KPHP Unit XLIII Nduga	UNIT XLIII	
Papua Barat	1	KPHL Unit I Raja Ampat	UNIT I	Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2018
	2	KPHP Unit II Sorong	UNIT II	
	3	KPHL Unit II Sorong		
	3	KPHL Unit VII Sorong Selatan	UNIT VII	
	4	KPHL Unit XII Manokwari	UNIT XII	
	6	KPHP Unit IV Tambrawu	UNIT IV	
	7	KPHP Unit V Sorong Selatan	UNIT V	
	8	KPHP Unit XV Bintuni	UNIT XV	
	9	KPHP Unit XVI Fakfak	UNIT XVI	

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2022

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

TABEL V.5. PENETAPAN FASILITASI KPH

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	UNIT I	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	568.250
2	Aceh	UNIT II	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	253.948
3	Aceh	UNIT IV	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	402.986
4	Aceh	UNIT V	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	290.162
5	Aceh	UNIT VI	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	310.552
6	Sumatera Utara	UNIT XVI	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	72.166
7	Sumatera Utara	UNIT XVII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	86.555
8	Sumatera Utara	UNIT XVIII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	49.415
9	Sumatera Utara	UNIT XX	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	88.931
10	Sumatera Utara	UNIT XXIII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	64.937
11	Sumatera Utara	UNIT XXIV	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	124.347
12	Sumatera Utara	UNIT XXV	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	60.396
13	Sumatera Utara	UNIT XXVI	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	174.395
14	Sumatera Utara	UNIT XXVII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	38.071
15	Sumatera Utara	UNIT XXVIII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	127.758
16	Sumatera Utara	UNIT XXXI	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	270.460
17	Sumatera Selatan	UNIT II	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	62.486
18	Sumatera Selatan	UNIT XII	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	26.052
19	Sumatera Selatan	UNIT XIII	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	69.431
20	Sumatera Selatan	UNIT XIV	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	179.044
21	Sumatera Selatan	UNIT XV	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	94.847
22	Sumatera Selatan	UNIT XVI	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	29.706
23	Kep. Riau	UNIT III	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	98.752
24	Kep. Riau	UNIT IV	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.756
25	Riau	UNIT V	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	23.438
26	Riau	UNIT VII	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	102.958
27	Riau	UNIT XIV	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	67.118
28	Riau	UNIT XX	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	168.458
29	Riau	UNIT XXI	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	124.109
30	Riau	UNIT XXX	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	150.718
31	Riau	UNIT XXXI	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	88.870
32	Kep. Bangka Belitung	UNIT II	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	103.539
33	Kep. Bangka Belitung	UNIT III	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	89.310
34	Kep. Bangka Belitung	UNIT VIII	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	171.189
35	Kep. Bangka Belitung	UNIT X	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	97.508
36	Bengkulu	UNIT III	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	96.125
37	Bengkulu	UNIT IV	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	82.242
38	Bengkulu	UNIT V	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	48.686
39	Bengkulu	UNIT VI	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	78.232
40	Jambi	UNIT IX	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	142.967
41	Jambi	UNIT X	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	103.650
42	Lampung	UNIT II	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	42.074
43	Lampung	UNIT VII	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	24.337
44	Lampung	UNIT VIII	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	21.117
45	Lampung	UNIT XV	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	24.285
46	Nusa Tenggara Barat	UNIT XVI	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	25.422
47	Nusa Tenggara Barat	UNIT XX	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	45.663
48	Nusa Tenggara Timur	UNIT II	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	17.736
49	Nusa Tenggara Timur	UNIT III	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	50.952
50	Nusa Tenggara Timur	UNIT IV	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	35.734
51	Nusa Tenggara Timur	UNIT IX	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	49.182
52	Nusa Tenggara Timur	UNIT V	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	32.791
53	Nusa Tenggara Timur	UNIT VI	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	57.740
54	Nusa Tenggara Timur	UNIT VII	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	36.999
55	Nusa Tenggara Timur	UNIT XI	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	20.647
56	Nusa Tenggara Timur	UNIT XX	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	69.461
57	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXI	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	105.632
58	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXII	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.537

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
59	Kalimantan Barat	UNIT XXIII	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	189.599
60	Kalimantan Barat	UNIT XXIV	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	179.461
61	Kalimantan Barat	UNIT XXV	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	318.717
62	Kalimantan Utara	UNIT VII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	120.789
63	Kalimantan Timur	UNIT XXIX	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	109.314
64	Kalimantan Timur	UNIT XXVI	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	979.933
65	Kalimantan Timur	UNIT XXVII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	263.467
66	Kalimantan Timur	UNIT XXX	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	15.130
67	Kalimantan Timur	UNIT XXXII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	333.166
68	Kalimantan Timur	UNIT XXXIII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	255.245
69	Kalimantan Selatan	UNIT IX	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	62.186
70	Kalimantan Selatan	UNIT VI	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	262.919
71	Kalimantan Tengah	UNIT III	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	59.185
72	Kalimantan Tengah	UNIT V	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	334.069
73	Kalimantan Tengah	UNIT XIV	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	48.400
74	Kalimantan Tengah	UNIT XXIX	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	200.518
75	Kalimantan Tengah	UNIT XXXI	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	378.819
76	Sulawesi Utara	UNIT VI	SK.625/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	27.101
77	Gorontalo	UNIT VII	SK.639/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	35.784
78	Sulawesi Tengah	UNIT II	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	162.785
79	Sulawesi Tengah	UNIT VII	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	109.923
80	Sulawesi Tengah	UNIT XIV	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	190.830
81	Sulawesi Tengah	UNIT XXI	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	117.079
82	Sulawesi Barat	UNIT IV	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	63.110
83	Sulawesi Barat	UNIT VI	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	156.917
84	Sulawesi Tenggara	UNIT V	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	12.179
85	Sulawesi Tenggara	UNIT VI	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	73.726
86	Sulawesi Tenggara	UNIT XI	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.580
87	Sulawesi Tenggara	UNIT XII	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	47.088
88	Sulawesi Tenggara	UNIT XIII	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	125.717
89	Sulawesi Tenggara	UNIT XIV	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	163.744
90	Sulawesi Tenggara	UNIT XIX	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	113.580
91	Sulawesi Tenggara	UNIT XXV	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	10.022
92	Sulawesi Selatan	UNIT X	SK.616/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	20.901
93	Maluku Utara	UNIT IV	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	199.327
94	Maluku Utara	UNIT IX	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	17.998
95	Maluku Utara	UNIT XVI	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	168.726
96	Maluku	UNIT I	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	144.539
97	Maluku	UNIT XIV	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	10.288
98	Maluku	UNIT XVI	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	11.836
99	Maluku	UNIT XVIII	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	132.339
100	Maluku	UNIT XXI	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	70.159
101	Maluku	UNIT XXII	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	132.116
102	Papua Barat	UNIT I	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	192.142
103	Papua Barat	UNIT IV	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	139.738
104	Papua Barat	UNIT XV	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	640.508
105	Papua Barat	UNIT XVI	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	209.554
106	Papua	UNIT II	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	359.135
107	Papua	UNIT LI	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	666.097
108	Papua	UNIT VI	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	273.223
109	Papua	UNIT X	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	627.940
110	Papua	UNIT XLII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	139.928
111	Papua	UNIT XLIII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	257.531
112	Papua	UNIT XXII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	185.260
113	Papua	UNIT XXVIII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	47.726
114	Papua	UNIT XXXV	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	299.129
115	Sumatera Barat	UNIT I	SK.832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	323.501
116	Sumatera Barat	UNIT III	SK.832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	62.368
117	Sumatera Utara	UNIT I	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	69.878
118	Sumatera Utara	UNIT II	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	80.002
119	Sumatera Utara	UNIT XII	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	56.223
120	Sumatera Utara	UNIT XV	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	89.851
121	Kalimantan Selatan	UNIT XIX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	32.419
122	Kalimantan Selatan	UNIT XX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	27.076

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
123	Kalimantan Selatan	UNIT XXI	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	44.592
124	Kalimantan Selatan	UNIT XXII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	91.392
125	Kalimantan Selatan	UNIT XXIII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	206.254
126	Kalimantan Selatan	UNIT XXIV	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	407.604
127	Kalimantan Barat	UNIT I	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	127.794
128	Kalimantan Barat	UNIT VIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	94.544
129	Kalimantan Barat	UNIT XIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	56.013
130	Kalimantan Barat	UNIT XV	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	207.079
131	Kalimantan Barat	UNIT XVI	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	324.662
132	Kalimantan Barat	UNIT XXX	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	70.458
133	Kalimantan Barat	UNIT XXXI	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	261.701
134	Kalimantan Barat	UNIT XXXIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	318.804
135	Kalimantan Timur	UNIT XXII	SK.835/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	658.129
136	Kalimantan Selatan	UNIT VIII	SK.836/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	141.349
137	Maluku Utara	UNIT XII	SK.838/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	170.442
138	Sulawesi Utara	UNIT V	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	13.356
139	Sulawesi Utara	UNIT VIII	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	27.101
140	Sulawesi Utara	UNIT IX	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	13.272
141	Sulawesi Barat	UNIT IX	SK.840/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	51.086
142	Sulawesi Selatan	UNIT V	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	143.751
143	Sulawesi Selatan	UNIT VI	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	59.954
144	Sulawesi Selatan	UNIT VII	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	130.508
145	Nusa Tenggara Barat	UNIT VI	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	32.340
146	Nusa Tenggara Barat	UNIT VII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	40.645
147	Nusa Tenggara Barat	UNIT VIII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	44.461
148	Nusa Tenggara Barat	UNIT X	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	55.226
149	Nusa Tenggara Barat	UNIT XI	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	64.134
150	Nusa Tenggara Barat	UNIT XII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	74.733
151	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	33.610
152	Nusa Tenggara Barat	UNIT XV	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	42.630
153	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIX	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	44.082
154	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	43.399
155	Maluku	UNIT V	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	92.002
156	Maluku	UNIT XII	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	193.041
157	Maluku	UNIT XV	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	10.067
158	Papua	UNIT III	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	194.846
159	Papua	UNIT XXIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	122.820
160	Papua	UNIT XXV	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	354.901
161	Papua	UNIT XLVII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	461.382
162	Papua	UNIT XLVIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	573.543
163	Papua	UNIT XLIX	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	539.996
164	Papua	UNIT LIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	649.375
165	Papua	UNIT LVI	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	363.877
166	Kep. Riau	UNIT II	SK.844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	32.472
167	Kep. Riau	UNIT V	SK.844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	61.403
168	Jambi	UNIT VIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	110.327
169	Jambi	UNIT XII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	79.305
170	Jambi	UNIT XIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	103.528
171	Jambi	UNIT XIV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	80.852
172	Jambi	UNIT XV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	91.626
173	Jambi	UNIT XVI	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	122.504
174	Kep. Bangka Belitung	UNIT VI	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	27.199
175	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIV	SK.847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	116.160
176	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVII	SK.847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	113.398
177	Gorontalo	UNIT II	SK.848/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	90.644
178	Sulawesi Tengah	UNIT III	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	134.726
179	Sulawesi Tengah	UNIT V	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	111.273
180	Sulawesi Tengah	UNIT VIII	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	220.766
181	Papua Barat	UNIT VI	SK.850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	225.183
182	Papua Barat	UNIT XII	SK.850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	256.207

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
183	Riau	UNIT I	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	110.513
184	Riau	UNIT II	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	141.080
185	Riau	UNIT III	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	1.313.825
186	Riau	UNIT IV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	80.347
187	Riau	UNIT VI	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	224.663
188	Riau	UNIT XII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	149.905
189	Riau	UNIT XV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	87.370
190	Riau	UNIT XIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	35.000
191	Riau	UNIT XXIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	69.397
192	Riau	UNIT XXV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	67.827
193	Riau	UNIT XXVII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	42.898
194	Riau	UNIT XXVIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	231.490
195	Riau	UNIT XXIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	61.182
196	Riau	UNIT XXXII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	96.697
197	Lampung	UNIT XI	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	47.746
198	Lampung	UNIT XIII	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	8.025
199	Kalimantan Tengah	UNIT IV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	7.804
200	Kalimantan Tengah	UNIT VII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	158.785
201	Kalimantan Tengah	UNIT X	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	244.231
202	Kalimantan Tengah	UNIT XI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	274.875
203	Kalimantan Tengah	UNIT XVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	681.864
204	Kalimantan Tengah	UNIT XVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	140.418
205	Kalimantan Tengah	UNIT XIX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	366.726
206	Kalimantan Tengah	UNIT XXIV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	92.242
207	Kalimantan Tengah	UNIT XXV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	157.199
208	Kalimantan Tengah	UNIT XXVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	302.601
209	Kalimantan Tengah	UNIT XXVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	144.535
210	Kalimantan Tengah	UNIT XXX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	217.832
211	Sulawesi Tenggara	UNIT VIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	18.588
212	Sulawesi Tenggara	UNIT XVI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	126.917
213	Sulawesi Tenggara	UNIT XX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	230.547
214	Sulawesi Tenggara	UNIT XXI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	65.901
215	Gorontalo	UNIT I	SK.472/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	52.326
216	Kalimantan Selatan	UNIT II	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	209.297
217	Kalimantan Selatan	UNIT IV	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	141.553
218	Kalimantan Selatan	UNIT X	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	117.914
219	Kalimantan Tengah	UNIT I	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	1.063.147
220	Kalimantan Tengah	UNIT VI	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	180.311
221	Kalimantan Tengah	UNIT VIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	107.713
222	Kalimantan Tengah	UNIT XII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	184.028
223	Kalimantan Tengah	UNIT XIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	182.947
224	Kalimantan Tengah	UNIT XV	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	203.828
225	Kalimantan Tengah	UNIT XX	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	189.920
226	Kalimantan Tengah	UNIT XXXII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	185.915
227	Lampung	UNIT I	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	39.001
228	Lampung	UNIT XIV	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	9.866
229	Maluku Utara	UNIT I	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	150.493
230	Maluku Utara	UNIT II	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	103.970
231	Maluku Utara	UNIT V	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	78.287
232	Maluku Utara	UNIT VI	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	72.706
233	Maluku Utara	UNIT VII	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	93.115
234	Maluku Utara	UNIT VIII	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	37.199
235	Maluku Utara	UNIT III	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	165.028
236	Maluku Utara	UNIT IX	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	8.477
237	Maluku Utara	UNIT XIV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	190.756
238	Maluku Utara	UNIT XV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	97.118

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
239	Nusa Tenggara Barat	UNIT II	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	18.022
240	Nusa Tenggara Barat	UNIT XVII	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	32.245
241	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXI	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	20.900
242	Sulawesi Tengah	UNIT X	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	88.200
243	Sulawesi Tengah	UNIT XIII	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	170.930
244	Sulawesi Tengah	UNIT XVI	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	211.056
245	Sulawesi Tengah	UNIT XII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	92.179
246	Sulawesi Tengah	UNIT XV	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	156.582
247	Sulawesi Tengah	UNIT XVIII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	179.581
248	Sumatera Utara	UNIT III	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	28.145
249	Sumatera Utara	UNIT IX	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	9.740
250	Sumatera Utara	UNIT XI	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	42.052
251	Sumatera Utara	UNIT XIII	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	54.720
252	Sumatera Utara	UNIT XXX	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	120.968
253	Sumatera Utara	UNIT XXXII	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	143.895
254	Sumatera Utara	UNIT IV	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	42.717
255	Sumatera Utara	UNIT VII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	32.287
256	Sumatera Utara	UNIT VIII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	49.236
257	Sumatera Utara	UNIT X	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	4.884
258	Sumatera Utara	UNIT XIX	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	19.808
259	Sumatera Utara	UNIT V	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	37.771
260	Sumatera Utara	UNIT VI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	45.638
261	Sumatera Utara	UNIT XXI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	38.277
262	Sumatera Utara	UNIT XXXIII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	109.733
263	Sumatera Barat	UNIT VII	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	182.908
264	Sumatera Barat	UNIT X	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	123.467
265	Sumatera Barat	UNIT XI	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	134.750
266	Sumatera Selatan	UNIT IX	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	33.553
267	Sumatera Selatan	UNIT X	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	39.912
268	Sumatera Selatan	UNIT XI	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	40.701
269	Sumatera Selatan	UNIT XVII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	43.001
270	Sumatera Selatan	UNIT XVIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	50.894
271	Sumatera Selatan	UNIT VIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	6.504
272	Kalimantan Timur	UNIT XIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	324.054
273	Kalimantan Timur	UNIT XV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	326.041
274	Kalimantan Timur	UNIT XVI	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	142.933
275	Kalimantan Timur	UNIT XVII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	239.921
276	Kalimantan Timur	UNIT XVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	673.912
277	Kalimantan Timur	UNIT XIX	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	928.748
278	Kalimantan Timur	UNIT XXIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	201.533
279	Kalimantan Timur	UNIT XXIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	534.036
280	Kalimantan Timur	UNIT XXV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	410.598
281	Kalimantan Timur	UNIT XXVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	296
282	Kalimantan Utara	UNIT I	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	47.189
283	Kalimantan Utara	UNIT II	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	357.466
284	Kalimantan Utara	UNIT III	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	178.204
285	Kalimantan Utara	UNIT IV	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	400.454
286	Kalimantan Utara	UNIT V	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	42.817
287	Kalimantan Utara	UNIT VIII	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	197.730
288	Kalimantan Utara	UNIT XI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	606.599
289	Kalimantan Utara	UNIT XIII	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	211.140
290	Kalimantan Utara	UNIT XX	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	560.400
291	Kalimantan Utara	UNIT XXI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	448.602
292	Sulawesi Utara	UNIT III	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	26.605
293	Sulawesi Utara	UNIT I	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	143.923
294	Sulawesi Utara	UNIT II	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	138.402
295	Sulawesi Barat	UNIT I	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	23.729
296	Sulawesi Barat	UNIT III	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	71.611
297	Kepulauan Riau	UNIT VI	SK.731/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	22.832
298	Jambi	UNIT II	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	45.460
299	Jambi	UNIT III	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	69.492
300	Jambi	UNIT IV	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	50.930
301	Jambi	UNIT V	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	53.412
302	Jambi	UNIT XI	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	103.979

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
303	Kep. Bangka Belitung	UNIT VII	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	45.497
304	Kep. Bangka Belitung	UNIT XII	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	47.750
305	Kep. Bangka Belitung	UNIT IX	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	55.249
306	Kep. Bangka Belitung	UNIT XI	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	30.848
307	Nusa Tenggara Timur	UNIT XV	SK.734/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	9.970
308	Riau	UNIT XVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	62.723
309	Riau	UNIT VIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	105.279
310	Riau	UNIT X	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	64.885
311	Riau	UNIT XI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	29.812
312	Riau	UNIT XIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	72.739
313	Riau	UNIT XVII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	27.330
314	Riau	UNIT XXVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	117.912
315	Bali	UNIT I	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	38.537
316	Bali	UNIT II	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	35.317
317	Bali	UNIT III	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	20.808
318	Bali	UNIT IV	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	10.738
319	Maluku	UNIT IV	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	140.952
320	Maluku	UNIT IX	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	79.987
321	Maluku	UNIT VI	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	127.944
322	Maluku	UNIT VIII	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	94.957
323	Maluku	UNIT XI	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	136.401
324	Maluku	UNIT XIII	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	36.529
325	Maluku	UNIT XIX	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	45.765
326	Maluku	UNIT XVII	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	70.874
327	Maluku	UNIT XX	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	64.272
328	Nusa Tenggara Timur	UNIT XII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	7.544
329	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	26.165
330	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVIII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	1.499
331	Papua	UNIT I	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	144.178
332	Papua	UNIT IV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	317.151
333	Papua	UNIT IX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	266.595
334	Papua	UNIT L	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	309.709
335	Papua	UNIT LII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	500.736
336	Papua	UNIT LIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	248.976
337	Papua	UNIT LV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	937.070
338	Papua	UNIT V	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	194.489
339	Papua	UNIT VII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	671.385
340	Papua	UNIT VIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	234.635
341	Papua	UNIT XI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	224.416
342	Papua	UNIT XII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	401.950
343	Papua	UNIT XIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	631.259
344	Papua	UNIT XIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	199.047
345	Papua	UNIT XL	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	382.624
346	Papua	UNIT XLI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	291.032
347	Papua	UNIT XLIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	880.620
348	Papua	UNIT XLV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	644.413
349	Papua	UNIT XLVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	449.718
350	Papua	UNIT XV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	472.706
351	Papua	UNIT XVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	314.572
352	Papua	UNIT XVIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	270.629
353	Papua	UNIT XXIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	236.940
354	Papua	UNIT XXVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	242.063
355	Papua	UNIT XXVII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	359.330
356	Papua	UNIT XXX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	150.238
357	Papua	UNIT XXXI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	312.293
358	Papua	UNIT XXXII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	270.264
359	Papua	UNIT XXXIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	242.459
360	Papua	Unit XXXIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	23.502
361	Papua	UNIT XXXIX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	219.484
362	Papua	UNIT XXXVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	88.547
363	Papua	UNIT XXXVII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	112.039
364	Papua	UNIT XXXVIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	333.836

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
365	Papua Barat	UNIT III	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	235.899
366	Papua Barat	UNIT IX	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	242.559
367	Papua Barat	UNIT VII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	130.809
368	Papua Barat	UNIT VIII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	122.666
369	Papua Barat	UNIT X	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	337.794
370	Papua Barat	UNIT XI	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	302.888
371	Papua Barat	UNIT XIII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	260.558
372	Papua Barat	UNIT XIV	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	288.745
373	Papua Barat	UNIT XIX	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	235.427
374	Papua Barat	UNIT XVII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	159.489
375	Papua Barat	UNIT XVIII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	230.695
376	Papua Barat	UNIT XX	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	399.415
377	Papua Barat	UNIT XXI	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	390.140
378	Sulawesi Barat	UNIT XIII	SK.80/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	42.321
379	Sulawesi Selatan	UNIT II	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	69.848
380	Sulawesi Selatan	UNIT III	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	71.518
381	Sulawesi Selatan	UNIT IV	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	72.999
382	Sulawesi Selatan	UNIT IX	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	457.738
383	Sulawesi Selatan	UNIT V	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	78.271
384	Sulawesi Selatan	UNIT VI	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	113.056
385	Sulawesi Selatan	UNIT VII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	55.103
386	Sulawesi Selatan	UNIT VIII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	119.445
387	Sulawesi Selatan	UNIT X	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	162.840
388	Sulawesi Selatan	UNIT XI	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	241.946
389	Sulawesi Selatan	UNIT XII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	64.592
390	Sulawesi Selatan	UNIT XIII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	134.513
391	Sulawesi Selatan	UNIT XIV	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	76.962
392	Sulawesi Selatan	UNIT XV	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	30.216
393	Sulawesi Tenggara	UNIT I	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	13.793
394	Sulawesi Tenggara	UNIT II	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	48.282
395	Sulawesi Tenggara	UNIT IV	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	15.701
396	Sulawesi Tenggara	UNIT IX	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	46.315
397	Sulawesi Tenggara	UNIT XV	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	93.115
398	Sulawesi Tenggara	UNIT XVII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	105.549
399	Sulawesi Tenggara	UNIT XVIII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	167.626
400	Sulawesi Tenggara	UNIT XXIII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	36.562
401	Kalimantan Barat	UNIT II	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	145.558
402	Kalimantan Barat	UNIT III	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	123.612
403	Kalimantan Barat	Unit IV	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	266.183
404	Kalimantan Barat	UNIT IX	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	135.282
405	Kalimantan Barat	UNIT V	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	111.392
406	Kalimantan Barat	Unit VI	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	55.343
407	Kalimantan Barat	Unit VII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	104.987
408	Kalimantan Barat	Unit XI	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	68.505
409	Kalimantan Barat	UNIT XII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	132.425
410	Kalimantan Barat	Unit XIV	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	107.644
411	Kalimantan Barat	UNIT XVII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	323.684
412	Kalimantan Barat	UNIT XX	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	474.145
413	Kalimantan Barat	Unit XXI	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	438.927
414	Kalimantan Barat	Unit XXII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	277.427
415	Kalimantan Barat	UNIT XXIX	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	180.331
416	Kalimantan Barat	UNIT XXVI	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	258.733
417	Kalimantan Barat	UNIT XXVII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	326.132
418	Kalimantan Barat	UNIT XXVIII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	96.919
419	Kalimantan Barat	Unit XXXIV	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	83.478
420	Sulawesi Tengah	UNIT XVII	SK.177/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	185.813

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2022

STATISTIK
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2022

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

TABEL VI.1. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2022

NO	PROVINSI	S/D 2017			2018			2019			2020			2021			2022			TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	ACEH	2	8	59845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.181,68	9	67.026,68		
2	SUMATERA UTARA	16	148748,04	-	-	-	-	1	13.216,91	2	8.481,47	4	27.445,07	4	27.445,07	23	197.891,49				
3	SUMATERA BARAT	3	4720,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.720,53
4	RIAU	8	413967,37	-	-	2	32.094,00	1	1,78	1	12,79	2	9,59	14	446.085,53						
5	JAMBI	50	234515,57	-	-	3	122,87	2	14,03	1	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	56	234.659,67
6	SUMATERA SELATAN	42	213951,06	1	3,82	5	828,67	-	-	1	3,75	2	11,71	51	214.799,01						
7	BENGKULU	4	5352,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.352,04
8	LAMPUNG	1	8574,19	-	-	-	-	-	-	1	8.355,17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.929,36
9	BANGKA BELITUNG	7	20100,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20.100,72
10	KEPULAUAN RIAU	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	14	9905,19	1	8,87	1	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9.916,51
13	JAWA TENGAH	18	24772,84	1	94,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	24.867,40
14	DI YOGYAKARTA	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	23	65519,89	1	4.453,81	2	228,47	-	-	-	-	-	-	2	4.593,58	28	74.795,75				
16	BANTEN	3	1790,65	-	-	1	114,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.905,11
17	BALI	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	16	139549,99	-	-	2	3.797,44	-	-	-	-	-	-	1	13.755,67	19	157.103,10				
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	9	39639,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20.583,19	12	60.222,48				
21	KALIMANTAN TENGAH	87	1015618,07	10	646.218,82	4	8.781,10	2	1.426,91	2	7.064,47	4	8.915,88	109	1.688.025,25						
22	KALIMANTAN SELATAN	19	97475,65	-	1	480,85	-	-	-	1	1.385,10	1	3.445,24	22	102.786,84						
23	KALIMANTAN TIMUR	106	401455,39	4	9.753,14	2	4.076,28	2	3.550,75	5	23.551,40	4	6.884,13	123	449.371,09						
24	KALIMANTAN UTARA	25	116398,06	-	2	4.401,81	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	28	120.799,87
25	SULAWESI UTARA	6	49695,48	1	3.041,13	-	2	7.417,46	-	-	-	1	1.830,62	10	61.984,69						
26	SULAWESI TENGAH	16	91437,17	4	14.832,20	-	-	-	-	-	1	984,00	1	67,87	22	107.321,24					
27	SULAWESI SELATAN	7	31428,29	1	28.359,50	-	-	-	-	1	17.239,28	-	-	-	-	9	77.057,07				
28	SULAWESI TENGGARA	20	78439,47	1	12.563,10	-	1	3.066,36	2	160,75	1	14,12	25	94.243,80							
29	GORONTALO	7	30357,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	30.357,24	
30	SULAWESI BARAT	1	33,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,55	
31	MALUKU	18	13435,45	-	-	1	15,49	1	1.131,84	1	12,25	21	14.595,03								
32	MALUKU UTARA	84	310017,80	1	5.464,42	-	-	4	7.577,64	6	22.649,84	95	345.709,70								
33	PAPUA BARAT	7	78491,94	-	3	29.384,47	-	-	-	-	1	3.776,73	11	111.653,14							
34	PAPUA	28	106772,48	-	-	-	-	-	-	-	2	99,21	30	106.871,69							
	TOTAL	653	3.812.008,40	26	724.832,37	28	84.312,87	12	28.709,69	23	76.054,86	38	121.276,38	780	4.847.185,57						

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pihak Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/d 31 Desember 2022

VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

TABEL VI.2 PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG) S/D DESEMBER 2022

NO	PROVINSI	S/D 2017			2018			2019			2020			2021			2022			TOTAL (Ha)		
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	15	16	
1	ACEH	-	-	1	10,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,72	
2	SUMATERA UTARA	2	2.372,00	-	-	1	5.110,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	133,90	5	7.616,62		
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	SUMATERA SELATAN	2	99,30	-	-	-	-	1	3.185,46	-	-	-	-	-	1	679,00	4	3.963,76				
7	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,00	1	50,00				
8	BENGKULU	1	164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	164,00			
9	BANGKA BELITUNG	1	1.081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.081,00		
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	JAWA BARAT	5	128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19,90	6	147,90			
13	JAWA TENGAH	2	50,27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	493,46	-	-	-	-	3	543,73			
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	JAWA TIMUR	2	17,54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.303,00	-	-	-	-	3	1.320,54			
16	BANTEN	2	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,95	-	-	-	-	3	16,71			
17	BALI	1	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,28			
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.009,33	1	26,16	2	8.035,49					
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	1	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,50			
20	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,01	1	1,01				
23	KALIMANTAN TIMUR	1	23.870,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.419,84	2	25.290,12					
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.375,66	2	1.375,66					
25	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.079,33	1	3.079,33					
27	SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,02	1	4,02					
28	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71,40	1	4,15	2	75,55					
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52,51	1	52,51					
33	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.985,59	1	31.985,59					
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.985,59	1	31.985,59					
TOTAL		19	27.816,43	1	10,72	2	5.113,22	1	3.185,46	5	9.885,14	15	38.831,07	43	84.842,04							

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan izin Pinjaman Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2022

VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

TABEL VI.3 PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2022

NO	PROVINSI	S/D 2017			2018			2019			2020			2021			2022			TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	15	
1	1 ACEH	2	444,42	-	-	-	-	-	-	1	256,46	1	335,71	-	-	-	-	-	-	3	780,13
2	2 SUMATERA UTARA	2	19,39	1	5,78	1	484,51	2	-	1	27,87	-	-	-	-	-	-	-	-	7	794,01
3	3 SUMATERA BARAT	9	1.621,89	-	-	1	348,62	-	-	1	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.973,81
4	4 RIAU	11	6.022,52	1	203,79	6	1.349,81	1	3,30	2	1.054,30	8	1.445,18	-	-	-	-	-	-	29	10.078,90
5	5 JAMBI	43	4.663,89	2	113,84	1	822,18	5	983,42	8	703,32	6	423,93	65	7.710,59	-	-	-	-	-	-
6	6 SUMATERA SELATAN	37	7.733,31	2	273,13	3	344,77	7	16.407,62	12	4.580,83	8	1.729,23	69	31.068,89	-	-	-	-	-	-
7	7 BENGKULU	3	2.115,10	-	-	1	700,00	1	570,37	-	-	2	408,90	7	3.794,37	-	-	-	-	-	-
8	8 LAMPUNG	7	202,42	-	-	-	-	-	-	1	45,01	-	-	-	-	-	-	-	-	8	247,43
9	9 BANGKA BELITUNG	17	5.233,94	-	-	5	590,43	3	244,22	8	1.092,99	2	203,52	35	7.365,10	-	-	-	-	-	-
10	10 KEPULAUAN RIAU	1	56,66	-	-	-	-	2	137,99	-	-	1	1.078,11	4	1.272,76	-	-	-	-	-	-
11	11 DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12 JAWA BARAT	12	1.693,14	2	9,60	10	195,47	10	176,80	12	181,35	7	315,50	53	2.571,87	-	-	-	-	-	-
13	13 JAWA TENGAH	9	207,70	2	150,14	3	231,71	2	7,95	3	6,15	3	166,06	22	769,71	-	-	-	-	-	-
14	14 DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	15 JAWA TIMUR	17	1.397,46	1	9,35	4	958,47	2	8,01	4	109,32	5	447,78	33	2.930,39	-	-	-	-	-	-
16	16 BANTEN	1	16,00	1	62,71	-	-	-	-	2	54,07	-	-	-	-	-	-	-	4	132,78	
17	17 BALI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
18	18 NUSA TENGGARA BARAT	-	-	1	6.417,30	2	546,93	1	51,13	-	-	-	-	2	1.160,23	6	8.175,59	-	-	-	
19	19 NUSA TENGGARA TIMUR	3	771,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,08	4	776,27	-	-	-	-	-
20	20 KALIMANTAN BARAT	6	1.160,45	2	1.285,77	-	-	-	-	3	859,22	7	4.751,65	18	8.057,09	-	-	-	-	-	-
21	21 KALIMANTAN TENGAH	54	49.758,44	21	17.717,41	12	10.478,10	13	5.076,29	15	10.156,63	33	28.115,27	148	121.302,14	-	-	-	-	-	-
22	22 KALIMANTAN SELATAN	49	15.347,15	12	4.019,10	14	6.195,87	14	3.355,27	17	4.273,35	28	27.689,70	134	60.880,44	-	-	-	-	-	-
23	23 KALIMANTAN TIMUR	70	106.436,46	7	11.086,46	9	6.390,92	17	6.824,85	22	25.949,41	26	40.894,82	151	197.572,82	-	-	-	-	-	-
24	24 KALIMANTAN UTARA	5	8.243,56	1	33,47	3	2.504,81	-	-	2	986,38	5	3.069,05	16	14.837,27	-	-	-	-	-	-
25	25 SULAWESI UTARA	6	2.279,46	2	149,30	1	99,99	1	187,91	-	-	2	410,83	12	3.127,49	-	-	-	-	-	-
26	26 SULAWESI TENGAH	5	3.592,62	3	1.327,96	5	2.889,99	6	3.146,03	9	1.968,08	18	20.981,26	46	33.905,94	-	-	-	-	-	-
27	27 SULAWESI SELATAN	14	471,52	4	468,87	4	1.674,18	2	8.164,08	1	3.730,47	1	1.65	26	14.510,77	-	-	-	-	-	-
28	28 SULAWESI TENGGARA	27	13.786,46	7	1.329,55	6	2.148,99	8	7.687,56	16	15.559,49	20	5.632,94	84	46.144,08	-	-	-	-	-	-
29	29 GORONTALO	-	1	999,35	1	93,70	-	-	1	789,28	2	1.228,31	5	3.110,64	-	-	-	-	-	-	-
30	30 SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	603,50	-	-	-	-	-	-	-	1	603,50	-
31	31 MALUKU	4	708,41	-	-	-	-	-	-	2	723,94	1	21,40	7	1.453,75	-	-	-	-	-	-
32	32 MALUKU UTARA	24	13.819,66	3	981,31	5	1.638,50	8	3.126,86	9	2.676,74	16	8.099,02	65	30.342,09	-	-	-	-	-	-
33	33 PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.808,81	1	3.808,81	-	-	-	-	-
34	34 PAPUA BARAT	3	137,30	-	-	2	10,92	1	603,24	2	64,79	3	1.077,93	11	1.894,18	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	442	247.940,53	76	46.644,18	99	40.697,87	106	57.019,35	155	76.535,51	208	153.156,16	1.086	621.993,61						

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2022

VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

TABEL VI.4. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S/D DESEMBER 2022

NO	PROVINSI	S/D 2017			2018			2019			2020			2021			2022			TOTAL (Ha)		
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas			
1	ACEH	7	1.313,12	1	39,14	2	31,02	-	-	-	-	-	-	1	28,90	11	14	14	15	16	1.412,18	
2	SUMATERA UTARA	52	5.569,32	4	165,91	6	264,08	9	556,79	5	711,97	5	532,30	81	7.800,38							
3	SUMATERA BARAT	18	589,18	1	16,57	5	382,45	1	11,03	2	72,10	3	64,56	30	1.135,88							
4	RIAU	5	12.927,79	1	-	1	133,74	2	52,52	1	67,60	1	90,50	11	13.272,15							
5	JAMBI	2	198,55	-	-	-	1	71,91	2	59,43	-	-	-	5	329,89							
6	SUMATERA SELATAN	12	984,67	3	71,63	2	243,22	1	317,27	1	102,51	6	209,53	25	1.928,83							
7	BENGKULU	9	294,70	1	37,64	2	143,81	2	148,82	-	-	-	-	14	624,97							
8	LAMPUNG	4	127,40	-	-	-	2	190,30	1	81,58	3	63,62	10	462,90								
9	BANGKA BELITUNG	5	86,38	1	18,47	-	-	-	1	9,72	1	3,49	8	118,06								
10	KEPULAUAN RIAU	5	134,93	3	229,87	2	76,68	3	20,43	1	286,81	1	10,86	15	759,58							
11	DKI JAKARTA	3	16,22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,91	4	26,13							
12	JAWA BARAT	21	1.052,88	8	587,65	5	226,91	4	346,24	3	14,75	11	1520,91	52	3.749,34							
13	JAWA TENGAH	33	492,66	5	292,96	4	252,88	4	71,35	3	84,38	2	225,46	51	1.419,69							
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	1	42,45	-	-	1	330,14	2	372,59								
15	JAWA TIMUR	12	583,91	3	92,02	5	487,74	6	575,99	6	874,59	6	656,13	38	3.270,38							
16	BANTEN	2	202,20	1	25,65	-	-	-	-	-	-	1	0,94	4	228,79							
17	BALI	17	60,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	60,24							
18	NUSA TENGGARA BARAT	14	931,65	2	266,84	1	14,22	-	-	-	-	-	-	17	1.212,71							
19	NUSA TENGGARA TIMUR	8	166,90	1	34,87	1	0,66	1	55,69	2	126,69	-	-	13	384,81							
20	KALIMANTAN BARAT	6	12.022,82	-	3	902,20	-	2	46,21	1	46,96	12	13.018,19									
21	KALIMANTAN TENGAH	2	1.363,75	-	3	3.094,05	3	277,75	1	223,80	3	707,39	12	5.666,74								
22	KALIMANTAN SELATAN	3	255,45	1	0,11	1	50,10	1	826,84	-	-	2	321,62	8	1.454,12							
23	KALIMANTAN TIMUR	8	154,26	1	30,02	1	105,60	-	2	147,51	4	422,25	16	859,64								
24	KALIMANTAN UTARA	4	2.292,60	1	135,22	2	7,64	1	10,36	4	1.317,95	2	245,64	14	4.009,41							
25	SULAWESI UTARA	2	0,52	1	13,51	-	-	-	1	340,25	2	516,88	6	871,16								
26	SULAWESI TENGAH	15	1.172,36	2	42,18	3	19,78	2	86,78	2	240,01	2	153,76	26	1.714,88							
27	SULAWESI SELATAN	13	1.232,46	-	-	-	1	3,11	1	0,62	2	39,17	17	1.275,36								
28	SULAWESI TENGGARA	5	120,15	-	-	-	4	2.274,25	-	-	2	56,42	11	2.452,82								
29	GORONTALO	5	213,17	-	2	4,12	1	57,71	-	-	2	28,17	10	303,17								
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	1	490,19	-	-	1	18,39	2	508,58								
31	MALUKU	1	53,97	1	32,43	-	1	94,84	1	53,18	5	1.023,20	9	1.257,62								
32	MALUKU UTARA	-	-	1	11,72	1	14,86	1	7,03	1	196,34	-	-	4	229,95							
33	PAPUA	9	2.582,88	-	-	-	2	72,04	1	10,32	1	76,97	13	2.742,21								
34	PAPUA BARAT	2	6.372,63	-	-	-	1	11,45	-	-	-	-	3	6.384,08								
	TOTAL	304	53.369,71	43	2.144,41	52	6.455,77	56	6.673,15	44	5.068,31	72	7.406,07	571	81.317,42							

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berlaku karena adanya perpanjangan izin Pijiam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2022

VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

TABEL VI.5 PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)

PROVINSI	S/D 2017			2018			2019			2020			2021			2022			TOTAL	
	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
BALI	1	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,50
BANTEN	1	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,01
DKI JAKARTA	2	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,18
JAWA BARAT	68	5.786,06	2	63,50	2	39,51	3	46,53	1	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-	76	5.944,10
JAWA TENGAH	31	1.458,23	-	-	-	-	-	-	-	5	84,39	-	-	-	-	-	-	-	36	1.542,62
JAWA TIMUR	41	3.497,97	-	-	-	-	-	-	-	5	274,75	1	53,09	-	-	-	-	-	47	3.825,81
LAMPUNG	9	355,96	-	-	1	189,72	-	-	-	1	100,40	-	-	-	-	-	-	-	11	646,08
SUMATERA UTARA	1	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104,00
Grand Total	154	11.225,92	2	63,50	3	229,23	3	46,53	12	468,03	1	53,09	175	12.086,30						

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Perpanjangan izin Pengelolaan Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2022

VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH)

TABEL VI. 6 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH)

No	Provinsi	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		TAMBANG	NON TAMBANG	TAMBANG	NON TAMBANG						
1	Aceh	-	326.051.929	712.250.000	189.804.000	-	189.804.000	-	189.804.000	-	52.572.000
2	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	1.504.000	-
3	Bengkulu	15.353.981.936	1.009.174.973	3.610.140.861	725.614.342	6.343.942.150	1.075.608.693	4.766.044.543	768.284.981	3.444.548.516	666.021.050
4	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	580.066.240	-	-
5	Dki Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	214.056.000	-	-
6	Gorontalo	2.295.597.500	516.739.313	3.099.854.343	396.048.424	1.643.024.979	423.660.000	10.443.698.300	524.935.840	4.078.993.450	499.158.156
7	Jambi	7.979.439.949	2.186.922.695	5.060.277.897	2.232.225.831	11.811.612.732	1.790.136.000	9.882.240.150	1.736.343.296	4.255.725.600	524.441.280
8	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	232.255.200	-	15.697.600
9	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	332.978.176	-	-
10	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	88.063.140	-	-
11	Kalimantan Barat	2.236.252.281	388.320.000	1.261.018.150	388.320.000	5.867.009.864	388.400.294	22.849.956.069	338.431.594	2.479.365.000	222.899.840
12	Kalimantan Selatan	350.850.290.174	1.710.000	397.555.403.898	1.899.105	480.695.352.978	1.710.000	577.163.423.393	635.918.000	69.834.355.589	-
13	Kalimantan Tengah	221.545.703.621	616.726.400	182.079.556.510	677.158.400	285.505.997.827	451.284.160	405.238.043.399	606.816.000	192.186.154.713	522.448.000
14	Kalimantan Timur	863.266.355.837	3.787.964.800	701.772.334.193	4.088.750.753	1.025.144.230.401	16.173.051.360	1.066.808.453.069	4.853.233.451	297.829.329.122	60.180.000
15	Kalimantan Utara	43.643.806.059	293.064.631	29.604.552.388	3.190.189.754	84.931.995.292	1.512.752.000	65.153.55.867	1.411.698.624	52.085.073.740	-
16	Republik Demokratik Bolivia	7.488.108.107	38.492.000	8.491.476.626	38.492.000	8.184.544.788	40.858.760	6.770.055.980	45.408.000	2.351.124.500	157.548.000
17	Kepulauan Riau	4.594.774.185	269.321.441	4.528.287.020	187.915.659	5.696.020.566	187.667.546	4.750.203.880	188.769.329	-	65.425.624
18	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	23.120.000	-	-
19	Maluku	1.856.400.578	18.176.000	860.765.694	19.125.176	798.175.000	467.137.146	902.082.324	260.568.000	41.888.000	-
20	Maluku Utara	111.805.586.580	-	74.828.851.569	11.248.000	89.222.605.327	341.109.630	116.232.096.374	327.124.800	14.852.872.758	11.248.000
21	Nusa Tenggara Barat	33.224.543.750	125.489.511	34.096.437.500	125.490.281	35.284.547.500	132.203.965	33.630.077.465	111.618.281	2.333.600.500	6.360.000
22	Nusa Tenggara Timur	-	202.111.200	-	204.339.168	223.216.374	245.192.256	18.491.200	240.736.320	-	184.407.200
23	Papua	53.514.833.200	1.759.809.200	211.796.039.279	1.799.809.200	26.171.717.619	1.497.787.120	26.171.717.619	26.649.131.701	517.173.981	-
24	Papua Barat	2.625.700.000	1.669.226.501	3.342.539.201	331.896.801	3.409.560.000	-	4.656.637.500	14.883.260.800	1.012.327.050	1.231.575.812
25	Riau	22.505.592.077	2.363.313.695	4.808.420.782	9.708.096.839	16.953.671.725	4.942.099.994	22.490.413.275	4.481.211.477	4.495.039.500	1.250.714.560
26	Sulawesi Barat	4.950.495	363.393.360	4.2.124.215	356.268.000	18.181.820	356.268.000	-	-	-	40.458.000
27	Sulawesi Selatan	198.703.684.210	736.460.081	67.616.463.272	671.782.989	81.020.753.286	584.600.550	59.199.774.544	565.635.761	9.523.369.116	632.836.000
28	Sulawesi Tengah	41.220.957.187	3.144.165.839	42.877.004.443	2.499.442.273	64.607.632.474	1.258.415.794	63.359.248.985	2.263.404.034	28.572.422.050	352.500.000
29	Sulawesi Tenggara	57.395.811.908	362.531.892	60.639.389.516	235.605.209	71.518.228.811	184.908.954	146.157.227.169	243.838.550	57.152.426.118	115.876.000
30	Sulawesi Utara	7.815.608.604	852.949.510	5.95.516.830	829.937.750	6.114.496.062	981.252.160	13.664.855.288	850.017.750	3.993.791.382	30.900.000
31	Sumatera Barat	1.668.759.436	326.024.00	3.238.095.277	203.568.000	2.123.968.842	556.524.288	11.987.940.950	766.318.825	1.143.755.300	1.500.000
32	Sumatera Selatan	38.692.809.963	5.201.891.852	37.592.957.798	5.170.766.870	105.747.798.068	16.174.205.172	146.633.929.639	7.916.492.963	14.882.295.829	4.486.314.016
33	Sumatera Utara	1.618.354.453	3.130.960.942	3.29.565.824	2.838.388.844	2.888.122.245	2.853.188.753	1.604.010.750	3.221.230.530	-	1.548.673.440
TOTAL		2.091.907.902.070	29.660.991.865	1.883.765.413.085	37.122.183.678	2.421.926.406.710	52.946.956.835	2.820.533.277.732	51.670.275.563	767.065.631.814	12.680.254.618

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d Desember 2022



STATISTIK
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2022

KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT & DOKUMEN LINGKUNGAN

DIREKTORAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
USAHA DAN KEGIATAN

**VII. KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT
& DOKUMEN LINGKUNGAN**

TABEL VII.1. DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DAN IZIN LINGKUNGAN (UKL-UPL) TAHUN 2013-2022

No	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Survei Seismik	Rekomendasi SKIL PKPLH	21 21 -	- 7 -	7 3 -	5 3 -	3 5 -	4 5 -	4 5 -	- 4 -	
2	Pemboran	Rekomendasi SKIL PKPLH	20 20 -	- 2 -	- 8 -	6 6 -	3 4 -	6 6 -	4 6 -	4 5 12	
3	Ketenagalistrikan	Rekomendasi SKIL PKPLH	1 1 -	- 1 -	- 1 -	1 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 35	
4	Normalisasi Sungai	Rekomendasi SKIL PKPLH	- -	- 1	- 1	- 1	- 2	- -	- -	- -	- -
5	Kabel Laut	Rekomendasi SKIL PKPLH	3 3 -	- 3 -	3 4 -	- 4 -	9 4 -	3 0 -	3 0 -	- 2 -	
6	Pipa Minyak dan/atau Gas	Rekomendasi SKIL PKPLH	3 3 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	1 1 1	1 1 2	- - -	- - 10	
7	Pelabuhan	Rekomendasi SKIL PKPLH	3 3 -	- 3 -	- 4 -	- 4 -	- 4 -	9 0 -	3 0 -	- 2 5	
8	Tambang	Rekomendasi SKIL PKPLH	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 2 5	
9	Pekerjaan Umum	Rekomendasi SKIL PKPLH	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	
10	Industri	Rekomendasi SKIL PKPLH	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	32 8	
11	LB3	Rekomendasi SKIL PKPLH	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	18	
12	Fuel Terminal Bahan Bakar/DPPU	Rekomendasi SKIL PKPLH	- 0 2	- 11 11	- 18 18	- 13 15	- 16 13	- 18 14	- 11 11	- 15 33	102 - 247
	JUMLAH	PKPLH									

Keterangan:

SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan
PKPLH : Perintah Kesiangan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2022

VII. KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT & DOKUMEN LINGKUNGAN

TABEL VII.2 DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN (AMDAL) TAHUN 2013-2022

No.	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Minyak dan Gas (Migas)	SKKL SKIL	20 24	20 26	6 15	8 16	7 15	8 14	16 17	16 21	65 -	
2	Limbah B3	SKKL SKIL	6 6	6 6	2 3	1 4	5 3	4 3	6 3	0 4	45 9	
3	Ketenagalistrikan	SKKL SKIL	2 2	3 4	1 4	2 2	3 3	3 3	4 0	3 0	28 -	
4	Pertambangan	SKKL SKIL	2 2	5 5	2 4	- 2	1 2	4 2	2 2	2 2	30 -	
5	Pelabuhan	SKKL SKIL	2 2	3 3	2 2	4 5	19 20	3 0	6 0	6 0	7 -	
6	Bandara	SKKL SKIL	2 2	5 6	- 1	1 4	4 1	4 4	6 6	6 -	1 1	
7	Kereta Api	SKKL SKIL	1 1	1 1	- -	2 3	- 1	1 1	0 -	0 -	0 -	
8	Nukir	SKKL SKIL	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	0 0	
9	Bendungan	SKKL SKIL	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	0 0	
10	Pekerjaan Umum	SKKL	-	-	-	-	-	-	-	-	6 -	
11	Normalisasi Sungai	SKKL SKIL	- -	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
12	Geothermal (Panas Bumi)	SKKL SKIL	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1	3 -	
13	Jembatan	SKKL SKIL	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 0	
14	Reklamasi	SKKL IL	- -	0 0								
15	Sistem Komunikasi	SKKL IL	- -	3 1								
16	Kawasan Industri	SKKL SKIL	- -	6 1								
17	Kehutanan	SKKL	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	
18	perkebunan	SKKL	-	-	-	-	-	-	-	-	6 1	
19	kesehatan	SKKL SKIL	- -	1 1								
20	Industri	SKKL IL	- -	18 4								
	JUMLAH	SKKL SKIL	37 41	47 55	13 29	20 36	39 47	24 37	40 19	39 25	93 -	161 -

Keterangan:

SKKL : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan

SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2022

VII. KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT & DOKUMEN LINGKUNGAN

TABEL VII.3 PERKEMBANGAN PENERAPAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

No	Jenis Kegiatan	s/d Tahun 2018	s/d Tahun 2019	s/d Tahun 2020	s/d Tahun 2021	s/d Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Audit Lingkungan Hidup Wajib Karena Ketidaktaatan	2	2	2	2	3
2.	Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala	16	23	32	47	55

Keterangan: Audit : Pihak yang diaudit
Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2022

TABEL VII.4 PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN

No	Jenis Kegiatan	s/d Tahun 2015	s/d Tahun 2016	s/d Tahun 2017	s/d Tahun 2018	s/d Tahun 2019	s/d Tahun 2020	s/d Tahun 2021	s/d Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Jumlah Kegiatan Penilaian DEI/H/DPLH								
1.	Penerapan kebijakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan	6	32	33	37	41	49	61	70
B.	Jumlah Kasus dan Permasalahan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan								
1.	Penanganan permasalahan dokumen lingkungan dan Persetujuan lingkungan				17	21	28	34	35

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2022

TABEL VII.5 DAFTAR JUMLAH KOMISI PENILAI AMDAL DI INDONESIA

No	Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah KPA berlisensi	237	249	249	249	249	247	247	247

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2022

VII. KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT & DOKUMEN LINGKUNGAN



STATISTIK
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2022

KLHS DAN EKOREGION

DIREKTORAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

TABEL VIII.1 JUMLAH SATUAN DAN LUAS EKOREGION PULAU

NO	PULAU		NAMA KELAS	KODE	LUAS AREA (Km ²)
1	2	3		4	5
1	Sumatera	1	Dataran Pantai Timur Sumatera & Dataran Pantai Barat Sumatera	M	7.234,51
		2	Dataran Gambut Sumatera	O1	74.591,63
		3	Dataran Fluvial Sumatera	F	82.957,24
		4	Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	D3	17.686,47
		5	Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan	S32	46.117,95
		6	Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan	V3	42.224,88
		7	Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung - Natuna	D2	1.200,96
		8	Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan, Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Riau	S23	94.312,69
		9	Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan		17.828,19
		10	Pegunungan Jalur Bukit Barisan		78.029,39
		11	Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan		11.345,90
			TOTAL		473.529,81
2	Jawa	1	Dataran Pantai Utara Jawa & Dataran Pantai Selatan Jawa	M1 & M2	2.448,11
		2	Dataran Fluvial Jawa	F	21.519,82
		3	Dataran Organik/Koral Jawa	O2	156,84
		4	Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung		20.506,47
		5	Dataran Struktural Blok Selatan Jawa & Dataran Struktural Jalur Bogor-Kendeng-Rembang	S31 & S32	12.079,49
		6	Perbukitan Karst Jalur Pangandaran-Karangbolong-Gunung Sewu-Blamongan & Perbukitan Karst Jalur Bogor-Kendeng-Rembang	K1	5.196,36
		7	Perbukitan Denudasional Jawa	D2	531,69
		8	Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	V2	21.650,09
		9	Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa	S21	30.182,14
		10	Pegunungan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	V1	13.458,43
		11	Pegunungan Struktural Blok Selatan Jawa & Pegunungan Struktural Jalur Bogor-Kendeng-Rembang	S11 & S12	4.548,56
			TOTAL		132.278,00
3	Kalimantan	1	Dataran Pantai Kalimantan	M	12.706,06
		2	Dataran Fluvial Kalimantan	F	95.683,99
		3	Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Matahakam	O1	44.558,06
		4	Dataran Struktural Kompleks Meratus	S3	38.685,40
		5	Perbukitan Karst Kalimantan	K2	9.811,23
		6	Perbukitan Denudasional Kalimantan	D2	27.617,29
		7	Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	S2	144.914,56
		8	Pegunungan Denudasional Kalimantan	D1	7.901,34
		9	Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	S1	147.986,23
			TOTAL		3.790,16
					533.659,32

VIII. KLHS DAN EKOREGION

NO	PULAU		NAMA KELAS	KODE	LUAS AREA (Km ²)
1	2	3	4	5	
4	Bali & Nusa Tenggara	1	Dataran Pantai Bali Nusa Tenggara	M	67,73
		2	Dataran Fluvial Bali Nusa Tenggara	F	3.582,99
		3	Dataran Organik/Koral Bali Nusa Tenggara	O2	4.111,46
		4	Dataran Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V3	1.045,82
		5	Perbukitan Karst Bali Nusa Tenggara	K2	3.385,91
		6	Perbukitan Struktural Bali Nusa Tenggara	S2	3.889,32
		7	Perbukitan Denudasional Bali Nusa Tenggara	D2	4.603,57
		8	Perbukitan Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V2	4.836,78
		9	Pegunungan Struktural Bali Nusa Tenggara	S1	18.407,04
		10	Pegunungan Denudasional Bali Nusa Tenggara	D1	8.279,94
		11	Pegunungan Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V1	19.476,15
			TOTAL		71.686,71
5	Sulawesi	1	Dataran Pantai Sulawesi	M	2.359,53
		2	Dataran Fluvial Sulawesi	F	21.413,52
		3	Dataran Organik/Koral Sulawesi	O1	974,29
		4	Dataran Struktural Sulawesi	S3	100,60
		5	Dataran Vulkanik Kompleks Manado	V1	337,02
		6	Perbukitan Denudasional Sulawesi	D2	1.648,04
		7	Perbukitan Karst Sulawesi	K2	14.165,73
		8	Perbukitan Struktural Sulawesi	S2	36.479,26
		9	Perbukitan Vulkanik Kompleks Manado dan Kompleks Makassar	V21 & V22	3.855,74
		10	Pegunungan Struktural Sulawesi	S1	99.831,95
		11	Pegunungan Vulkanik Kompleks Manado dan Kompleks Makassar	V11 & V12	3.815,64
			TOTAL		184.981,32
6	Maluku	1	Dataran Pantai Maluku	M	2.284,96
		2	Dataran Fluvial Maluku	F	5.032,38
		3	Dataran Karst Maluku	K3	1.061,99
		4	Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula-Buru-Seram	S32	1.334,64
		5	Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	V31	74,18
		6	Perbukitan Karst Maluku	K2	17.383,02
		7	Perbukitan Denudasional Maluku	D2	2.938,27
		8	Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera & Kepulauan Sula-Buru-Seram	S21 & S22	10.185,82
		9	Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama dan Kompleks Banda	V21 & V22	4.726,49
		10	Pegunungan Denudasional Maluku	D1	5.001,07
		11	Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera & Kompleks Kepulauan Sula-Buru-Seram	S11 & S12	26.710,88
		12	Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	V1	1.058,57
			TOTAL		77.792,27

NO	PULAU		NAMA KELAS	KODE	LUAS AREA (Km ²)
1	2	3	4	5	
7	Papua	1	Dataran Fluvial Utara Papua, Barat Papua & Selatan Papua	M1, M2 & M3	119.990,48
		2	Dataran Fluvial Mamberamo, Kokonao-Digul, Seget-Bintuni dan Nabire-Sarmi	F1, F2, F3 & F4	36.398,10
		3	Dataran Gambut Mamberamo, Kokonao-Digul, Seget-Bintuni & Nabire-Sarmi	G1, G2, G3 & G4	35.394,06
		4	Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	O2	497,18
		5	Dataran Struktural Jalur Jayawijaya & Jalur Utara	S31 & S32	12.664,30
		6	Perbukitan Karst Jalur Jayawijaya dan Jalur Utara	K	31.125,74
		7	Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya dan Jalur Utara	S21 & S22	51.114,53
		8	Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya & Jalur Utara	S11 & S12	121.072,33
		9	Pegunungan Glasial	G	3.306,58
			TOTAL		411.563,30
			TOTAL KESELURUHAN		1.885.490,73

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

VIII. KLHS DAN EKOREGION

TABEL VIII.2 LUAS WILAYAH EKOREGION LAUT

NO	WILAYAH EKOREGION	LUAS (km ²)
1	2	3
1	Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera	782.861
2	Samudera Hindia Sebelah Selatan Java	655.549
3	Selat Malaka	111.343
4	Laut Natuna	360.402
5	Selat Karimata	270.859
6	Laut Jawa	437.978
7	Laut Sulawesi	323.866
8	Selat Makasar	288.005
9	Perairan Bali dan Nusa Tenggara	625.018
10	Teluk Tomini	70.020
11	Laut Halmahera	451.955
12	Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi	160.361
13	Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi	169.160
14	Laut Seram dan Teluk Bintuni	140.040
15	Laut Banda	583.096
16	Samudera Pasifik sebelah Utara Papua	459.857
17	Teluk Cendrawasih	93.369
18	Laut Arafura	326.793
JUMLAH		6.310.532

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

TABEL VIII.3 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

No.	Provinsi	Pra Validasi		No. Surat	Tanggal Surat	Validasi
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi			
1	Jawa Tengah		S.1263/MENLHK/PDLKWS/PLA.3/10/2017	06/10/2017	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029	
2	DIY	Notulensi	03/08/2017	S.1535/PKTLPDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS PK RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta
2018						
3	Lampung	BA.2/PDLKWS/PLKHW/S/1/2018	26/01/2018	S.370/PKTLPDLKWS/PLA.3/04/2018	02/04/2018	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
4	Riau			S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11/04/2018	Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037
5	Nusa Tenggara Timur			S.584/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2018	24/05/2018	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur
6	GORONTALO			S.676/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25/06/2018	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030
2019						
7	DKI Jakarta	BA.27/PDLKWS/PLKHW/S/12/2018	20/12/2018	S.76/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2019	24/01/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2030
8	Nusa Tenggara Barat	BA.20/PDLKWS/PLKHW/S/12/2018	10/12/2018	S.513/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019	Validasi KLHS RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2030
9	Sumatera Barat	BA.09/PDLKWS/PLKHW/S/03/2019	11/03/2019	S.767/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.07/2019	22/07/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
10	Bali	BA.8/PDLKWS/PLKHW/S/7/2018	31/07/2018	S.862/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.08/2019	09/08/2019	Validasi KLHS Terhadap Revisi RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029
11	Revisi Sulawesi Selatan Substansi Kehutanan	BA.10/PDLKWS/PLKHW/S/3/2019 BA.16/PDLKWS/PLKHW/S/5/2019	29/03/2019 08/05/2019	S.466/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.05/2019	10/05/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Substansi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029
12	Sulawesi Selatan	BA.07/PDLKWS/PLKHW/S/3/2019	04/03/2019	S.598/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.05/2019	20/05/2019	Validasi KLHS RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029
13	Bengkulu	BA.15/PDLKWS/PLKHW/S/11/2018	12/11/2018	S.1122/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.09/2019	12/09/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032
14	Jawa Barat	BA.19/PDLKWS/PLKHW/S/6/2019	28/06/2019	S.1226/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.01/2019	07/10/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
15	Sulawesi Tenggara	BA.26/PDLKWS/PLKHW/S/11/2019 BA.31/PDLKWS/PLKHW/S/12/2019	01/11/2019 04/12/2019			
16	Sulawesi Tengah	BA.27/PDLKWS/PLKHW/S/11/2019	07/11/2019			
17	Sulawesi Tengah (Aralan Zonasi)	BA.31/PDLKWS/PLKHW/S/11/2019	28/11/2019			
18	PPFKH RTRW Sulawesi Tengah	BA.39/PDLKWS/PLKHW/S/09/2020	21/09/2020	S.1956/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.01/2020	18/11/2020	Validasi KLHS Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah
2020						

VIII. KLHS DAN EKOREGION

No.	Provinsi	Pra Validasi		Validasi		
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	
19	Jawa Timur	BA.04/PDLKWS/PKLHWS/06/2020	04/06/2020	S.2069/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2020	07/12/2020	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
20	Maluku Utara	BA.1/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	31/01/2020			
21	Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan RTRW	BA.38/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	19/12/2019			
22	Nusa Tenggara Barat Revisi	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	29/12/2020			
23	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kalimantan Utara	BA.5/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020			
24	Revisi RTRW Sulawesi Tengah	BA.27/PDLKWS/PKLHWS/11/2019	07/11/2019	S.462/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	04/01/2021	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tengah
25	Revisi RTRW Nusa Tenggara Barat	BA.4/PDLKWS/PKLHWS/09/2020	21/09/2020			
26	Revisi Papua Barat RTRW integrasi RZWP3K	BA.5/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020	S.497/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	04/06/2021	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2029
27	Kalimantan Selatan	BA.40/PDLKWS/KLHS/12/2021	10/12/2021	S.275/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	22/02/2022	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2035
28	Jawa Barat	BA.7/PDLKWS/KLHS/01/2022	24/01/2022	S.563/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	14/04/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
	Bali RTRW integrasi RZWP3K	BA.9/PDLKWS/KLHS/01/2022	01/03/2022	S.648/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	28/04/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Bali Tahun 2022-2042
	Banten	BA.8/PDLKWS/KLHS/02/2022	17/02/2022	S.1024/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2022	11/07/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Banten Tahun 2022-2042
	DKI Jakarta	BA.16/PDLKWS/KLHS/06/2022	29/06/2022	S.1136/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2022	29/07/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042
	Sulawesi Tengah	BA.17/PDLKWS/KLHS/08/2022	04/08/2022	S.1521/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2022	22/09/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2042
	Kalimantan Timur	BA.20/PDLKWS/KLHS/09/2022	15/09/2022	S.1680/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2022	14/10/2022	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2022-2042
	Jambi	BA.19/PDLKWS/KLHS/09/2022	05/09/2022	S.1749/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2022	28/10/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Jambi Tahun 2022-2042
	Kalimantan Tengah	BA.22/PDLKWS/KLHS/09/2022	20/09/2022	S.2113/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2022	30/12/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2042

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Data s/d Desember 2022

TABEL VIII.4 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN (RRTR)

No.	Provinsi	Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal	Validasi
2017							
1	RTR Kawasan Pantura DKI Jakarta			S.834/PKT/PLDKWS/PLA.3/5/2017	29/05/2017	Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura di DKI Jakarta	
2	RTR KSP Danau Limboto	BA.04/PDLKWS/PLKHLWS/06/2017	13/06/2017	S.1089/PKTU/PLDKWS/PLA.3/7/2017	28/07/2017	Validasi KLHS KSP Danau Limboto	
3	KSP Kota Gorontalo	BA.03/PDLKWS/PLKHLWS/06/2017	13/06/2017				
4	KSP Agropolitan Alas Utara Provinsi NTB	BA.05/PDLKWS/PLKHLWS/06/2017	13/06/2017				
5	KSP Agropolitan Ijen	BA.16/PDLKWS/PLKHLWS/11/2017	27/11/2017				
2018							
6	RTR KSP Danau Maninjau			S.678/MenLHK-PKTL/PLDKWS/PLA.3/6/2018	25/06/2018	Validasi KLHS RTR KSP Danau Maninjau	
7	KSP Pusat Bisnis Terpadu Sulawesi Selatan			S.1026/MENLHK-PKTL/PLDKWS/PLA.3/9/2018	14/09/2018	Validasi Terhadap KLHS RTR Kawasan Strategis Provinsi Pusat Bisnis Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan	
2019							
8	RTR KSP Rawa Batang Banyu, Kalimantan Selatan	BA.11/PDLKWS/PLKHLWS/10/2018	10/10/2018	S.132/MENLHK-PKTL/PLDKWS/PLA.3/2/2019	12/02/2019	Validasi KLHS RTR KSP Rawa Batang Banyu Tahun 2018-2038	
9	RTR KIO Maloy, Kalimantan Timur	BA.9/PDLKWS/PLKHLWS/8/2018	15/08/2018	S.146/MENLHK-PKTL/PLDKWS/PLA.3/2/2019	14/02/2019	Validasi KLHS RTR KSP KIO Maloy Provinsi Kalimantan Timur	
10	RRTR KSP KIPT Sadai	BA.14/PDLKWS/PLKHLWS/11/2018	12/11/2018	S.168/MENLHK-PKTL/PLDKWS/OTL.0/2/2019	26/02/2019		
11	RRTR SRS Kasultanan Yogyakarta	BA.18/PDLKWS/PLKHLWS/11/2018	19/11/2018	S.1227/MENLHK-PKTL/PLDKWS/OTL.0/10/2019	07/10/2019	Validasi KLHS Rencana Rinci Tata Ruang Satuan Ruang Strategis (RRTR SRS) Kasultanan dan Kadipaten Daerah Isti'mewa Yogyakarta Tahun 2018-2038	
12	RTR KSP Mandeh	BA.21/PDLKWS/PLKHLWS/08/2019	15/08/2019				
13	RRTR KSP Perbukitan Menoreh	BA.29/PDLKWS/PLKHLWS/11/2019	15/08/2019				
14	RRTR KSP Kawasan Perkotaan DIY	BA.35/PDLKWS/PLKHLWS/12/2019	16/12/2019				
15	RRTR KSP KUT - Tanjung Putri, reparatur Bangka	BA.34/PDLKWS/PLKHLWS/12/2019	16/12/2019				
16	RRTR KSP Matabe	BA.37/PDLKWS/PLKHLWS/12/2019	17/12/2019				
17	RRTR KSP Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Sadai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			S.168/MENLHK-PKTL/PLDKWS/OTL.0/2/2019	26/02/2019	Validasi KLHS RTR KSP Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Sadai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
2020							
18	KSP Danau Singkarak	BA.2/PDLKWS/PLKHLWS/2/2020	10/02/2019				
19	KSP Kepulauan Togean	BA.7/PDLKWS/PLKHLWS/11/2020	26/11/2019				
20	RTR KSP Perbukitan Menoreh	BA.3/PDLKWS/PLKHLWS/8/2020	13/08/2019				
21	KSP Kawasan Perkotaan DIY	BA.3/PDLKWS/PLKHLWS/8/2020	13/08/2019				

VIII. KLHS DAN EKOREGION

No.	Provinsi	Pra Validasi		No. Surat	Tanggal Surat	Validasi
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi			
22	RRTTR KSP Gugus Kepulauan Togean	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	26/11/2020	S.580/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	16/4/2021	Validasi KLHS RRTTR KSP Gugus Kepulauan Togean, Provinsi Sulawesi Tengah
23	Masterplan IKN	BA.3/PDLKWS/PKLHWS/2/2021	16/02/2021	S.321/MENLHK-PKTU/PDLKWS/PLA.3/2/2021	26/2/2021	Validasi KLHS Masterplan Ibu Kota Negara
2022						
24	RDTR KPN Entikong	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	19/05/2021	S.41/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Entikong Provinsi Kalimantan Barat
25	RDTR KPN Nangabadau dan Paloh-Aruk	BA.8/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	19/05/2021	S.36/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Nangabadau Provinsi Kalimantan Barat
26		BA.8/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	19/05/2021	S.35/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Paloh-Aruk Provinsi Kalimantan Barat
27	RDTR KPN Motamasin, Nusa Tenggara Timur	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	21/05/2021	S.39/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Motamasin Provinsi Nusa Tenggara Timur
28	RDTR KPN Motamaain dan RDTR KPN Wini	BA.11/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	21/05/2021	S.37/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Motamaain Provinsi Nusa Tenggara Timur
29		BA.11/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	21/05/2021	S.38/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Motamaain Provinsi Nusa Tenggara Timur
30	RDTR KPN Skouw Provinsi Papua	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	24/05/2021	S.40/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Skouw Provinsi Papua
31	Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat			S.272/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022	Validasi KLHS Dalam Rangka Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Provinsi Sumatera Selatan
32	RTR KSN Ibu Kota Nusantara	BA.13/PDLKWS/KLHS/3/2022	17/03/2022	S.502/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	08/04/2022	Validasi KLHS RTR KSN Ibu Kota Nusantara
33	RTR KSN BANJARBAKULA	BA.41/PDLKWS/PKLHWS/12/2021	23/12/2021	S.645/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	28/04/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjar Baru-Banjar-Bario Kuala-Tanah Laut (Banjarbakula)
34	RTR KSN TN KERinci SEBLAT	BA.2/PDLKWS/KLHS/01/2022	18/01/2022	S.789/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2022	24/5/2022	Validasi KLHS untuk Ranperpres RTR KSN Kerinci Seblat (TNKS)
35	RDTR KPN Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur	BA.4/PDLKWS/KLHS/01/2022	19/01/2022	S.872/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/6/2023	Validasi KLHS RDTR KPN Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
36	RDTR KPN Yeteikun di Provinsi Papua	BA.3/PDLKWS/KLHS/01/2022	19/01/2022	S.873/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/6/2024	Validasi KLHS RDTR KPN Yeteikun di Provinsi Papua
37	RDTR KPN Merauke di Provinsi Papua	BA.5/PDLKWS/KLHS/01/2022	20/01/2022	S.874/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/6/2025	Validasi KLHS RDTR KPN Merauke di Provinsi Papua
38	RDTR KPN di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis di Provinsi Riau	BA.6/PDLKWS/KLHS/01/2022	20/01/2022	S.875/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/6/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis di Provinsi Riau
39	RDRWP Provinsi DKI Jakarta			S.917/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	21/06/2022	Validasi KLHS RDTR Wilayah Perencanaan DKI Jakarta

No.	Provinsi	Pra Validasi		Validasi		
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	
40	RDTTR WP IKN WP Timur 1	BA.23/PDLKWS/KLHS/10/2022	18/10/2022	S.2050/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/12/2022	20/12/2022	Validasi KLHS RDTTR WP IKN WP Timur 1
41	RDTTR WP IKN WP Timur 2	BA.24/PDLKWS/KLHS/10/2022	18/10/2022	S.2051/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/12/2022	20/12/2022	Validasi KLHS RDTTR WP IKN WP Timur 2
42	RTR KSN Subak Bali Landscape	BA.10/PDLKWS/KLHS/03/2022	04/03/2022	S.1189/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/8/2022	05/08/2022	Validasi KLHS RTR KSN Subak Bali Landscape
43	RTR KSN Kawasan Cagar Budaya Muarajambi	BA.12/PDLKWS/KLHS/03/2022	04/03/2022	S.1190/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/8/2022	05/08/2022	Validasi KLHS RTR KSN Muarajambi
44	RTR KSN Kawasan Ecosystem Leuser	BA.11/PDLKWS/KLHS/03/2022	04/03/2022	S.1188/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/8/2022	05/08/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Ecosystem Leuser
45	RTR KSN Danau Limboto	BA.15/PDLKWS/KLHS/03/2022	23/06/2022	S.1423/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/9/2022	13/09/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Danau Limboto
46	RTR KSN Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung	BA.14/PDLKWS/KLHS/04/2022	19/04/2022	S.1774/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/11/2022	03/11/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung
47	RTR KSN Kawasan Candi Prambanan	BA.21/PDLKWS/KLHS/09/2022	19/09/2022	S.1983/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/12/2022	12/12/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Candi Prambanan
2023						
48	RTR Pulau Jawa Bali	BA.18/PDLKWS/KLHS/09/2022	09/02/2022	S.124/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/1/2023	20/01/2023	Validasi KLHS RTR Pulau Jawa Bali
49	RTR Pulau Sulawesi	BA.33/PDLKWS/KLHS/12/2022	15/12/2022	S.240/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/2/2023	13/02/2023	Validasi KLHS RTR Pulau Sulawesi
50	RDTTR Sei Pancang	BA.22/PDLKWS/KLHS/10/2022	10/10/2022	S.159/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.31/1/2023	31/01/2023	Validasi KLHS RDTTR KPN Sei Pancang

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2022

VIII. KLHS DAN EKOREGION

TABEL VIII.5 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR PULAU- PULAU KECIL (RZWP3K)

No.	Provinsi	Pra Validasi		Validasi		Perihal
		No. BA	Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	
2017						
1	Jawa Timur	BA.01/PDLKWS/PKLHWS/05/2017	31/05/2017	S.1371/PKTLPDKWSPLA.31/10/2017	06/10/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Jawa Timur
2	NTB	BA.13/PDLKWS/PKLHWS/09/2017	22/09/2017	S.1531/PKTLPDKWSPLA.31/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat
3	NTT			S.1570/PKTLPDKWSPLA.31/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Sulawesi Tengah	BA.11/PDLKWS/PKLHWS/7/2017	21/07/2017	S.1534/PKTLPDKWSPLA.31/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah
5	Sumatera Barat	BA.20/PDLKWS/PKLHWS/08/2019	07/08/2017	S.1669/PKTLPDKWSPLA.31/12/2017	21/12/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat
6	Jawa Tengah	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	10/07/2017	S.1670/PKTLPDKWSPLA.31/12/2017	21/12/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Jawa Tengah
7	Sulawesi Barat	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/08/2017	04/08/2017			
2018						
8	Lampung			S.166/PKTLPDLKWS/PLA.31/2/2018	12/02/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Lampung
9	Kalimantan Selatan	BA.07/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	05/07/2017	S.169/MENLHK-PKTLPDLKWS/PLA.3/2/2018	12/02/2018	Validasi KLHS RZWP3K Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038
10	Kalimantan Utara			S.414/MENLHK-PKTLPDLKWS/PLA.3/4/2018	11/04/2018	Validasi KLHS RZWP3K Kalimantan Utara Tahun 2017-2037
11	Jawa Barat	BA.06/PDLKWS/PKLHWS/4/2018	23/04/2018	S.775/MENLHK-PKTLPDLKWS/PLA.3/7/2018	12/07/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Jawa Barat
12	Gorontalo			S.675/MENLHK-PKTLPDLKWS/PLA.3/6/2018	25/06/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Gorontalo
13	Kalimantan Tengah	BA.03/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	30/11/2018	S.841/MENLHK-PKTLPDLKWS/PLA.3/8/2018	02/08/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah
14	Sulawesi Selatan	BA.04/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	19/02/2018	S.895/MENLHK-PKTLPDLKWS/PLA.3/8/2018	10/08/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan
15	DI Yogyakarta	BA.07/PDLKWS/PKLHWS/07/2018	26/07/2018	S.1244/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.Q/10/2018	30/10/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16	Kalimantan Barat	BA.17/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	14/11/2018			
17	Kepulauan Riau	BA.23/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	11/12/2018			
18	Papua Barat	BA.22/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	11/12/2018			
2019						
19	Bengkulu	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/10/2018	15/10/2018	S.80/MENLHK-PKTLPDLKWS/PLA.3/01/2019	24/01/2019	Validasi KLHS RZWP3K Bengkulu Tahun 2018-2038
20	Sumatera Utara	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	01/11/2018	S.77/MENLHK-PKTLPDLKWS/PLA.3/01/2019	24/01/2019	Validasi KLHS RZWP3K Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
21	Sulawesi Tenggara	BA.25/PDLKWS/PKLHWS/2/2018	13/12/2018	S.213/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.0/03/2019	06/03/2019	Validasi KLHS RZWP3K Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038
22	DKI Jakarta	BA.28/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	31/12/2018	S.338/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.0/04/2019	09/04/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi DKI Jakarta
23	Aceh	BA.21/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	11/12/2018	S.510/MENLHK-PKTLPDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019	Validasi KLHS RZWP3K Aceh Tahun 2018-2038
24	Sumatera Selatan	BA.04/PDLKWS/PKLHWS/02/2019	23/04/2018	S.902/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.0/8/2019	14/08/2019	Validasi KLHS RZWP3K Sumatera Selatan Tahun 2019-2039
25	Bangka Belitung	BA.05/PDLKWS/PKLHWS/4/2018	17/05/2019	S.938/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.0/8/2019	16/08/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039
26	Jambi	Natalensi	11/12/2018	S.1275/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.0/10/2019	14/10/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Jambi Tahun 2019-2039
27	Papua Barat	BA.22/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	31/07/2018	S.1490/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.0/11/2019	10/11/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat
28	Bali	BA.25/PDLKWS/PKLHWS/09/2019	26/08/2019	S.1612/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.0/12/2019	19/12/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Bali Tahun 2019-2039
29	Banten	BA.23/PDLKWS/PKLHWS/8/2019	15/11/2019			
30	Kepulauan Riau	Natulensi				
2020						
31	Kalimantan Timur	BA.18/PDLKWS/PKLHWS/06/2019	21/06/2019	S.1103/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.0/7/2020	31/07/2020	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039
32	Riau	BA.20/PDLKWS/PKLHWS/08/2019	07/08/2019	S.1563/MENLHK-PKTLPDLKWS/OTL.0/8/2020	26/08/2020	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Riau Tahun 2019-2039
33	Papua	BA.8/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	20/12/2019			

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2022

TABEL VIII.6 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	Provinsi	Pra Validasi		Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal	Validasi
		No. BA	Pra Validasi					
2018								
1	Jawa Barat	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/10/2018	08/10/2018	S.1331/MenLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.O/11/2018	23/11/2018	Validasi KLHS Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025		
2020								
2	Sumatera Barat			S.469/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.O/3/2020	13/03/2020	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025		

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2022

VIII. KLHS DAN EKOREGION

TABEL VIII.7 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

No.	Provinsi	Pra Validasi	No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal
2017							
1	Gorontalo	BA.14/PDLKWS/PIKLHWS/09/2017	28/09/2017	S.1533/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022	
2	Kepulauan Bangka Belitung	BA.24/PDLKWS/PIKLHWS/08/2019	30/08/2019	S.1536/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	
2018							
3	Sulawesi Utara			S.38/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2018	17/01/2018	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021	
4	DKI Jakarta	BA.4/PDLKWS/PIKLHWS/12/2018		S.344/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2018	27/03/2018	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022	
5	Sulawesi Barat			S.415/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11/04/2018	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022	
6	DI Yogyakarta			S.896/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10/08/2018	Validasi KLHS RPJMD DIY Tahun 2017-2022	
7	Jawa Tengah			S.1363/MENLHK PKTL/PDLKWS/OTL.01/12/2018	03/12/2018	Tanggapan terhadap Permohanan Validasi KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	
8	Jawa Barat	BA.19/PDLKWS/PIKLHWS/11/2018	26/11/2018	S.1472/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2018	27/12/2018	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	
9	Papua	BA.26/PDLKWS/PIKLHWS/12/2018	13/12/2018				
2019							
10	Sulawesi Tenggara	BA.24/PDLKWS/PIKLHWS/12/2018	13/12/2018	S.133/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019	12/02/2019	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara	
11	Sumatera Selatan	BA.01/PDLKWS/PIKLHWS/01/2019	11/01/2019	S.509/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	
12	Maluku	BA.05/PDLKWS/PIKLHWS/02/2019	19/02/2019	S.512/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024	
13	Lampung	BA.15/PDLKWS/PIKLHWS/04/2019	29/04/2019	S.859/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.08/2019	09/08/2019	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	
14	Jawa Timur	BA.02/PDLKWS/PIKLHWS/01/2019	14/01/2019	S.864/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.08/2019	09/08/2019	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023	
15	Riau	BA.08/PDLKWS/PIKLHWS/03/2019	08/03/2019	S.1115/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.09/2019	12/09/2019	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024	
16	Bangka Belitung	BA.24/PDLKWS/PIKLHWS/08/2019	30/08/2019	S.1634/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.01/12/2019	27/12/2019	Validasi KLHS RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	
17	Sulawesi Selatan	BA.6/PDLKWS/PIKLHWS/3/2019	04/03/2019				
18	Bali	BA.12/PDLKWS/PIKLHWS/4/2019	05/04/2019				
19	Nusa Tenggara Barat	BA.14/PDLKWS/PIKLHWS/04/2019	18/04/2019				
20	Banten	BA.22/PDLKWS/PIKLHWS/08/2019	26/08/2019				
21	Sulawesi Tengah	BA.28/PDLKWS/PIKLHWS/11/2019	07/11/2019				
22	Kalimantan Barat	BA.30/PDLKWS/PIKLHWS/11/2019	21/11/2019				
23	Maluku Utara	Notlensi	09/12/2019				
2020							
24	Kalimantan Timur	BA.11/PDLKWS/PIKLHWS/04/2019	01/04/2019	S.241/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/2/2020	10/02/2020	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023	
25	Nusa Tenggara Barat	BA.6/PDLKWS/PIKLHWS/1/2020	24/11/2020	S.469/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	04/05/2021		
26	Sulawesi Selatan	BA.9/PDLKWS/PIKLHWS/12/2020	07/12/2020				
2021							
27	Perubahan Kalimantan Barat	BA.1/PDLKWS/PIKLHWS/1/2021	01/12/2021				
28	Perubahan RPJMD Jawa Barat	BA.2/PDLKWS/PIKLHWS/2/2021	02/04/2021	S.717/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	13/04/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	
29	Perubahan RPJMD DKI Jakarta	BA.4/PDLKWS/PIKLHWS/3/2021	03/01/2021	S.716/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2021	10/02/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta	

No.	Provinsi	Pra Validasi	No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Validasi	Perihal
30	Nusa Tenggara Barat		S.469/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	05/04/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024			
31	Sumatera Barat	BA.6/PDLKWS/PLKHW/S/6/2021	22/4/2021	S.1553/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2021	15/09/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026		
32	Kalimantan Tengah	BA.14/PDLKWS/PLKHW/S/6/2021	06/06/2021					
33	Perutahan Jawa Tengah	BA.15/PDLKWS/PLKHW/S/6/2021	06/09/2021	S.1577/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2021	17/09/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		
34	Bengkulu	BA.17/PDLKWS/PLKHW/S/6/2021	25/6/2021	S.1698/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2021	07/10/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026		
35	Perutahan Sumatera Utara	BA.18/PDLKWS/PLKHW/S/6/2021	28/6/2021					
36	Perutahan Lampung	BA.19/PDLKWS/PLKHW/S/6/2021	30/06/2021	S.1552/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2021	15/09/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		
37	Kalimantan Selatan	BA.21/PDLKWS/PLKHW/S/6/2021	15/07/2021	S.2031/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2021	19/11/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026		
38	Perutahan Maluku	BA.25/PDLKWS/PLKHW/S/8/2021	27/8/2021	S.2032/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2021	19/11/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		
39	Perutahan Jawa Timur	BA.26/PDLKWS/PLKHW/S/9/2021	09/01/2021	S.2030/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2021	19/11/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024		
40	Jambi	BA.28/PDLKWS/PLKHW/S/9/2021	09/10/2021	S.2089/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2021	01/12/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026		
41		BA.35/PDLKWS/PLKHW/S/17/2021	11/05/2021					
42	Perutahan Kalimantan Timur	BA.29/PDLKWS/PLKHW/S/9/2021	09/10/2021					
43	Sulawesi Utara	BA.30/PDLKWS/PLKHW/S/9/2021	15/9/2021					
47	Riau	BA.36/PDLKWS/PLKHW/S/11/2021	11/09/2021					
2022								
48	Kalimantan Tengah	BA.14/PDLKWS/PLKHW/S/6/2021	06/06/2021	S.14/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	06/01/2022	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026		
49	Sulawesi Tengah	BA.20/PDLKWS/PLKHW/S/6/2021	30/06/2021	S.13/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	06/01/2022	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026		
	Sumatera Selatan	BA.32/PDLKWS/PLKHW/S/9/2021	30/9/2021	S.265/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023		
	Kepulauan Riau	BA.31/PDLKWS/PLKHW/S/9/2021	16/9/2021	S.46/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	11/01/2022	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026		
	Bali	BA.33/PDLKWS/PLKHW/S/10/2021	18/10/2021	S.266/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023		
	Kalimantan Timur	BA.29/PDLKWS/PLKHW/S/9/2021	09/10/2021	S.94/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	18/01/2022	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023		

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2022

VIII. KLHS DAN EKOREGION

TABEL VIII.8 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) FOOD ESTATE (FE)

No.	Provinsi	Pra Validasi		Validasi		Perihal
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	
2021						
1	KHKP Kalimantan Tengah	BA.5/PDLKWS/PKLHWS/3/2021	25/03/2021	S.10/17/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2021	16/06/2021	Validasi KLHS Rencana Penyedian Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah
2	BCLS Jambi	BA. 9/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	20/5/2021			
3	BCLS Kab. Merakue Papua	BA.22/PDLKWS/PKLHWS/8/2021	08/02/2021			
2022						
4	KHKP Bangka Belitung	BA.24/PDLKWS/PKLHWS/8/2021	27/08/2021	S.66/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	11/01/2022	Validasi KLHS Penyedian Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	KHKP Ketapang	BA.16/PDLKWS/PKLHWS/6/2021 BA.27/PDLKWS/PKLHWS/9/2021	17/06/2021 09/06/2021	S.267/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022	Validasi KLHS Penyedian Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate di Kabupaten Ketapang

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2022

TABEL VIII.9 KEGIATAN REVIEW DAN BIMBINGAN TEKNIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

No	Jenis Dokumen	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022					
		Hirarki			Hirarki			Hirarki			Hirarki			Hirarki					
		Nas	Prov	Kab/Kota	Nas	Prov	Kab/Kota	Nas	Prov	Kab/Kota	Nas	Prov	Kab/Kota	Nas	Prov	Kab/Kota			
<i>I Review KLHS (Telaahan dan Validasi)</i>																			
1	RPJMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-			
2	RPJPD	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-			
3	RPJMD	-	6	-	6	-	7	-	7	-	7	-	7	17	-	6			
4	KRP berdampak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	1	1		
5	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	4	-	4	-	7	-	7	-	7	-	17	-	17	-	6		
6	Rencana Rincii (RDTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	18	1		
7	Kawasan Strategis Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	-		
8	Kawasan Strategis Provinsi	-	2	-	2	-	5	-	5	-	5	-	5	-	1	-	-		
9	Kawasan Strategis Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Kawasan Strategis Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
11	Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
12	Laut Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Zonasi (RZWP3K)	-	8	-	8	-	10	-	10	-	10	-	10	-	-	-	-		
14	Reklamasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J U M L A H I			21	-	21	-	29	-	29	-	29	-	4	35	-	2	41	32	
<i>II Bintek KLHS</i>																			
1	RPJMN	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
2	RPJPD	-	-	-	-	10	-	10	10	-	10	10	4	-	-	5	-	5	
3	RPJMD	-	5	-	5	-	10	-	10	-	10	-	5	-	-	10	-	10	
4	KRP berdampak	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	
5	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	-	-	-	10	-	10	-	10	-	10	14	-	-	18	-	18	
6	Rencana Rincii (RDTR)	-	-	-	-	-	10	-	10	-	10	-	10	-	11	-	-	8	
7	Kawasan Strategis Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kawasan Strategis Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kawasan Strategis Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kawasan Strategis Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Laut Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Zonasi (RZWP3K)	-	5	-	5	-	5	-	10	-	15	-	5	-	-	-	-	-	
14	Reklamasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J U M L A H I I			10	-	10	-	35	-	20	57	2	35	-	20	57	0	23	-	8

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d. Desember 2022

TABEL VIII.10. DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL

NO	URAIAN	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH NASIONAL			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PP RPPLH	PP RPPLH
1	2	3	4	5	6
1.	RPPLH Nasional	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun*)	Sedang disusun*)	Belum ditetapkan

Catatan : RPPLH Nasional disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

*) Penyesuaian dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor- 2022

TABEL VIII.11. DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERTUTUPAN DAN PENGELUARAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI			PERDA RPPLH
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6
A. Ekoregion Jawa					
1.	DKI Jakarta	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
2.	Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
3.	Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
4.	Banten	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
5.	Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
6.	D.I. Yogyakarta	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	Belum disusun
B. Ekoregion Sumatera					
1.	Sumatera Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	Proses penetapan Perda No. 2 Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022
3.	Jambi	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	Belum disusun
4.	Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses penetapan
5.	Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
6.	Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
7.	Aceh	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Proses penetapan

VIII. KLHS DAN EKOREGION

NO		EKOREGION / PROVINSI		PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI		
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6	
8.	Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Proses penetapan	
9.	Kepulauan Riau	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
10.	Kepulauan Bangka Belitung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses penyusunan	Proses Penetapan	
C. Ekoregion Kalimantan						
1.	Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan	
2.	Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Belum disusun	-	
3.	Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan	
4.	Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan tapi dilakukan review di tahun 2022 dan akan di revisi di 2023	
5.	Kalimantan Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses penyusunan		
D. Ekoregion Sulawesi						
1.	Sulawesi Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses Penyusunan	-	
2.	Gorontalo	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Belum disusun	*sudah disusun sejak 2017	
3.	Sulawesi Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Perda Prov. Sulteng No. 5 Tahun 2021	
4.	Sulawesi Tenggara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Belum disusun	-	
5.	Sulawesi Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Belum disusun	-	

NO		EKOREGION / PROVINSI		PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI					
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP		DOKUMEN RPPLH		RANCANGAN PERDA RPPLH		PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6				
6.	Sulawesi Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses penyusunan	-				
E. Ekoregion Bali Nusatenggara									
1.	Bali	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Proses penyusunan	-				
2.	Nusa Tenggara Barat	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-				
3.	Nusa Tenggara Timur	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-				
F. Ekoregion Maluku									
1.	Maluku Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-				
2.	Maluku	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-				
G. Ekoregion Papua									
1.	Papua Barat	Belum dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-				
2.	Papua	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sedang disusun	*disarankan untuk susun kembali karena ada pemekaran DOB				
3.	Papua Pegunungan	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-				
4.	Papua Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-				
5.	Papua Barat Daya	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-				
6.	Papua Selatan	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-				

Catatan : RPPLH Provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi
 Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor- 2022

TABEL VIII.12. DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
A.	Ekorregion Jawa				
1.	Kota Cilegon - Banten	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
2.	Kab. Bandung - Jawa Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kab. Sukabumi - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
4.	Kab. Bogor - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Belum ditetapkan
5.	Kota Cimahi - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
6.	Kota Depok - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
7.	Kota Bekasi-Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
8.	Kab. Karawang-Jawa Barat	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
9.	Kota Tasikmalaya-Jawa Barat	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
10.	Kab. Kebumen - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
11.	Kota Semarang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
12.	Kab. Pemalang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Perda Kab. Pemalang No. 9 Tahun 2021
13.	Kab. Wonogiri - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
14.	Kab. Grobogan - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Perda Kab. Grobogan No. 3 Tahun 2022

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
15.	Kab. Klaten - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kab. Purworejo - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
17	Kab. Banjarnegara-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18	Kab. Banyumas - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
19	Kab. Batang- Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
20	Kab. Blora - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
21	Kab. Boyolali - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
22.	Kab. Brebes - Jawa Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
23.	Kab. Cilacap - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
24	Kab. Demak - Jawa Tengah	Sedang Dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
25	Kab. Jepara- Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
26	Kab. Karanganyar-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses Penyusunan	-
27	Kab. Kendal - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
28	Kota Magelang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
29	Kota Pekalongan-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
30	Kota Salatiga - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
31	Kota Surakarta - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-
32	Kota Tegal - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-
33	Kab. Kudus-Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
34	Kab. Magelang-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-
35	Kab. Pati - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
36	Kab. Pekalongan-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
37	Kab Purbalingga-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-

VIII. KLHS DAN EKOREGION

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
38	Kab Purworejo-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
39	Kab. Rembang-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
40	Kab. Semarang-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-
41	Kab. Slregen-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
42	Kab. Sukoharjo-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
43	Kab. Tegal-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
44	Kab. Temanggung-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-
45	Kab. Wonosobo-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
46	Kota Yogyakarta - DIY	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
47.	Kota Surabaya - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah Verifikasi	Proses Penetapan	Proses Penetapan
48.	Kota Blitar - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
49	Kab. Malang - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
50	Kab. Bojonegoro - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
51	Kab. Tuban - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
52	Kab. Pasuruan - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
B. Ekoregion Sumatera					
1.	Kab. Aceh Utara- NAD	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses Penyusunan	
2.	Kota Banda Aceh - NAD	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	-	
3.	Kab. Aceh Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah Verifikasi	Proses Penyusunan	-
4.	Kab. Aceh Jaya	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA					
NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
5.	Kab. Pidie	Sudah disusun	Sudah disusun dan proses verifikasi	Belum disusun	-
6.	Kab. Bireuen	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
7.	Kota Langsa	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
8.	Kab. Nagan Raya	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
9.	Kota Subulussalam	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kab. Aceh Besar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses Verifikasi	-
11.	Kab Aceh Barat Daya	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
12.	Kab. Aceh Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Penyusunan Proses	-
13.	Kab. Bener Meriah	Belum dilaksanakan	Sudah Verifikasi	Penyusunan Proses	-
14.	Kab. Aceh Timur	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kab. Simuelue	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan proses verifikasi	Belum disusun	-
16.	Kota Sabang	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
17.	Kab. Pidie Jaya	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18.	Kota Lhokseumawe	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
19.	Kab. Aceh Tamiang	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
20.	Kab. Aceh Tenggara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
21.	Kab. Gayo Lues	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
22.	Kab. Singkil	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
23.	Kab. Aceh Selatan	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
24.	Kab. Langkat-Sumut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

VIII. KLHS DAN EKOREGION

PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA						
NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6	
25.	Kota Medan-Sumut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
26.	Kota Batam-Kep. Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
27.	Kab. Bintan-Kep. Riau	Sedang dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
28.	Kabupaten Pelalawan-Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
29.	Kota Pekanbaru-Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
30.	Kab. Kuantan Singgingi-Riau	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
31.	Kab. Kampar-Riau	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
32.	Kab. Pasaman-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
33.	Kab. Padang panjang-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
34.	Kab. Lima Puluh Kota-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah diverifikasi	Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	-
35.	Kota Solok-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah Diverifikasi	Sudah disusun	Proses Penyusunan	-
36.	Kab. Solok-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah diverifikasi	Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	-
37.	Kab. Merangin-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
38.	Kota Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
39.	Kab. Muaro Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
40.	Kab. Batanghari-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
41.	Kab. Ogan Komering Ulu-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
42.	Kota Palembang-Sumsel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
43.	Kab. Muara Enim-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Sudah Disusun	Belum disusun	-	
44.	Kab. Musi Banyuasin-Sumsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	

PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA					
NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
45.	Kab. Belitung Kep. Babel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses Penyusunan	-
46.	Kab. Belitung Timur-Kep. Babel	Sudah dilaksanakan	Sudah diverifikasi	Belum disusun	-
47.	Kota Bandar Lampung-Lampung	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
48.	Kab. Lampung Tengah-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan proses verifikasi	Belum disusun	-
49.	Kota Metro - Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
50.	Kab. Tanggamus-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan Sudah diverifikasi	Belum disusun	-
51.	Kab. Lampung Barat-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan Sudah diverifikasi	Belum disusun	-
52.	Kab. Lampung Timur	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Proses Penyusunan	-
53.	Kab. Way Kanan - Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah diverifikasi	Belum disusun	-
54.	Kab. Mesuji - Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Proses Penyusunan	-
55.	Kab. Tulang Bawang – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
56.	Kab. Tulang Bawang Barat – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
57.	Kab. Lampung Utara – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
58.	Kab. Pesisir Barat – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
59.	Kab. Pesawaran – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
60.	Kab. Pringsewu – Lampung	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
61.	Kab. Lampung Selatan - Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
62.	Kab. Bengkulu Tengah-Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
63.	Kota Tanjungpinang-Kepulauan Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Proses penyusunan	-
64.	Kab. Karo – Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

VIII. KLHS DAN EKOREGION

PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA						
NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6	
65.	Kab. Siak - Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	-	
66.	Kab. Pelalawan - Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	-	
67.	Kab. Rokan Hulu - Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	-	
68	Kab. Aceh Tengah - Aceh	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	Proses Penyusunan	-
69.	Kab. Aceh Barat - Aceh	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	Proses Penyusunan	-
70.	Kota Tanjung Pinang - Kepri	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	Proses Penyusunan	-
71.	Kab. Kepahiang - Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Diverifikasi	Belum disusun	Proses Penyusunan	-
72.	Kab. Rejang Lebong - Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	Belum disusun	-
73.	Kab. Lebong - Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	Belum disusun	-
74.	Kota Bengkulu - Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Sedang dilaksanakan Belum disusun	Belum disusun	Belum disusun	-
75.	Kab. Bengkulu Selatan - Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Sedang dilaksanakan Belum disusun	Sedang Disusun Belum Diverifikasi	Belum disusun	-
76.	Kota Payakumbuh - Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan Belum Diverifikasi	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Belum disusun	-
77.	Kab. Padang Pariaman - Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan Belum Diverifikasi	Sudah disusun Belum Verifikasi	Proses Penyusunan	-
78.	Kab. Solok Selatan - Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan Belum Diverifikasi	Sudah disusun Belum Verifikasi	Proses Penyusunan	-
79.	Kab. Agam - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Sedang dilaksanakan Belum disusun	Belum disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	-
80.	Kab. Pasaman - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Sedang dilaksanakan Belum disusun	Belum disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	-
81.	Kota Pariaman - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Sedang dilaksanakan Belum disusun	Belum disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	-

PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA						
NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6	
82.	Kab. Pesisir Selatan - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
83.	Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
84.	Kab. Sijunjung - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
85.	Kota Padang - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
86.	Kota Bukittinggi - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
87.	Kab. Bangka - Bangka Belitung	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Anggaran Tahun 2024	
88.	Kota Pangkal Pinang- Bangka Belitung	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-	
89.	Kab. Bangka Tengah - Bangka Belitung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
C. Ekoregion Kalimantan						
1.	Kota Tarakan -Kalimantan Utara	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-	
2.	Kab. Bulungan -Kalimantan Utara	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-	
3.	Kab. Nunukan-Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
4.	Kab. Tanah Laut-Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan	
5.	Kota Pontianak-Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Proses penyusunan	-	
6.	Kab. Kubu Raya-Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
7.	Kota Samarinda -Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	*proses verifikasi ke KLHK	
8.	Kota Balikpapan-Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan Sudah diverifikasi	Belum disusun	-	
9.	Kab. Mahakam Ulu-Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah Disusun	Belum disusun	-	
10.	Kab. Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan Sudah diverifikasi	Belum disusun	-	
11.	Kab.Banjar-Kalimantan Selatan	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-	

VIII. KLHS DAN EKOREGION

PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA					
NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
12.	Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
13.	Kota Palangkaraya-Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
14.	Kab. Kapuas -Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kab.Lamandau -Kalimantan Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
16.	Kab.Gunung Mas -Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
17.	Kab. Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Belum disusun	-
18.	Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
19.	Kab. Balangan - Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	-
20.	Kab. Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	-
21.	Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	-
22.	Kab. Kota Baru - Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	-
23.	Kota Bontang - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
24.	Kab. Kutai Timur - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
25.	Kab. Paser - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan Perbaikan	Belum disusun	-
26.	Kab. Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
27.	Kab. Berau - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
28.	Kab. Kutai Barat - Kalimantan Timur	Belum dilaksanakan	Belum Disusun	Belum disusun	-

PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA						
NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6	
29.	Kab. Mahulu - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-	
D.	Ekoregion Sulawesi					
1.	Kab. Banggai Kepulauan-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan Sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan	
2.	Kab. Tojo Una-Una-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
3.	Kota Palu - Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	-	
4.	Kab. Donggala - Sulteng	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
5.	Kab. Gorontalo	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
6.	Kota Gorontalo	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
7.	Kab. Gorontalo Utara	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
8.	Kab. Pohuwato - Gorontalo	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
9.	Kab. Konawe Selatan - Sultra	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
10.	Kab. Bombana - Sultra	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
11.	Kab. Kolaka Timur - Sultra	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
12.	Kota Kendari - Sultra	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
13.	Kota Manado - Sulut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
14.	Kota Makassar- Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
15.	Kab. Gowa - Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah diverifikasi	Belum disusun	-	
16.	Kab. Maros – Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
17.	Kab. Pangkajene Kepulauan – Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	Pembahasan DPRD	
18.	Kota Tomohon	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah Verifikasi	Sudah Perda	No. 1/ 2022 tgl 30 Juni 2022

VIII. KLHS DAN EKOREGION

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
19.	Kab. Sigi	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
20.	Kab. Donggala	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusuna	Belum disusun	-
21.	Kab. Parigi Moutong	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusuna	Belum disusun	-
22.	Kab. Poso	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
23.	Kab. Morowali Utara	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
24.	Kab. Morowali	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
25.	Kab. Tojo Una-una	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
26.	Kab. Banggai	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
27.	Kab. Banggai Kepulauan	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
28.	Kab. Banggai Laut	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
29.	Kab. Toli-Toli	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
30.	Kab. Buol	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
31.	Kab. Pare-pare, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Sudah Disusun	Perda No. 9 Tahun 2022
32.	Kab. Pinrang, Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
33.	Kab. Sidemeng Rappang, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
34.	Kab. Bone, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
35.	Kab. Bulukumba, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
36.	Kab. Bantaeng, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
37.	Kab. Toraja Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah Perda Tapi Tidak Melalui Proses Verifikasi

PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA						
NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6	
38.	Kab. Kepulauan Selayar, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-	
E. Ekoregion Bali Nusatenggara						
1.	Kab. Sabu Raijua-NTT	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
2.	Kab. Alor-NTT	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
3.	Kab. Belu-NTT	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
4.	Kab. Buleleng - Bali	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Belum disusun	-	
5.	Kab. Badung - Bali	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
6.	Kab. Sumbawa Barat - NTB	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-	
F. Ekoregion Maluku						
1.	Kab. Morotai-Malut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
2.	Kab. Halmahera Utara-Malut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
E. Ekoregion Papua						
1.	Kota Jayapura- Papua	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses Penyusunan	-	
2.	Kab. Sorong Selatan- Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
3.	Kab. Manokwari Selatan-Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	

Catatan : RPPLH Kab/Kota disusun oleh Pemerintah Kab/Kota, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor- 2022

VIII. KLHS DAN EKOREGION



STATISTIK
BIDANG PLANLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2022

INDONESIA' FOLU NET SINK 2030

**TABEL IX.1. LUAS AREA PELAKSANAAN PROGRAM AKSI MITIGASI MENURUT PEMANGKU KAWASAN PADA IPL 7, 8 DAN 9
(2021-2024) DALAM HEKTAR**

Pemangku Kawasan	Jenis Pengelolaan	Deforestasi		Degradasi Konsesi ³	PBPH-HT ³		PHL	Peningkatan Karbon Cadangan Karbon		Pengelolaan Gambut		Konservasi Tinggi ³
		Mineral	Gambut		ENR ³	RIL-C ³		Rotasi	Non-Rotasi	Tata Air ³	Restorasi	
DITJEN PHL	HP-Non Konsesi	245.657	183.704		1.806		88.457	215.842		13	11.095.028	
	HPK-HP	145.372	60.659		1.881		304.044	123.972		1.486	840.150	
	KPHP-HTI	199.936	199.659	402.222	1.346.427	1.201.355	2.106.325	971.734	718.021	506.024	1.443.708	
	KPHP-HPH	53.778	77.641	5.444.456	5.881.374	4.380.996	1.519.486	320.782		129.751	5.460.254	
	KPHP-RE	147.384	9.478	84.277		6.257		23.987	43.052		26.852	
DITJEN PDASRH	HL-Non PIAPS	46.056	22.670		30			92.711		-	14.128.824	
DITJEN KSDAE	KONSERVASI	177.732	131.885		444			638.548		9.351		
DITJEN PSKL	KPHL-PIAPS	11.943	12.577		100			29.000		43.593	1.459.031	
	KPHP-PIAPS	126.803	89.867		116.041	2.531		38.869	168.036	200.624	1.750.410	
DITJEN PPPK ⁴	GAMBUT									40.749		
BRGM ⁵	BRGM									1.070.689		
PEMDA	PEMDA-Non HGU	552.267	117.857								1.350.742	
	PEMDA-HGU	116.701	56.465								440.472	
TOTAL		1.823.630	962.461	5.930.955	1.462.467	7.095.778	4.573.363	5.533.087	2.722.236	1.674.703	2.146.059	38.329.548
TARGET NDC 2024 ¹		5.056.451	55.617	N.A	9.307.332		1.589.494	2.422.563	1.453.538	863.914	977.034	
TARGET NDC 2030 ¹		7.195.913	75.321	N.A	11.227.332		3.105.817	3.460.804	2.076.482	863.914	1.395.763	
TARGET LTS 2024 ²		2.954.287	187.854	1.705.000	9.307.332	1.413.203	1.951.493	1.756.344	785.439	1.996.762		
TARGET LTS 2030 ²		3.973.232	252.645	2.282.500	11.227.332	2.207.061	2.787.847	2.509.062	946.050	2.724.866		

Catatan: Angka yang tercantum dalam tabel dalam satuan hektar¹ Difitling berdasarkan target NDC dan ² LTS-LCCP (KLHK, 2021), nilai menunjukkan target kumulatif sejak 2011 (kecuali deforestasi dan degradasi hutan, kumulatif sejak 2013) dan belum dikoreksi dengan nilai aktual historis 2013-2020, luas target kegiatan peningkatan cadangan karbon dan restorasi gambut belum dikalikan dengan survival rate.³ Area untuk pencegahan degradasi hutan, pembangunan HT, pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (PHL) dan pengelolaan tata air gambut yang ada di area konsesi (PBPH-HT dan HGU) adalah di semua IPL 1-9.⁴ Berdasarkan Perpres 92 Tahun 2020 dan Permen LHK No. 15 Tahun 2021, pengelolaan HL dilaksanakan oleh Difjen PHL.⁵ PPKL sebagai pemangku pelaksanaan kegiatan restorasi di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL) yang bukan HGU; ⁶ BRGM sebagai pemangku pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di 7 Provinsi (Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua) yang berada di luar konsesi di seluruh fungsi Kawasan hutan, sedangkan di luar ke 7 provinsi tetap dalam kewenangan masing-masing pemangku Kawasan.

Sumber: Sekretariat Indonesia's FOLU Net Sink 2030

IX. INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030



STATISTIK
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2022

DUKUNGAN MANAJEMEN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANONOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TABEL X.1. REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN												KET			
		I				II				III							
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Sekretariat Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	8	7	15	25	52	6	6	12	-	-	-	-	41	38	79	
II	Direktorat Rencana Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	7	8	15	32	33	65	-	3	3	-	-	-	39	44	83	
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	6	6	12	23	14	37	-	5	5	-	-	-	29	25	54	
IV	Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan	9	4	13	34	22	56	4	1	5	1	-	1	48	27	75	
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	6	6	12	15	10	25	3	4	7	-	-	-	24	20	44	
VI	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4	6	10	15	14	29	4	4	8	-	-	-	23	24	47	
	JUMLAH	40	37	77	146	118	264	17	23	40	1	-	1	204	178	382	
1.	BPKH Wil. I Medan	3	-	3	17	10	27	12	9	21	-	-	-	32	19	51	
2.	BPKH Wil. II Palembang	4	-	4	18	9	27	4	6	10	-	-	-	26	15	41	
3.	BPKH Wil. III Pontianak	5	-	5	16	12	28	6	2	8	-	-	-	27	14	41	
4.	BPKH Wil. IV Samarinda	3	-	3	25	13	38	6	8	14	-	-	-	34	21	55	
5.	BPKH Wil. V Banjarmasin	5	-	5	13	12	25	8	7	15	-	-	-	26	19	45	
6.	BPKH Wil. VI Manado	5	-	5	15	7	22	3	4	7	-	-	-	23	11	34	
7.	BPKH Wil. VII Makassar	3	4	7	18	14	32	6	5	11	-	-	-	27	23	50	
8.	BPKH Wil. VIII Denpasar	4	1	5	24	10	34	4	5	9	-	-	-	32	16	48	
9.	BPKH Wil. IX Ambon	1	-	1	19	8	27	16	1	17	-	-	-	36	9	45	
10.	BPKH Wil. X Irian Jaya	1	-	1	19	9	28	9	3	12	-	-	-	29	12	41	
11.	BPKH Wil. XI Yogyakarta	4	5	9	20	29	49	5	2	7	-	-	-	29	36	65	
12.	BPKH Wil. XII Tanjungpinrang	2	-	2	12	12	24	7	3	10	-	-	-	21	15	36	
13.	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	2	-	2	14	9	23	3	5	8	-	-	-	19	14	33	
14.	BPKH Wil. XIV Kupang	2	-	2	17	7	24	4	2	6	-	-	-	23	9	32	
15.	BPKH Wil. XV Gorontalo	3	1	4	12	4	16	8	3	11	-	-	-	23	8	31	
16.	BPKH Wil. XVI Palu	4	-	4	15	11	26	10	3	13	-	-	-	29	14	43	
17.	BPKH Wil. XVII Manokwari	4	-	4	13	3	16	12	3	15	-	-	-	29	6	35	
18.	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	1	1	2	11	6	17	5	3	8	-	-	-	17	10	27	
19.	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	4	-	4	14	5	19	4	5	9	-	-	-	22	10	32	

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN												KET			
		IV			III			II			I						
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	3	3	6	14	10	24	8	-	8	-	-	-	25	13	38	
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	2	1	3	21	5	26	1	3	4	-	-	-	24	9	33	
22	BPKH Wil. XXII Kendari	1	-	1	15	8	23	3	3	6	-	-	-	19	11	30	
	Jumlah	66	16	82	362	213	575	144	85	229	-	-	-	572	314	886	

Sumber: Sekretariat Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Keterangan:

- IV L = Gol. IV Laki-laki
- IV P = Gol. IV Perempuan
- III L = Gol. III Laki-laki
- III P = Gol. III Perempuan
- II L = Gol. II Laki-laki
- II P = Gol. II Perempuan
- I L = Gol. I Laki-laki
- I P = Gol. I Perempuan

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

TABEL X.2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2022

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP			SD			TOTAL			JENIS KELAMIN			
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	26	27	28	L	P	KET.				
A. PUSAT																														
I	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	PNS	3	-	3	7	10	17	20	18	38	6	8	14	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	79	41	38		
	Upah	-	-	-	-	-	-	10	2	12	1	-	1	10	-	-	-	-	-	1	-	1	24	22	2					
II	Direktorat Rencana, Penggunaan & Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	PNS	1	1	2	10	13	23	25	25	50	1	4	5	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	83	39	44			
	Upah	-	-	-	-	1	1	4	1	5	-	1	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	4			
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	PNS	3	2	5	8	16	13	8	21	1	4	5	4	2	6	-	-	-	-	1	1	54	29	25					
	Upah	-	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	3			
IV	Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan	PNS	2	-	2	10	6	16	23	16	39	3	4	7	8	1	9	1	-	1	1	-	1	75	48	27				
	Upah	-	-	-	-	-	-	13	5	18	4	-	4	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	35	30	5			
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PNS	-	2	2	6	12	13	8	21	3	4	7	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	44	24	20			
	Upah	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3			
VI	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	PNS	-	1	1	4	5	9	13	12	25	4	6	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	47	23	24			
	Upah	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3			
	JUMLAH	PNS	9	6	15	45	48	93	107	87	194	18	30	48	21	6	27	3	3	1	1	2	382	204	178					
	Upah	-	-	-	-	2	2	35	15	50	5	2	7	32	3	35	-	-	1	-	1	95	73	22						
	TOTAL PNS+UPAH	9	6	15	45	50	95	142	102	244	23	32	55	53	9	62	3	-	3	2	1	3	477	277	200					
B. DAERAH																														
I	BPKH Wil. I Medan	PNS	-	-	-	4	-	4	14	8	22	5	8	13	9	3	12	-	-	-	-	-	-	-	51	32	19			
	Upah	-	-	-	-	-	1	4	5	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	5			
II	BPKH Wil. II Palenbang	PNS	-	-	-	6	1	7	5	12	4	5	9	9	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	41	26	15			
III	BPKH Wil. III Pontianak	PNS	1	-	1	5	4	9	10	4	14	5	2	7	5	4	9	1	-	-	-	-	-	-	8	6	2			
	Upah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	41	27	14			
IV	BPKH Wil. IV Samarinda	PNS	-	-	-	11	2	13	11	22	5	6	11	6	2	8	-	-	1	-	1	55	34	21						
	Upah	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	5			
V	BPKH Wil. V Banjarmasin	PNS	-	-	-	7	-	7	9	11	20	1	4	5	9	4	13	-	-	-	-	-	-	-	45	26	19			
	Upah	-	-	-	1	2	3	7	2	9	1	1	2	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	23	17	6			

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

ABEL IX.3. PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2022

No	Unit Kerja	PERENCANA				SURATA				JLH. SURTA				Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)				PRANATA KOMPUTER			
		Ahli	Calon Ahli	Jlh. PERENCANA	Terampil	Calon Ahli	Terampil	Calon Ahli	Terampil	Calon Ahli	Calon Ahli										
1	2																				
1	PUSAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Sekretariat Dijen Plandologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	12	
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	14	-	14	-	2	-	2	4	1	15	5	25	-	-	4	-	-	-	4	
3	Direktorat Pengukuran dan Penetapan Luas Kawasan Hutan	9	-	9	1	-	4	-	5	6	-	15	5	26	-	-	1	-	-	1	
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	1	-	1	1	-	1	-	2	5	2	16	5	28	-	-	1	-	-	1	
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	12	-	12	-	-	5	4	9	6	2	3	1	12	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PUSAT	40	-	40	2	-	12	4	18	22	5	49	17	93	-	3	16	-	19		
	BPKH																				
1	BPKH Wil. I Medan	-	-	2	-	2	4	7	4	6	1	18	1	1	-	-	-	-	-	2	
2	BPKH Wil. II Palenbang	-	-	3	1	1	-	5	4	-	7	1	12	1	-	-	-	-	-	1	
3	BPKH Wil. III Pontianak	-	-	-	2	-	2	4	2	3	9	-	14	-	-	-	-	-	-	-	
4	BPKH Wil. IV Samarinda	-	-	-	2	-	2	4	6	2	18	-	26	-	-	-	-	-	-	-	
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	-	-	-	1	-	-	1	8	3	9	2	22	-	-	-	-	-	-	-	
6	BPKH Wil. VI Manado	-	-	-	-	-	1	1	2	7	1	5	-	13	-	-	1	-	1	-	
7	BPKH Wil. VII Makassar	-	-	-	1	-	1	1	3	8	3	13	2	26	-	-	-	-	-	-	
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	-	-	3	1	2	-	6	7	-	8	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
9	BPKH Wil. IX Ambon	-	-	-	1	1	-	2	4	8	2	4	2	16	2	-	-	-	-	2	
10	BPKH Wil. X Jayapura	-	-	-	-	-	-	2	2	8	2	8	1	19	-	-	-	-	-	-	
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	-	-	-	1	-	2	-	3	6	-	13	-	19	-	-	-	-	-	-	
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	-	-	-	-	2	-	2	4	11	2	4	2	19	-	-	-	-	-	-	
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	-	-	2	1	1	2	6	5	2	6	1	14	-	-	-	-	-	-	-	
14	BPKH Wil. XIV Kupang	-	-	-	-	6	-	6	6	1	6	1	14	-	-	1	-	1	-	1	
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	-	-	-	1	-	2	3	8	1	3	1	13	-	-	-	-	-	-	-	
16	BPKH Wil. XVI Palu	-	-	-	2	-	1	3	6	2	8	2	18	-	-	1	-	1	-	1	
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	-	-	-	2	-	2	4	5	4	1	2	12	-	-	-	-	-	-	-	
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	-	-	2	1	2	5	2	2	5	2	11	-	1	-	-	-	-	-	-	
19	BPKH Wil. XIX Pelabuhan Ratu	-	-	-	-	-	-	-	5	2	11	-	18	-	-	-	-	-	-	-	
20	BPKH Wil. XX Lampung	-	-	-	1	2	-	3	2	2	10	2	16	-	-	-	-	-	-	-	
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	-	-	-	1	-	-	1	1	-	14	2	17	-	-	-	-	-	-	-	
22	BPKH Wil. XXII Kendari	-	-	-	2	-	-	2	3	-	7	-	10	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	-	-	11	25	16	23	75	125	38	175	24	362	4	3	2	-	8		8	27
	JUMLAH PUSAT + BPKH	40	13	25	28	27	93	147	43	224	41	455	4	6	18	-	-	-	-	-	

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No	Unit Kerja	ANALIS KEPERG Ahli	JLH. ANALIS KEPERG, Calon Ahli	ARSIPARIS	JLH. ARSIPAR IS Terampil	Calon Teram pil	JLH. PRANATA HUMAS CALON AHLI	JUMLAH PRANAT A HUMAS CALON AHLI	Perancang Perundang- Pengadaan Barang/Jasa CALON AHLI	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa CALON AHLI	JUMLAH PENGELOLA PENGADAAN BRG/JASA TOTAL
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	PUSAT										
1	Sekretariat Diljen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6	-	3	1	-	4	1	1	2	-
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	-	1	1	-	2	-	-	-	28
3	Direktorat Pengukuran dan Penetapanan Kawasan Hutan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	-	-	-	1	-	1	-	-	2	44
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4
	JUMLAH PUSAT	7	-	5	3	-	8	1	1	2	2
II	BPKH										
1	BPKH VII. I Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
2	BPKH VII. II Palembang	-	-	-	-	-	-	-	1	1	19
3	BPKH VII. III Pontianak	-	-	1	-	-	1	1	-	1	20
4	BPKH VII. IV Samarinda	-	-	1	-	-	1	1	-	-	31
5	BPKH VII. V Banjarmasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
6	BPKH VII. VI Manado	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17
7	BPKH VII. VII Makassar	-	-	1	-	-	1	1	-	1	31
8	BPKH VII. VIII Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	1	1	23
9	BPKH VII. IX Ambon	-	-	1	-	-	1	1	-	1	24
10	BPKH VII. X Jayapura	-	-	1	-	-	1	1	-	-	22
11	BPKH VII. XI Yogyakarta	1	-	1	2	-	-	2	-	-	25
12	BPKH VII. XII Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
13	BPKH VII. XIII Pangkalpinang	-	-	1	-	-	1	1	-	-	21
14	BPKH VII. XIV Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
15	BPKH VII. XV Gorontalo	-	-	1	-	-	1	1	-	1	18
16	BPKH VII. XVI Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
17	BPKH VII. XVII Manokwari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	BPKH VII. XVIII Banda Aceh	-	-	-	-	-	1	1	-	-	17
19	BPKH VII. XIX Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	1	1	19
20	BPKH VII. XX Lampung	-	-	-	-	-	-	-	2	2	21
21	BPKH VII. XXX Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	1	1	19
22	BPKH VII. XXII Kendari	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13
	JUMLAH	1	-	1	10	-	-	11	11	-	12
	JUMLAH PUSAT + BPKH	8	-	8	15	3	-	8	12	2	14
											659

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

TABEL X.4. PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO	UNIT KERJA	DIKLAT PENJENJANGAN (orang)						TAHUN 2021						TAHUN 2022												
		TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2021			TAHUN 2022									
		LEMBIHANAS SPAMEN	PIM TK.I SPAMEN	PIM TK.II SPAMEN	JML	LEMHANAS SPAMEN	PIM TK.IV SPAMEN	PIM TK.III SPAMEN	JML	LEMHANAS SPAMEN	PIM TK.IV SPAMEN	PIM TK.III SPAMEN	JML	LEMHANAS SPAMEN	PIM TK.IV SPAMEN	PIM TK.III SPAMEN	JML	LEMHANAS SPAMEN	PIM TK.IV SPAMEN	PIM TK.III SPAMEN	JML	LEMHANAS SPAMEN	PIM TK.IV SPAMEN	PIM TK.III SPAMEN	JML	
A. PUSAT																										
1	Sekretariat, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	-	-	-	1	2	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	-	-	-	1	1	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH A	-	-	1	2	4	7	-	-	5	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. DAERAH																										
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BPKH WILAYAH V BANJARMARU	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BPKH WILAYAH X PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BPKH WILAYAH XI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNG PINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKAL PINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	UNIT KERJA	DIKLAT PENJENJANGAN (orang)																							
		TAHUN 2018				TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022							
						PIM TK.II	PIM TK.IV	JML.	LEMHANAS	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML.	LEMHANAS	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML.	LEMHANAS	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML.	LEMHANAS	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML.	
		LEMHANAS	SPAMI	SPAMEN	SPAMEN	ADUM	SPAMI	SPAMEN	SPAMEN	SPAMI	SPAMI	SPAMI	SPAMEN	SPAMI	SPAMI	SPAMI	SPAMI	SPAMI	SPAMI	SPAMI	SPAMI	SPAMI	SPAMI	SPAMI	
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	BPKH WILAYAH XX LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH B	-	-	-	-	4	4	-	-	7	21	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH A+B	-	-	1	2	8	11	-	-	12	27	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, data s.d Desember 2022

**TABEL X.5. PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

I. UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UU Nomor 41	1999	Kehutanan	Masih berlaku dan ada perubahan
2	UU Nomor 19	2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Masih berlaku
3	UU Nomor 32	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masih berlaku dan ada perubahan
4	UU Nomor 11	2020	Cipta Kerja	Sudah tidak berlaku
5	Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2	2022	Cita Kerja	Sudah tidak berlaku pada saat tahun terbit (2023)

II. PERATURAN PEMERINTAH

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PP. Nomor 44	2004	Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku
2	PP. Nomor 2	2008	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Dephut	Sudah tidak berlaku
3	PP. Nomor 10	2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
4	PP. Nomor 24	2010	Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	PP. Nomor 60	2012	Perubahan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
6	PP. Nomor 61	2012	Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
7	PP. Nomor 33	2014	Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan	Masih berlaku
8	PP. Nomor 104	2015	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
9	PP. Nomor 105	2015	Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
10	PP. Nomor 46	2016	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Masih berlaku
11	PP. Nomor 46	2017	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Masih Berlaku
12	PP Nomor 22	2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masih Berlaku
13	PP Nomor 23	2021	Penyelenggaraan Kehutanan	Masih Berlaku
14	PP Nomor 45	2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Masih Berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

III. PERATURAN PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perpres Nomor 28	2011	Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah	Masih berlaku
2	Perpres Nomor 88	2017	Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Masih berlaku

IV. INSTRUKSI PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Instruksi Presiden Nomor 10	2011	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
2	Instruksi Presiden Nomor 6	2013	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
3	Instruksi Presiden Nomor 8	2015	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
4	Instruksi Presiden Nomor 6	2017	Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Izin Baru Hutan Alam primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
5	Instruksi Presiden Nomor 8	2018	Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	Sudah tidak berlaku
6	Instruksi Presiden Nomor 5	2019	Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Masih Berlaku

V. PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	683/Kpts-II/1981	1981	Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi	Masih berlaku
2	364/Kpts-II/1990; 519/Kpts/HK.050/7/1990; 23-VII-1990	1990	Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Masih berlaku
3	418/Kpts-II/1993	1993	Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
4	292/Kpts-II/1995	1995	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	250/Kpts-II/1996	1996	Perubahan Kepmenhut No.418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
6	613/Kpts-II/1997	1997	Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Sudah tidak berlaku
7	333/Kpts-II/1999	1999	Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan	Sudah tidak berlaku
8	32/Kpts-II/2001	2001	Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
9	70/Kpts-II/2001	2001	Penetapan Kawasan Lindung Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
10	146/Kpts-II/2003	2003	Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
11	230/Kpts-II/2003	2003	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Sudah tidak berlaku
12	P.31/Menhet-II/2005	2005	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan	Sudah tidak berlaku
13	P.28/Menhet-II/2006	2006	Sistem Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
14	P.66/Menhut-II/2006	2006	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Huta	Sudah tidak berlaku
15	P.67/Menhut-II/2006	2006	Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan	Sudah tidak berlaku
16	P.26/Menhut-II/2007	2007	Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
17	P.62/Kpts-II/2007	2007	Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/2007 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
18	23/MEN/XI/2007; P.52/Menhut-II/2008	2008	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi	Masih berlaku
19	P.43/Menhut-II/2008	2008	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
20	P.56/Menhut-II/2008	2008	Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan	Masih berlaku dan ada perubahan
21	P.38/Menhut-II/2008	2008	Perubahan Keempat Atas Kepmenhut No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
22	P.53/Menhut-II/2008	2008	Optimalisasi Peruntukan Areal hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
23	P.48/Menhut-II/2009	2009	Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000	Sudah tidak berlaku
24	P.50/Menhut-II/2009	2009	Penegasan Status dan Fungsi Kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
25	P.16/Menhut-II/2009	2009	Perubahan Kelima Atas Kepmenhut No. 292/Kpts-II/1995 tentang tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
26	P.6/Menhut-II/2009	2009	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sudah tidak berlaku
27	P.28/Menhut-II/2009	2009	Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata	Masih berlaku
28	P.02/Menhut-II/2010	2010	Informasi Kehutanan	Masih berlaku
29	P.06/Menhut-II/2010	2010	Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Masih berlaku
30	P.32/Menhut-II/2010	2010	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
31	P.33/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
32	P.34/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
33	P.36/Menhet-II/2010	2010	Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
34	P.42/Menhet-II/2010	2010	Sistem Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku
35	P.47/Menhet-II/2010	2010	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
36	P.17/Menhet-II/2011	2011	Perubahan Atas P.33/Menhet-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
37	P.18/Menhet-II/2011	2011	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
38	P.19/Menhet-II/2011	2011	Penataan Batas Areal Kerja izin Pemanfaatan Hutan	Sudah tidak berlaku
39	P.20/Menhet-II/2011	2011	Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
40	P.41/Menhet-II/2011	2011	Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
41	P.44/Menhet-II/2011	2011	Perubahan Kedua Atas P.33/Menhet-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
42	P.49/Menhet-II/2011	2011	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030	Sudah tidak berlaku
43	P.50/Menhet-II/2011	2011	Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
44	P.54/Menhet-II/2011	2011	Perubahan Atas P.41/Menhet-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
45	P.38/Menhet-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhet-II/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
46	P.44/Menhet-II/2012	2012	Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
47	P.41/Menhet-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhet-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
48	P.14/Menhet-II/2013	2013	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhet-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
49	P.43/Menhet-II/2013	2013	Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan	Sudah tidak berlaku
50	P.46/Menhet-II/2013	2013	Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Masih berlaku
51	P.47/Menhet-II/2013	2013	Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Sudah tidak berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
52	P.62/MenlHK-II/2013	2013	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MenlHK-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
53	P.16/MenlHK-II/2014	2014	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
54	P.25/MenlHK-II/2014	2014	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
55	P.27/MenlHK-II/2014	2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MenlHK-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
56	P.28/MenlHK-II/2014	2014	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenlHK-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat	Sudah tidak berlaku
57	P.29/MenlHK-II/2014	2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MenlHK-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
58	Peraturan Bersama Tiga Menteri dan Kepala BPN No. 79/2014, No.	2014	Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan	Masih berlaku
59	P.16/MenlHK-II/2015	2015	Perubahan kedua atas PermenlHK No.34/MenlHK-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
60	P.50/Menlhk/Setjen/2016	2016	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
61	P.51/Menlhk/Setjen/KUM .1/12/2016	2016	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi	Sudah tidak berlaku
62	P.81/Menlhk/Setjen/KUM .1/10/2016	2016	Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Masih berlaku
63	P.93/Menlhk/Setjen/KUM .1/12/2016	2016	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
64	P.96/Menlhk/Setjen/Kum .1/11/2018	2018	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
65	P.97/MENLHK/Setjen/Ku m.1/11/2018	2018	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
66	P.22/MENLHK/Setjen/Ku m.1/7/2018	2018	Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masih berlaku dan ada perubahan
67	P.27/Menlhk/Setjen/Kum .1/7/2018	2018	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
68	P.17/Menlhk/SETJEN/Ku m.1/5/2018	2018	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria	Sudah tidak berlaku
69	P.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1 /7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
70	P.42/Menlhk/Setjen/Kum .1/8/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum. 1/5/2018	Sudah tidak berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
71	P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara	Sudah tidak berlaku
72	P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020	2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhet-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan	Masih berlaku
73	P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019	2019	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030	Masih berlaku
74	Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021	2021	Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
75	Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021	2021	Daftar Usaha/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya	Masih berlaku
76	Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2021	2021	Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal, Pelatihan Kompetensi Amdal, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal, Pembentukan Lembaga Uji	Masih berlaku
77	Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021	2021	Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Masih berlaku

VI. SK. MENTERI (PIPIB)

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK. 7416/Menhet-VII/IPSDH/2011	2006	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I)	Sudah tidak berlaku
2	SK. 2771/Menhet-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II)	Sudah tidak berlaku
3	SK. 6315/Menhet-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi III)	Sudah tidak berlaku
4	SK. 2796/Menhet-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IV)	Sudah tidak berlaku
5	SK. 2796/Menhet-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi V)	Sudah tidak berlaku
6	SK. 3706/Menhet-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VI)	Sudah tidak berlaku
7	SK. 6982/Menhet-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII)	Sudah tidak berlaku
8	SK. 2312/Menhet-VII/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VIII)	Sudah tidak berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
9	SK. 5385/Men-LHK-PKTL/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX)	Sudah tidak berlaku
10	SK. 2300/Men-LHK/PKTL/IPSDH/Pla.1/5/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X)	Sudah tidak berlaku
11	SK. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI)	Sudah tidak berlaku
12	SK.351/MenLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XII)	Sudah tidak berlaku
13	SK.6559/MenLHK/IPSDH/PLA.1/12/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII)	Sudah tidak berlaku
14	SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV)	Sudah tidak berlaku
15	SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV)	Sudah tidak berlaku
16	SK. 7099/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019	2019	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
17	SK.851/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020	2020	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I	Sudah tidak berlaku
18.	SK.4945/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020	2020	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II	Sudah tidak berlaku
19	SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021	2021	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam	Sudah tidak berlaku
20	SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021	2021	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam	Sudah tidak berlaku
21	SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022	2022	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan	Sudah tidak berlaku
22	SK.7954/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022	2022	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan	Sudah tidak berlaku pada saat tahun terbit (2023)

VII. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK.91/VII-PW/2006	2006	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
2	P.01/VII-SET/2009	2009	Nama-nama Jabatan dan uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
3	P.02/VII-SET/2009	2009	Prosedur Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
4	P.03/VII-SET/2009	2009	Klasifikasi Arsip/Dokumen Pengukuhan dan Perubahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	P.01/VII-SET/2010	2010	Peraturan Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
6	P.02/VII-SET/2010	2010	Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
7	P.03/VII-SET/2010	2010	Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014	Sudah tidak berlaku
8	P.04/VII-SET/2010	2010	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2011	Sudah tidak berlaku
9	P.05/VII-SET/2010	2010	Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat, Penetapan Areal Kerja, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa	Sudah tidak berlaku
10	P.06/VII-SET/2010	2010	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
11	P.07/VII-SET/2010	2010	Standar Nomenklatur Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
12	P.08/VII-SET/2010	2010	Standar Biaya dan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
13	P.1/VII-SET/2011	2011	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Masih berlaku
14	P.2/VII-SET/2011	2011	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
15	P.3/VII-SET/2011	2011	Perubahan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
16	P.4/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Sudah tidak berlaku
17	P.5/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan	Sudah tidak berlaku
18	P.6/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
19	P.7/VII-SET/2011	2011	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
20	P.8/VII-SET/2011	2011	Standar Kegiatan dan Biaya Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2010	Sudah tidak berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
21	P.9/VII-SET/2011	2011	Rencana Kerja Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
22	P.1/VII-SET/2012	2012	Penetapan Kinerja Ditjen Planhut Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
23	P.4/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
24	P.5/VII-WP3H/2012	2012	Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Sudah tidak berlaku
25	P.6/VII-SET/2012	2012	Rencana Kerja Ditjen Planhut Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
26	P.9/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Menggunakan GPS	Masih Berlaku
27	P.10/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
28	P.11/VII-SET/2012	2012	Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
29	P.13/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama dengan	Sudah tidak berlaku
30	P.14/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan dari Menhut kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
31	P.15/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
32	P.16/VII-SET/2012	2012	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perubahan	Sudah tidak berlaku
33	P.17/VII-SET/2012	2012	Pedoman Penyusunan Laporan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
34	P.1/VII-SET/2013	2013	Penetapan Kinerja Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
35	P.2/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Tata Batas/Penetapan Kawasan Hutan	Masih berlaku
36	P.3/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	Masih berlaku
37	P.4/VII-SET/2013	2013	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
38	P.5/VII-SET/2013	2013	Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
39	P.6/VII-SET/2013	2013	Perubahan P.5/VII-SET/2013 tentang Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
40	P.7/VII-SET/2013	2013	Mekanisme Pengelolaan Data Spasial Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Perubahan	Masih berlaku
41	P.1/VII-Set/2014	2014	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
42	P.2/VII-Set/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS	Masih berlaku
43	P.3/VII-IPSDH/2014	2014	Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan	Masih berlaku
44	P.4 /VII/PKH/2014	2014	petunjuk teknik pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah tidak berlaku
45	P.5/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
46	P.6/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama	Sudah tidak berlaku
47	P.7 /VII-Set/2014	2014	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
48	P.8/VII-Set/2014	2014	Standar Kegiatan Dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
49	P.4/PKTL-SET/2015	2015	Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
50	P.5/PKTL-SET/2015	2015	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pemegang Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang	Masih berlaku
51	P.10/PKTL-SET/2015	2015	Perjanjian Kinerja Dirkotorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Sudah tidak berlaku
52	P.1/PKTL/SETDIR/ KEU.1/2/2016	2016	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Sudah tidak berlaku
53	P.2/PKTL/SETDIR/ OTL.1/3/2016	2016	Nama nama Jabatan dan Uraian Jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
54	P.3/SETDIR /PLA.2/9/2016	2016	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
55	P.6/PKTL/SETDIR/ OTL.1/12/2016	2016	Tentang Nama Jabatan Dan Uraian Jabatan Non Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
56	P.7/PKTL/SETDIR/ OTL.2/12/2016	2016	Tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
57	P.8/PKTL/SETDIR/PRO EV/Set.1/ 12/2016	2016	Penetapan Indikator Kinerja Utama	Masih berlaku
58	P.2/PKTL/SETDIR/KEU. 1/2/2017	2017	Perjanjian Kinerja	Sudah tidak berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
59	P.3/PKTL/PSDH/PLA.1/2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi PIPPIB	Masih berlaku
60	P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/2017	2017	Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	Masih berlaku
61	P.5/PKTL/SETDIT/KUM.1/4/2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Berbasis Geospasial	Masih berlaku
62	P.9/PKTL/KUH/PLA.2/1/2018	2018	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Batas Pencadangan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif dalam Rangka	Masih berlaku
63	P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/8/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.9/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2017 tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB)	Sudah tidak berlaku
64	P.14/PKTL/SETDIT/KEU.1/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun	Sudah tidak berlaku
65	P.10/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.8/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2017 tentang Prosedur Kerja Lingkup Ditjen	Masih berlaku
66	P.12/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018	2018	Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Sudah tidak berlaku
67	P.4/PKTL/SETDIT/KEU.0/3/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NO. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi	Sudah tidak berlaku
68	P.2/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/2018	2018	Prosedur Kerja Lingkup Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Sudah tidak berlaku
69	P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018	2018	Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	Sudah tidak berlaku
70	P.5/PKTL/SETDIT/Kum.1/8/2018	2018	Petunjuk Teknis Penelitian Tim Terpadu dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak Produktif untuk	Masih berlaku
71	P.3/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/2018	2018	Proses Bisnis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Masih berlaku
72	P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018	2018	Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Wilayah Ekoregion	Masih berlaku
73	P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018	2018	Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Sudah tidak berlaku
74	P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No.P.9/PKTL-STE/2015 tentang Recana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019	Sudah tidak berlaku
75	P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019	2019	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
76	P.4/PKTL/SETDIT/PLA.0/8/2019	2019	Sistem Informasi dan Dokumentasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Berbasis Online	Masih berlaku
77	P.5/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2019	2019	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Masih berlaku

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
78	P.13/PKTL/SETDIT/Keu .0/12/2019	2019	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Masih berlaku
79	P.14/PKTL.SETDIT/Keu .0/12/2019	2019	Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Sudah tidak berlaku
80	P.11/PKTL/SET.2/KUM. 1/2020	2020	Penggantian Biaya Penataan Batas Kawasan Hutan	Masih berlaku
81	P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/ 1/2021	2021	Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan	Masih berlaku

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d 31 Desember 2022

TABEL X.6. REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIRREKTORAT JENDERAL PLANLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN (Dalam Ribu Rupiah)

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29
	JUMLAH PUSAT DAN UPT (I+II)	1.100.434.984.000	451.314.101	447.060.836.000	532.555.897.000	411.730.791.000	532.555.897.000	411.730.791.000	411.730.791.000	411.730.791.000	411.730.791.000
I	PUSAT	197.038.900.000	137.921.527	141.462.000.000	114.473.512.000	114.218.752.000	114.218.752.000	114.218.752.000	114.218.752.000	114.218.752.000	114.218.752.000
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	68.605.187.000	61.951.150	72.187.689.000	67.458.562.000	74.638.007.000	74.638.007.000	74.638.007.000	74.638.007.000	74.638.007.000	74.638.007.000
2	Dit. Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	46.935.172.000	49.242.011	25.950.713.000	10.910.219.000	10.910.219.000	10.910.219.000	10.910.219.000	10.910.219.000	10.910.219.000	10.910.219.000
3	Dit. Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan	62.582.007.000	11.984.349	27.001.002.000	10.640.908.000	10.640.908.000	10.640.908.000	10.640.908.000	10.640.908.000	10.640.908.000	10.640.908.000
4	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	9.691.605.000	4.630.325	3.466.891.000	4.872.124.000	4.872.124.000	4.872.124.000	4.872.124.000	4.872.124.000	4.872.124.000	4.872.124.000
5	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.416.763.000	5.748.694	5.987.759.000	9.470.080.000	8.163.418.000	8.163.418.000	8.163.418.000	8.163.418.000	8.163.418.000	8.163.418.000
6	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	3.808.166.000	4.364.998	6.867.946.000	11.121.619.000	5.927.259.000	5.927.259.000	5.927.259.000	5.927.259.000	5.927.259.000	5.927.259.000
II	UPT (BPKH)	903.396.084.000	313.392.574	305.598.836.000	418.082.385.000	297.512.039.000	297.512.039.000	297.512.039.000	297.512.039.000	297.512.039.000	297.512.039.000
1	BPKH Wilayah I Medan	72.255.265.000	14.515.385	18.219.092.000	38.142.281.000	14.795.467.000	14.795.467.000	14.795.467.000	14.795.467.000	14.795.467.000	14.795.467.000
2	BPKH Wilayah II Palembang	55.371.428.000	13.479.029	16.797.624.000	20.710.588.000	8.770.753.000	8.770.753.000	8.770.753.000	8.770.753.000	8.770.753.000	8.770.753.000
3	BPKH Wilayah III Pontianak	55.093.789.000	17.479.195	15.375.284.000	18.091.190.000	19.731.375.000	19.731.375.000	19.731.375.000	19.731.375.000	19.731.375.000	19.731.375.000
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	49.276.973.000	16.583.716	13.967.392.000	22.842.372.000	24.636.842.000	24.636.842.000	24.636.842.000	24.636.842.000	24.636.842.000	24.636.842.000
5	BPKH Wilayah V Banjarmarud	42.055.606.000	14.553.767	14.929.009.000	16.173.011.000	33.152.567.000	33.152.567.000	33.152.567.000	33.152.567.000	33.152.567.000	33.152.567.000
6	BPKH Wilayah VI Manado	35.943.022.000	18.380.925	12.452.729.000	14.685.995.000	10.533.035.000	10.533.035.000	10.533.035.000	10.533.035.000	10.533.035.000	10.533.035.000
7	BPKH Wilayah VII Makassar	64.993.982.000	20.324.724	16.098.772.000	22.749.018.000	10.850.584.000	10.850.584.000	10.850.584.000	10.850.584.000	10.850.584.000	10.850.584.000
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	17.726.083.000	10.944.681	10.643.214.000	12.514.468.000	8.803.289.000	8.803.289.000	8.803.289.000	8.803.289.000	8.803.289.000	8.803.289.000
9	BPKH Wilayah IX Ambon	43.364.257.000	16.996.124	12.602.016.000	15.545.572.000	12.873.024.000	12.873.024.000	12.873.024.000	12.873.024.000	12.873.024.000	12.873.024.000
10	BPKH Wilayah X Jayapura	53.388.295.000	15.808.518	42.891.459.000	29.439.864.000	16.132.077.000	16.132.077.000	16.132.077.000	16.132.077.000	16.132.077.000	16.132.077.000
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	15.531.506.000	13.538.153	12.622.559.000	19.585.743.000	10.524.632.000	10.524.632.000	10.524.632.000	10.524.632.000	10.524.632.000	10.524.632.000
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	23.193.711.000	11.037.814	7.090.553.000	8.057.129.000	9.319.720.000	9.319.720.000	9.319.720.000	9.319.720.000	9.319.720.000	9.319.720.000
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	23.474.701.000	11.207.461	8.475.310.000	9.694.576.000	6.445.944.000	6.445.944.000	6.445.944.000	6.445.944.000	6.445.944.000	6.445.944.000
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	20.827.642.000	12.506.912	8.860.859.000	27.404.295.000	6.279.773.000	6.279.773.000	6.279.773.000	6.279.773.000	6.279.773.000	6.279.773.000
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	15.204.544.000	14.469.640	8.060.023.000	7.939.673.000	6.895.226.000	6.895.226.000	6.895.226.000	6.895.226.000	6.895.226.000	6.895.226.000
16	BPKH Wilayah XVI Palu	39.816.845.000	17.371.168	15.601.111.000	31.944.436.000	9.378.922.000	9.378.922.000	9.378.922.000	9.378.922.000	9.378.922.000	9.378.922.000
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	53.011.482.000	16.578.627	9.820.837.000	19.943.547.000	9.069.043.000	9.069.043.000	9.069.043.000	9.069.043.000	9.069.043.000	9.069.043.000
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	20.579.074.000	6.952.736	7.666.102.000	11.602.922.000	8.175.513.000	8.175.513.000	8.175.513.000	8.175.513.000	8.175.513.000	8.175.513.000
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	47.663.351.000	11.357.055	9.566.968.000	12.423.975.000	33.730.414.000	33.730.414.000	33.730.414.000	33.730.414.000	33.730.414.000	33.730.414.000

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	17.331.328.000		9.250.784		8.244.843.000		10.084.738.000		7.372.375.000	
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	91.529.244.000		15.823.273		23.249.079.000		35.783.026.000		19.826.649.000	
22	BPKH Wilayah XXXII Kendari	45.763.956.000		14.232.827		12.363.941.000		12.723.966.000		10.214.815.000	

Keterangan:

Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi sebesar Rp 17.980.900.000,-, namun sampai dengan Tahun Anggaran tidak diterima laporan keuangannya karena bukan kewajiban pihak negara - donor (on budget treasury)

Sumber : Sekretariat Diten Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d Desember 2022

TABEL X.7. PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO	SATKER	TAHUN 2018						TAHUN 2019						TAHUN 2020						TAHUN 2021										
		BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029			BAGIAN ANGGARAN 029							
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA					
TOTAL		1.100.434.984.000	584.151.080.483	5.308	516.283.893.817	451.314.101.000	422.598.646.291	9.364	28.714.454.709	447.060.836.000	403.688.153.331	9.034	43.192.682.669	532.555.887.000	528.161.819.137	9.917	4.394.077.863	41.173.791.000	409.223.573.573	99.39	2.507.217.427									
PUSAT		197.018.900.000	149.164.871.299	7.570	47.374.028.701	137.921.527.000	124.387.215.883	9.019	13.534.311.117	141.146.200.000	128.176.911.612	9.061	13.285.008.386	114.473.512.000	114.145.469.947	9.971	328.022.053	114.218.752.000	112.731.929.934	98.70	1.484.822.066									
1	Sekretariat Diljen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	68.605.671.000	61.344.414.973	8.942	7.260.772.027	61.951.150.000	60.541.811.005	9.773	1.409.338.985	72.167.686.000	63.965.145.231	8.861	8.222.543.769	67.358.562.000	67.368.863.213	9.987	89.678.707	74.638.007.000	73.332.253.005	98.38	1.205.753.195									
2	Dit. Pelecanan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembelahan Wayah Pengelestan Hutan	46.935.172.000	33.326.911.965	7.101	13.608.280.035	49.242.011.000	38.597.495.616	7.838	10.644.515.384	25.950.713.000	24.400.373.484	9.403	1.550.339.516	10.910.219.000	10.791.924.184	9.892	118.294.816	7.570.969.000	7.542.387.077	99.62	28.581.923									
3	Dit. Pengelolaan Kawasan Hutan	62.582.007.000	36.592.741.257	5.847	25.989.265.743	11.984.349.000	10.838.344.671	9.044	1.146.004.329	27.001.002.000	24.176.693.692	8.954	2.822.308.308	10.640.908.000	10.565.839.667	9.929	75.068.333	12.669.986.000	12.612.369.489	99.55	57.626.511									
4	Dit. Inventarisasi dan Peninjauan SDH	9.691.605.000	9.152.523.838	9.444	5.416.763.000	5.047.563.435	5.316	3.681.199.565	5.748.694.000	5.683.278.186	9.886	65.141.814	6.867.946.000	6.439.322.442	9.376	4.283.613.556	9.470.000.000	9.453.958.667	9.983	16.121.333	8.163.418.000	8.152.077.726	99.86	11.340.724						
5	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	3.808.166.000	3.700.715.831	9.718	107.450.169	4.364.986.000	4.203.303.856	9.630	16.169.144	5.987.759.000	5.917.941.171	9.883	68.817.629	11.121.619.000	11.113.709.297	9.983	7.968.703	5.927.259.000	5.925.781.540	99.98	1.477.460									
BPKH		903.396.084.000	434.986.084.166	4.815	468.409.864.216	313.320.574.000	298.212.330.408	9.516	15.180.143.592	305.598.836.000	275.591.247.719	9.021	29.307.594.281	418.082.385.000	414.016.129.190	9.903	4.066.055.810	297.512.039.000	296.889.643.639	99.66	1.422.395.361									
1	BPCKH Wilayah I Medan	72.255.655.000	26.598.038.187	3.681	14.556.226.813	14.556.385.000	12.366.327.539	8.533	2.283.857.461	18.299.092.000	15.890.405.973	8.722	2.328.687.027	38.442.811.000	37.593.762.270	9.956	548.704.730	14.954.467.000	14.707.800.599	98.41	87.666.401									
2	BPCKH Wilayah II Palembang	55.371.428.000	28.886.167.632	5.216	26.385.749.038	13.479.029.000	12.780.727.557	9.462	698.755.443	16.977.624.000	14.466.190.120	8.624	2.311.433.880	20.136.058.000	20.136.165.732	9.723	514.482.268	8.717.753.000	8.707.635.411	98.28	62.917.389									
3	BPCKH Wilayah III Pontianak	55.093.789.000	30.865.793.100	5.602	24.227.995.900	17.479.195.000	17.075.958.113	9.769	403.236.887	15.375.284.000	15.403.361.934	9.433	87.922.606	18.911.191.000	18.007.942.137	9.954	83.247.863	19.731.375.000	19.654.103.966	98.61	77.271.904									
4	BPCKH Wilayah IV Samarinda	49.276.973.000	20.381.194.474	4.136	26.385.778.826	16.583.716.000	13.838.073.351	8.345	2.465.012.649	13.967.392.000	12.869.689.524	9.214	1.097.498.476	22.542.372.000	22.631.578.135	9.908	210.793.865	24.235.744.015	24.236.842.000	98.74	311.097.985									
5	BPCKH Wilayah V Banjarmasin	42.055.606.000	22.664.480.480	5.389	19.391.125.520	14.553.767.000	14.491.793.787	9.957	61.367.213	14.929.009.000	13.808.715.568	9.250	1.120.293.432	16.173.011.000	16.162.056.233	9.993	10.914.707	33.152.567.000	33.136.468.138	99.95	16.058.862									
6	BPCKH Wilayah VI Manado	35.943.022.000	20.146.872.055	5.604	15.802.449.545	16.300.256.000	17.804.426.082	9.686	576.659.918	12.452.729.000	11.615.355.243	9.328	837.369.575	14.985.995.000	14.604.446.222	9.944	81.546.778	10.533.035.000	10.482.792.653	99.52	50.242.137									
7	BPCKH Wilayah VII Makassar	64.983.982.000	30.704.632.02	4.724	20.324.724.000	19.879.349.988	19.871	44.733.767	16.088.777.000	15.230.231.345	9.460	868.540.655	22.749.018.000	22.746.237.075	9.999	2.789.925	10.850.584.000	10.449.381.263	99.99	1.192.737										
8	BPCKH Wilayah VIII Depokar	17.726.083.000	15.971.539.797	9.010	1.154.553.203	10.944.881.000	10.638.471.787	9.711	31.650.015	10.634.214.000	9.967.711.663	9.365	675.422.337	12.154.468.000	12.351.280.397	9.974	157.187.603	8.633.289.000	8.709.555.451	98.94	93.733.349									
9	BPCKH Wilayah IX Ambon	43.364.257.000	18.146.974.369	4.185	25.217.282.041	16.986.124.000	16.289.035.172	9.584	707.088.828	11.631.501.769	12.620.016.000	9.230	970.514.231	15.545.572.000	15.436.181.603	9.930	109.399.397	12.873.024.000	12.843.131.490	98.77	29.852.510									
10	BPCKH Wilayah X Jayapura	53.384.956.000	20.043.218.230	3.754	33.345.076.170	15.808.518.000	14.619.328.835	9.248	1.188.229.165	42.891.459.000	30.353.303.900	7.077	12.538.158.100	29.344.186.600	29.344.138.864.000	9.968	95.677.400	16.132.077.000	16.125.391.386	99.96	6.655.614									
11	BPCKH Wilayah XI Yogyakarta	15.531.506.000	14.376.160.166	9.258	1.152.904.344	1.154.553.203	1.154.553.203	9.467	72.167.930.80	12.622.598.000	11.467.752.682	9.085	1.154.846.348	19.385.743.000	19.422.046.807	9.919	138.686.133	10.324.632.000	10.308.155.670	98.85	15.476.330									
12	BPCKH Wilayah XII Tanjung Pinang	23.193.111.000	13.852.431.104	5.972	9.341.279.896	11.037.814.000	10.120.994.216	9.169	916.819.784	7.090.533.000	6.545.034.110	9.231	545.498.990	8.057.129.000	8.021.439.706	9.935	35.689.294	9.319.720.000	9.304.325.441	98.83	15.394.569									
13	BPCKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	23.474.701.000	15.284.405.030	6.515	8.180.285.970	11.207.461.000	11.021.180.702	9.834	185.654.298	8.475.319.000	8.340.663.763	9.841	134.646.237	9.594.576.000	9.631.511.045	9.935	63.064.985	6.445.944.000	6.436.614.590	98.74	24.349.915									
14	BPCKH Wilayah XIV Kepri	20.827.642.000	13.146.749.236	6.600	7.080.872.764	12.816.535.000	12.816.473.920	9.467	11.543.013.946	9.229	963.955.054	8.860.899.000	8.047.777.766	9.082	81.121.214	27.504.295.000	26.027.126.893	9.495	1.382.561.107	6.739.771.000	6.739.771.000	98.58	88.946.015							
15	BPCKH Wilayah XV Gorontalo	15.204.544.000	11.266.465.953	7.410	3.338.078.047	14.469.640.000	13.981.139.073	9.663	487.900.927	8.060.023.000	7.769.073.31	9.639	290.948.669	7.339.673.000	7.888.829.584	9.936	50.844.416	6.636.226.000	6.630.374.222	99.78	14.851.678									
16	BPCKH Wilayah XVI Palu	39.816.845.000	26.331.573.509	6.764	12.885.271.491	17.371.688.000	17.313.545.738	9.967	57.322.262	15.601.111.000	15.554.404.965	9.970	46.710.035	31.944.436.000	31.822.921.275	9.936	121.517.75	9.378.922.000	9.354.572.085	98.74	24.349.915									
17	BPCKH Wilayah XVII Manokwari	53.011.462.000	24.156.356.049	4.455	28.652.123.351	16.578.527.000	15.405.841.369	9.233	1.172.785.611	9.869	1.092.331.000	8.728.486.813	8.888	1.092.350.187	19.343.547.000	19.324.172.508	9.990	6.652.920.166	9.059.043.000	9.059.043.000	99.82	16.122.804								
18	BPCKH Wilayah XVIII Aceh	20.579.074.000	7.412.48																											

X. DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	SATKER	TAHUN 2018				TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
19	BPKH Wilayah XII Pekanbaru	47.663.351.000	10.022.337.316	2.059	37.661.013.684	11.357.055.000	10.744.788.662	9.461	61.265.338	9.566.968.000	9.323.287.363	9.745	243.680.637	12.423.975.000	12.423.791.149	9.399	795.851	33.730.414.000	33.729.732.637	108.00	681.163
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	17.311.328.000	11.936.775.635	6.519	6.032.552.365	9.250.942.000	8.954.465.843	9.691	26.222.157	8.244.843.000	7.965.177.295	9.541	373.667.795	10.984.738.000	10.683.478.620	9.399	2.253.390	7.772.375.000	7.365.598.685	99.91	6.776.219
21	BPKH Wilayah XII Palu/Karawang	91.529.244.000	32.888.273.369	3.593	58.640.970.631	15.823.273.000	15.518.605.054	9.807	30.667.946	23.249.073.000	22.453.493.447	9.658	795.585.553	35.783.026.000	35.586.146.613	9.345	196.873.307	19.826.649.000	19.756.666.269	99.65	69.982.731
22	BPKH Wilayah XIII Kendari	45.763.356.000	19.355.327.584	4.229	26.408.628.416	14.122.327.000	14.125.284.437	9.924	107.542.533	12.363.943.000	11.599.503.940	9.382	765.437.060	12.723.966.000	12.665.677.013	9.354	58.285.907	10.214.815.000	10.194.955.202	99.81	19.859.689

Keterangan:

-Pada TA 2010 terdapat perbaikan Habis Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebesar Rp 17.880.900.000,- namun sampai dengan akhir TA tahun 2010 tidak ditemui laporan keanggarannya karena bukan kerugian pphk (negative donor) (on budget treasury)

- Terdapat penambahan struktur organisasi di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Tata Lingkungan pada TA 2015 berdasarkan Surat Keputusan DIPA, APBN+R/BG/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dijelaskan dalam acuan untuk menjalankan tugasnya.

Kemendikbud melalui Direktorat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sehubungan dengan tugas Direktorat Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-791/AG/2015 tanggal 9 April 2015 perihal Direktorat Jenderal Anggaran dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran Lingkungan dan Tata Lingkungan dan Tata Lingkungan

Sumber : *Sekretariat Dinas Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d Desember 2022*



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan